

PEMBANGUNAN DESA DALAM PERENCANAAN

oleh :

Dra. Johara T. Jayadinata, M.Sc.



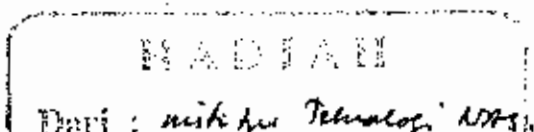
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
1998

HADIAH

Dari : *Institus Teknologi ITS*

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I Tinjauan Kehidupan Sosial	1
1. Pendahuluan	1
2. Beberapa hal mengenai anthropologi budaya	3
a. Keterangan umum	3
b. Sistem Nilai budaya	4
c. Beberapa aliran dalam anthropologi budaya	6
3. Beberapa hal mengenai sosial pedesaan	7
a. Hal-hal yang umum	7
b. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan	10
c. Pengelompokan	12
d. Perubahan sosial	14
4. Tinjauan ekonomi secara umum	15
5. Beberapa teori pembangunan secara umum	16
a. Teori modernisasi	16
b. Teori ketergantungan sepihak	17
c. Teori saling ketergantungan	18
 Bab II Lingkungan Alam dan Lingkungan Binaan di Wilayah Pedesaan.	 20
1. Tinjauan umum	20
2. Keadaan alam di pedesaan	21
a. Sumberdaya alam	21
b. Keadaan fisik bagi pertanian	29
3. Keadaan lingkungan binaan	34
a. Tataguna tanah	34
b. Macam-macam kegiatan ekonomi	35
c. Penyebaran penduduk di pedesaan dan perkotaan	43
d. Keadaan perkampungan di pedesaan	46
e. Sistem Paucia Wilayah ("Five division system")	
f. Keadaan lingkungan binaan di negara lain	
 Bab III Pembangunan Desa	 53
1. Maksud dan tujuan pembangunan desa di Indonesia	53
2. Identifikasi dengan beberapa indikator	58
3. Wilayah pengembangan di Indonesia	57
4. Strategi dan arah pembangunan desa di Indonesia	60
5. Kabupaten sebagai Unit Daerah Perencanaan Pembangunan	61



	Halaman
4. Beberapa teori Pembangunan	99
a. Implikasi menurut ruang dari pembangunan	99
b. Pertumbuhan Kutub	100
c. Hubungan pusat pinggiran	100
5. Beberapa metoda pembangunan pada waktu sekarang	101
a. Redistribusi	101
b. Kebutuhan pokok	102
c. Model ekologi	102
6. Tahapan dalam perencanaan	105
a. Tahapan makro dan mikro	105
b. Desentralisasi dalam pembangunan	106
c. "Top down approach" dan "bottom up" approach	106
7. Perencanaan pusat wilayah pedesaan	107
a. Pengertian pusat wilayah pedesaan	107
b. Koordinasi dalam "top down approach"	108
c. Pengembangan kawasan terpadu	109
d. Sistem pusat pedesaan	109
e. Pengaruh pusat wilayah pedesaan	110
8. Proyek bagi Wilayah pedesaan	113
9. Pembangunan desa dan aspek padatkarya	113
a. Pembangunan desa dan aspek padatkarya	117
b. Perencanaan fisik dalam pusat wilayah pedesaan	119
Bab V Harapan Bagi Wilayah Pedesaan	135
1. Tinjauan kembali mengenai wilayah pedesaan	139
2. Harapan bagi wilayah pedesaan	140
3. Keadaan pedesaan pada waktu sekarang	146
LAMPIRAN	146

HADIAH
 Dari : *Sub'ah Pilmologi N 70*

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar no. 1 : Persebaran air tanah	24
2 : Pembagian iklim A dan tipe iklim Koppen . . .	24
3 : Beberapa kota menurut tipe iklim Koppen . . .	26
4 : Horison horison tubuktanah	26
5 : Perkampungan di pedalaman	41
6 : Lokasi rumah terhadap tanah pertanian	42
7 : Perkampungan di pantai	44
8 : Perkampungan sepanjang sungai	45
9 : Peta penggunaan tanah	47
10 : Pancawilayah	49
11 : Pusat desa	104-105
12 : Analisis lingkungan	121
13 : Rencana struktur proyek Makalet	122
14 : Tataletak suatu pemukiman kembali di Thailand	125

KATA PENGANTAR

Diktat ini digunakan sebagai bahan dalam mata kuliah Tata Desa, PL no. 452, di Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung.

Dalam cetakan kedua ini ada penambahan/perubahan ini, yang disesuaikan dengan keperluannya.

Semoga diktat ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Bandung, 1998

Penyusun

BAB I
TINJAUAN KEHIDUPAN SOSIAL

i. Pendahuluan

Pembangunan Pedesaan ("rural development"), menurut Mosher¹⁾ dapat mempunyai tujuan: 1. Pertumbuhan sektor pertanian, 2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu terbagi-bagi kepada seluruh penduduk. Pada 1997 di Indonesia ada 62.000 desa

Wilayah pedesaan terdiri atas : teritorium (alam) dan penduduk (manusia) serta kebudayaannya.

Maksud pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi : kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya.

Karena hambatan-hambatan-tersebut di atas, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.

Salah satu hambatan yang penting yang menyebabkan kemiskinan penduduk pedesaan rendah, adalah tidak meratanya pemilikan tanah. Misalnya pada 1973 di Nepal²⁾ 63% dari keluarga tani (petani kecil) hanya memiliki 10,6 % dari seluruh tanah pertanian, sedangkan 17,6% dari keluarga tani (petani besar) memiliki 71,50% dari seluruh tanah pertanian. Di Indonesia hal seperti ini tidak terjadi karena terdapat batas maksimum permilikan tanah. Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah untuk memungkinkan keluarga-keluarga petani meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya, sehingga mereka mendapat kesejahteraan, yang berarti memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaian, alat-alat, dsb.) dan spiritual (pendidikan, agama, keterampilan, keamanan, kepercayaan kepada diri, dsb) yang layak. Sebagian keluarga-keluarga petani memerlukan bantuan dalam meningkatkan kemampuannya sebagai petani, dan sebagian lagi memerlukan mata pencaharian di luar sektor pertanian. Sebagian penduduk negara berkembang hidup di desa (Tabel no. 1).

Cara-cara untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga-keluarga petani adalah :

1. Meningkatkan pendidikan keterampilan dan penyuluhan.
2. Mengusahakan perubahan mata pencaharian, jika pendapatan dalam pertanian tak dapat ditingkatkan.

3. Memperluas dan memperbaiki usaha tani.

4. Mengikutsertakan para keluarga petani dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan kelembagaan.

Dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kesejahteraan penduduk (secara spiritual dan material) yang meliputi pemerataan dalam pembangunan pada dewasa ini, dan untuk lebih memahami kehidupan sosial dari penduduk pedesaan, diberikan sedikit pengantar dalam ilmu anthropologi budaya dan ilmu sosiologi pedesaan sebelum tinjauan ekonomi. Dalam tulisan ini, kedua hal tersebut belum dapat diintegrasikan dalam pembicaraan yang khusus mengenai kehidupan sosial penduduk pedesaan di Indonesia, dan masih merupakan pembicaraan umum.

Tinjauan anthropologi budaya dan sosiologi itu diberikan, karena kehidupan ekonomi masyarakat pertanian selalu dikaitkan dengan seluruh kebudayaannya. Menurut Mosher,³⁾ produksi itu hanya salah satu hal dari kebudayaan di samping hal-hal lain seperti: struktur nilai, rite sosial, nilai pribadi dan sikap pribadi, dan sebagainya. Mosher mengemukakan, bahwa walaupun petani itu rasional, tetapi adalah tidak benar bahwa pendapatan yang lebih tinggi, merupakan satu-satunya tujuan dalam penilaian petani. Dengan demikian pendekatan dalam pembangunan desa harus secara sosial-ekonomi.

B. Beberapa hal mengenai anthropologi budaya

a. Keterangan Umum

Menurut Jacobs dan Stern,⁴⁾ anthropologi adalah studi ilmiah mengenai perkembangan fisik, sosial dan budaya manusia, serta tingkah lakunya, mulai mereka datang ke permukaan bumi sampai sekarang.

Anthropologi itu dibagi dua bagian, yakni anthropologi ragawi, dan anthropologi budaya atau anthropologi sosial.

Anthropologi budaya menurut Jacobs dan Stern itu, membahas dan menganalisa berbagai kebiasaan dan bentuk-bentuk sosial dari manusia, terutama bangsa yang teknologinya belum maju, misalnya membahas dan menganalisa : kebudayaan material, kehidupan ekonomi, organisasi masyarakat, kehidupan keluarga, pengelompokan, pemerintahan dan hukum, agama dan kepercayaan kepada magis, kesenian dan bentuk-bentuk lain dari tindakan budaya, dan bentuk-bentuk lain dari tindakan budaya.

warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Kerangka ini memberikan kerangka Kluckhohn dari sistim nilai - budaya, yang terdiri dari lima masalah pokok :

1. Masalah tentang hakekat hidup manusia (disingkat : M.H).
2. Masalah tentang hakekat dari karya manusia (disingkat M.K).
3. Masalah tentang hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (disingkat M.W).
4. Masalah tentang hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. (disingkat M.A).
5. Masalah tentang hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (disingkat M.M).

Untuk memudahkan, maka kerangka Kluckhohn di atas itu dicantumkan dalam tabel di bawah ini (tabel no. 2).

TABEL 2

**KERANGKA KLUCKHOHN MENGENAI LIMA MASALAH DASAR DALAM HIDUP YANG
MENENTUKAN ORIENTASI NILAI - BUDAYA MANUSIA**

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi Nilai - Budaya		
Hakekat hidup (MH)	Hidup itu buruk, dan harus dihindari.	Hidup itu baik, dan menggenairakan.	Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik.
Hakekat karya (MK)	Karya itu untuk kebahagiaan hidup	Karya itu untukבודukan kehormatan dsb.	Karya itu untuk menambah karya.
Penerimaan manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Penerimaan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat.	Manusia berusaha menjaga keselamatan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesamanya (terjiwa potong moyong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat.	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Cara berbagai kebudayaan di dunia mengkonsepsikan masalah-masalah universal tersebut di atas dapat berbeda-beda, walaupun kemungkinan untuk bervariasi itu adalah terbatas.

6. Aliran Leiden (aliran Belanda)

Aliran ini terpengaruh oleh aliran Perancis, tetapi pandangannya tidak se jauh aliran Perancis itu. Aliran itu berpendapat, bahwa organisasi masyarakat erat hubungannya dengan sistem perkerabatan dan perkawinan, bahkan sebagian besar dikuasai oleh kedua sistem itu.

7. Aliran Amerika

Istilah aliran Amerika sebetulnya kurang tepat, karena terdapat tokoh-tokoh yang berbeda pendapat.

Menurut aliran ini, lingkungan alam berpengaruh kepada kebudayaan, tetapi tidak menentukan. Dikemukakan bahwa terdapat beberapa kawasan kebudayaan yang ditentukan terutama oleh kebudayaan material (teknologi) yang dipengaruhi besar oleh lingkungan geografi. Dalam kebudayaan rohani dipelajari unsur kebudayaan ("traits") tertentu, yang menonjol.

Kemudian antropologi Amerika itu meninggalkan konsepsi materialistis dan berpindah ke konsepsi psikologi. Sekarang bukan teknologi, tetapi jiwa (psyche) yang menjadi mesin penggerak dalam kebudayaan. Dalam hal itu dikenal "pattern of culture" dan "pattern of behaviour".

Para ahli aliran itu berkesimpulan bahwa tiap kebudayaan mempunyai hak hidup.

3. Beberapa hal mengenai sosiologi pedesaan

a. Hal-hal yang umum.

Bertrand⁸⁾ menerangkan bahwa sosiologi adalah suatu studi dalam pemolaan kegiatan atau tindakan yang tampak dalam hal-hal tertentu, yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa kebudayaan dapat menerangkan sebagian besar dari pola kegiatan dan tindakan manusia itu. Dalam hal itu ia mengambil pengertian kebudayaan menurut Tylor,⁹⁾ yaitu bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, agama, kesenian, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat ("Culture is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society").

6. Terlepas apakah suatu benda atau tindakan tertentu baik atau buruk, disebut nilai, dan pengaturan yang mengendalikan tindakan untuk mencapai nilai-nilai itu, disebut norma.
7. Lapisan sosial ("social stratification") menunjukkan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan horizontal. Tiap orang mempunyai bermacam-macam status, yang jumlah keseluruhannya disebut "station", (stasi). "Prescribed status" adalah status yang didapat dengan kelahiran (Anak raja semenjak lahirnya sudah dicalonkan menjadi raja. Anak seorang Brahma semenjak lahir adalah Brahma) dan "achieved status" adalah status yang didapat dengan perbuatan tertentu (menjadi seorang sarjana, seorang kepala desa, seorang ulama, dan sebagainya).
8. Sistem terbuka dan sistem tertutup
- Perpindahan dari golongan yang satu ke golongan yang lain disebut mobilitas sosial yang vertikal ("vertical social mobility"). Masyarakat yang mengizinkan kenaikan sosial seperti itu mempunyai sistem golongan yang terbuka ("open-class system").
 - Sistem di mana golongan seseorang ditentukan sama sekali oleh kelahirannya ("by birth"), sehingga ia tidak dapat pindah/naik ke golongan lain disebut sistem kasta ("caste system").
(Di Bali, yang mempunyai sistem kasta, dalam mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya berlaku juga "open class system").

9. Organisasi sosial pedesaan

Organisasi sosial pedesaan meliputi interaksi dalam :

1. Hubungan petani dengan tanahnya dan usaha taninya.
2. Hubungan petani dengan alam sekelilingnya.
3. Hubungan petani dengan anggota-anggota masyarakat lainnya.

10. Kontrol sosial ("social control")

Kontrol sosial terjadi dari berbagai proses, di mana masyarakat mewajibkan ketaatan terhadap pola-pola tingkah laku yang dianggap benar dan baik.

Terdapat dua macam kontrol sosial :

- Kontrol sosial informal, yang terbentuk oleh tenaga-tenaga seperti: kata hati ("geweten" atau "conscience"), celaan, dan sebagainya.

d. Isolasi yang relatif : pedesaan jarang penduduknya, kendaraan kurang. Menyebabkan orang-orang desa lebih berdikari ("self reliant") daripada orang kota.

Sekarang kendaraan desa dan angkutan mulai lebih baik.

2. Pengaruh lingkungan sosial¹¹⁾

a. Pentingnya hubungan kelompok primer ("face to face", family or play group").

Kelompok primer jarang merasa kesepian atau frustrasi (perbedaan yang penting antara penduduk kota dan desa).

Di luar keluarga hubungan di desa berpusat kepada lingkungan (RT, RK).

b. Perbedaan sosial

Masyarakat di desa kurang kompleks dari masyarakat kota.

Penduduk di pedesaan lebih homogen, di kota lebih heterogen.

Solidaritas di pedesaan berlaku secara mekanik (karena homogen), di kota secara organik.

c. Lapisan sosial

Lapisan dan kelas pada masyarakat desa hanya sedikit, misalnya petani yang tanahnya luas, dan yang tanahnya kecil, dan yang tak bertanah.

d. Mobilitas sosial

Berlaku di desa dalam skala kecil.

3. Pengaruh lingkungan budaya.¹²⁾

Semua orang adalah pendukung/pengomban kebudayaannya sendiri mulai dari lahir ke bumi sampai akhir dari kehidupannya.

Makin kompleks suatu masyarakat, makin besar terdapat perbedaan.

a. Kesederhanaan dari ungkapan budaya di pedesaan lebih sederhana daripada di kota ("sophistication" dari kebudayaan adalah monopoli orang kota) : paksaan orang kota, tindakan-tindakannya, dan sebagainya.

b. Kontrol sosial

Di pedesaan kontrol sosial dilakukan oleh alat informal, misalnya pergunjungan tetangga jika seseorang melanggar "kode etik" kehidupan masyarakat desa. Kontrol dari keluarga penting.

c. Menurut Ferdinand Tonnies

- Kelompok yang hubungannya berkembang dengan tidak disadari, disebut : *Gemeinschaft*.
- Kelompok yang hubungannya dikembangkan dengan sengaja untuk mencapai suatu maksud tertentu, disebut : *Gesellschaft*.

3. Menurut formalitas :

- Kelompok formal, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk secara sistematis untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, dan yang bekerja menurut aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Kelompok demikian dalam sosiologi disebut : asosiasi.
- Kelompok informal, yang tidak mempunyai syarat-syarat yang tercantum di atas.

4. Menurut tempat :

Kelompok yang terbentuk karena terdapat relasi yang disebabkan oleh lokasi atau wilayah, seperti : kelompok RT/RW.

5. Menurut kepentingan :

Kelompok yang diikat oleh kepentingan misalnya : koperasi petani, dan sebagainya.

6. Menurut keadaan ekonomi dan keterampilan, terdapat beberapa kelas atau golongan.

Yang termasuk golongan atas, biasanya hanya sedikit sekali.

Ciri-ciri "middle class" (golongan menengah) dan "lower class" (golongan rendah), dapat diterangkan sebagai berikut :

Kelas-kelas atau golongan itu adalah : "upper class, middle class; lower class, white collar class, business class, working class, professional class, farmers".

"Middle class" (golongan menengah) dicirikan oleh ketahanan ekonomi, hemat, dan bertujuan memiliki harta.

Mungkin mereka hanya mempunyai harta sedikit, tetapi mereka menghargai hak orang lain. Mereka senang mengejar hasil dari jerih payah sendiri dan kemajuan bagi dirinya. Umumnya suami bekerja untuk nafkah, istri mengatur rumah tangga.

"Lower class" (golongan rendah) dicirikan oleh keadaan sebaliknya

yang sempurna tidak mungkin ada, karena dalam masyarakat selalu terjadi hal-hal yang relatif kurang baik. Maka diusahakanlah suatu reorganisasi dari interaksi sosial dan menghilangkan disorganisasi, yang disebut perencanaan sosial ("social planning").

4. Tinjauan ekonomi secara umum

Di negara-negara berkembang dapat dilakukan : keadilan sosial yang diselenggarakan untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi.

Menurut Myrdal¹¹ ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa pemerataan yang lebih baik di negara-negara berkembang hampir merupakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat :

- a. Pendapat umum bahwa pendapatan yang tidak sama merupakan kondisi untuk menabung, bagi negara-negara berkembang kurang berlaku karena di negara-negara berkembang itu tuan tanah dan orang kaya menggunakan pendapatannya untuk konsumsi sangat berlebihan, dan kadang-kadang modal lari ke luar negeri.
- b. Karena rakyat kekurangan gizi, dan perumahannya buruk, kesehatan dan pendidikannya kurang baik, sehingga produktivitasnya rendah.
- c. Ketidak-rataan sosial mempengaruhi ketidak-rataan ekonomi; kedua-duanya dapat merupakan sebab dan akibat.
Kesamaan ekonomi cenderung menyebabkan kesamaan sosial.
Jika ketidak-rataan sosial berpengaruh buruk bagi pembangunan, pemerataan yang lebih baik dapat menyebabkan produktivitas yang tinggi.
- d. Pemerataan merupakan keadilan sosial dan baik pengaruhnya bagi integrasi nasional.

Dengan keterangan-keterangan di atas, kebijaksanaan pembangunan dalam negara-negara berkembang umumnya cenderung kepada pemerataan yang lebih baik.

Menurut Myrdal itu, walaupun usaha dan kemajuan untuk mencapai pemerataan merupakan perhatian sebagian besar dari penduduk, yaitu penduduk yang miskin, tetapi mereka itu umumnya pasif, apatis dan tak dapat menguskannya.

Nehru mengemukakan bahwa penduduk yang betul-betul miskin tidak mungkin mengadakan pemogokan, karena mereka tidak mempunyai kemampuan dan kekuasaan dan tidak dapat mengemukakan sesuatu untuk melakukannya.

adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita kemajuan, yaitu dengan Bergeraknya peradaban ke arah yang diharapkan.

Menurut konsep Barat, arah yang dianggap diharapkan itu adalah hanya satu, yaitu berubahnya peradaban pertanian menjadi peradaban industri. Pendirian aliran itu adalah : jika diketahui keluaran (keuntungan) dari modal dan diketahui tingkat pertumbuhan, dapat dicari tingkat investasi yang sesuai. Pertumbuhan umumnya adalah fungsi investasi, dan akan terdapat suatu evolusi yang menuju macam-macam fasa yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya teori evolusi Rostow dalam perekonomian, yang mengemukakan urutan pembangunan: fasa tradisional - fasa transisi - fasa lepas landas ("take off") - fasa dewasa dan fasa konsumsi massal.

- b. Teori Ketergantungan Sepihak ("Dependency theory"), yang merupakan reaksi di Amerika Latin terhadap teori Modernisasi. Teori itu adalah kebijaksanaan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan dan merupakan pengembangan dari sistim Pusat-Pinggiran ("Centre - Periphery system").

Menurut teori Ketergantungan Sepihak harus diperhatikan, bahwa :

1. Rintangan pembangunan di negara sedang berkembang tidak datang dari dalam tetapi dari luar yaitu: pembagian tenaga kerja (matapencaha-rian) secara internasional.
2. Antara dua wilayah yang tidak sama kemajuannya terdapat : hubungan pusat - pinggiran, dan dari wilayah pinggiran dianggap terus mengalir hasil produksi ke wilayah pusat.
3. Perkembangan dan keterbelakangan adalah suatu proses yang menyangkut seluruh dunia, sehingga perkembangan wilayah pusat - (di dunia) meliputi keterbelakangan wilayah pinggirannya.
4. Karena wilayah pinggiran cenderung untuk ketinggalan, akibat kaitannya dengan wilayah pusat, maka perlu bagi suatu negara untuk melepaskan orientasi pasaran dunia, dan berjuang supaya berdikari.

Perhatian dipusatkan pada : ketergantungan ekspor, substitusi impor, nilai tukar, campurtangan pemerintah, integrasi wilayah, dan sebagainya. Strateginya mendapat rintangan, karena tidak tersedianya pasaran lokal, dan karena ketergantungan teknologi.

BAB I

1. Mosher, A.T., *Creating a Progressive Rural Structure : To Serve a Modern Agriculture*, Agricultural Development Council, New York, hln. 91.
2. Misra, *Rural Development: National Policies and Experiences*; Misra, R.P. and Bhoshan, B.S. : *Rural Development: National Policies and Experiences*, hln. 21.
3. *Ibid*, hln. 91.
4. Jacobs, M., and Stern, B.J., *An Outline of General Anthropology*, Barnes and Noble, Inc., New York, 1947, hln. 1-3.
5. Kuncaraningrat, *Kebudayaan: Mentalitet dan Pembangunan*, P.T.Gramedia, Jakarta, 1974, hln. 12.
6. Kuncaraningrat, *loc cit*, hln. 32-35.
7. Palm, Dr. C.H.M., *Sejarah Anthropologi Budaya*, Dep. P. dan K, Balai Pendidikan Guru, Bandung, hln. 34.
8. Bertrand, A.L., *Rural Sociology: An Analysis of Contemporary Rural Life*, Mc.Graw-Hill Book Company, Inc., New York - Toronto - London, 1958.
9. *Ibid*, hln. 16.
10. *Ibid*, hln. 16.
11. *Ibid*, hln. 18.
12. *Ibid*, hln. 35.
13. *Ibid*, hln. 15.
14. *Ibid*, hln. 20.
15. FAO, *Ideas and Action*, Bulletin no. 149, 1982/6; Hettne, B. : *Development Theories and Models*, hln. 21-24.
16. Djojohadikoesoemo, Soemitro, 1975, *Indonesia dalam perkembangan dunia*, : *Kini dan masa datang*, LP₃ES, Jakarta, hl. 149.

hektar sampai panen.

Di negara-negara yang telah maju banyaknya jam kerja/orang/hektar sampai panen itu, berkat sistim pertanian yang telah maju dan alat-alat mesin, dapat diperkecil.

Menanam jagung di negara yang telah maju misalnya, dengan pekerjaan yang menggunakan sistim penanaman yang baik, pupuk yang cukup dan alat-alat mesin, dari menanam sampai panen hanya : 8,1 jam kerja orang per hektar. Jika diketahui jumlah ton hasil per ha, dapat dihitung produktivitas jam kerja orang per ton jagung. Hasil pertanian yang memerlukan banyak jam kerja orang per hektar ialah karena dalam pengerjaannya masih banyak memerlukan pekerjaan dengan tangan.

Dengan penggunaan mesin dapat disengerti, bahwa di Amerika Serikat tiap 4 orang bekerja dalam sektor pertanian untuk memberi makan kepada 100 penduduk (petani di Amerika Serikat, hanya $\pm 4\%$), dan di samping itu Amerika Serikat mengekspor bahan makanan.

Di Indonesia tiap 70 orang harus bekerja dalam sektor pertanian untuk memberi makan kepada 100 penduduk (petani di Indonesia ada $\pm 70\%$), dan di samping itu Indonesia masih mengimpor sebagian bahan makanan.

Selain jumlah jam kerja orang/ha belum baik, juga jumlah produksi per hektar di Indonesia belum begitu tinggi.

Karena Indonesia terutama Jawa mempunyai jumlah penduduk yang besar dan modal dalam pertanian yang masih kecil dan di samping itu industri (yang dapat menerima kelebihan pekerja dari sektor pertanian) belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, usaha yang penting pada dewasa ini adalah menaikkan produksi per hektar dalam pertanian.

2. Keadaan Alam di Pedesaan

a. Sumberdaya Alam

Unsur-unsur alam baik yang abstrak (seperti suatu daerah, situasinya, luasnya, bentuknya dan sebagainya) maupun yang nyata (seperti bentuk daratan, air, iklim, tanah, mineral, vegetasi, dan sebagainya) mempengaruhi penyebaran penduduk dan mempengaruhi kegiatan sosial-ekonomi manusia.² Berhubung dengan itu unsur-unsur alam tersebut disebut juga sumberdaya-alam.

b. Air laut, air permukaan, air tanah.

Salah satu unsur alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Laut yang dahulu merupakan penghalang, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang merupakan penghubung. Karena Indonesia merupakan kepulauan, laut besar pengaruhnya dalam kehidupan, karena laut itu merupakan sumber bahan makanan, dan sumber mineral, merupakan penghubung antar pulau dan penghubung secara internasional. dan memberikan pula keuntungan-keuntungan lain.

Akibat laut sebagai penghubung (karena perkembangan pengangkutan laut), di tepi pantai dewasa ini terdapat kota-kota besar. Bagaimana pentingnya hubungan laut tampak dari kenyataan, bahwa dari 125 kota terbesar di dunia, 80 kota terletak di tepi pantai, 27 kota di tepi sungai, dan 7 kota di tepi danau-danau besar, sehingga hanya 11 kota yang tidak mempunyai hubungan air. Pelabuhan adalah penting fungsinya dalam kebudayaan umumnya, perekonomian khususnya, karena merupakan pintu gerbang bagi keluar-masuknya unsur-unsur kebudayaan, barang dan jasa. Dalam pengembangan pelabuhan harus diperhatikan syarat-syarat yang merupakan unsur alam, seperti : terlindung dari angin dan gelombang serta endapan pasir, dan sebagainya, dan syarat-syarat sosial seperti rapat penduduk di hinterland dan hasil produksinya.

Sebagaimana disebutkan di atas, air permukaanpun (sungai, terusan, danau, rawa, dan sebagainya) merupakan penghubung yang baik. Sungai yang baik bagi perhubungan harus mempunyai syarat-syarat fisik dan sosial tertentu, seperti: kedalaman sungai, perbedaan volume air pada musim yang berbeda, dan sebagainya, dan syarat-syarat sosial seperti : rapat penduduk sepanjang sungai dan hasil produksinya. Di samping sebagai penghubung itu, air permukaan berguna juga sebagai persediaan air untuk rumah tangga, pertanian dan industri, untuk irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Masalah-masalah dalam air permukaan adalah : kekurangan air, banjir (kelebihan air) dan polusi air.

Air tanah yang diambil dari bawah permukaan tanah (ditimba atau dipompa), digunakan dalam persediaan air (rumah tangga, pertanian

dan industri). Permukaan air tanah dapat dikatakan sejajar dengan permukaan tanah, jika tanahnya datar, tetapi permukaan air tanah itu di bukit menjauhi dan di lembah mendekati permukaan tanah. Dengan demikian air tanah di bukit jauh lebih dalam dari pada di lembah. (Gambar no. 1). Kadang-kadang air tanah ke atas di suatu lembah, dan merupakan mata air.

c. Iklim

Iklim merupakan unsur alam yang sangat mempengaruhi manusia dalam kegiatan-kegiatannya. Cuaca dapat mengubah rencana seseorang dalam waktu tertentu tetapi iklim dapat menentukan bilamana suatu kegiatan tertentu dari suatu rencana jangka panjang (misal dalam pertanian) dapat dilakukan. Dalam perencanaan pertanian, industri, transportasi dan kegiatan-kegiatan lain dapat dicari keadaan iklim yang menguntungkan yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam iklim unsur-unsur tertentu adalah: temperatur, hujan, angin, tekanan, dan sebagainya. Yang umumnya diperhatikan adalah nilai normal (misalnya temperatur normal atau curah hujan normal), yaitu nilai yang didapatkan dari pengamatan tiga puluh tahun.

Temperatur normal di Indonesia di tepi pantai kira-kira 27°C , curah hujan normal di atas 200 cm. Karena temperatur tinggi dan curah hujan yang tinggi, Indonesia secara umum disebut wilayah iklim tropika basah. Secara lebih terperinci menurut Koppen di Indonesia itu dapat dibedakan 3 macam tipe iklim, (Gambar no. 2).

- Iklim hutan hujan tropik (A f), dengan hujan sepanjang tahun, yang meliputi wilayah-wilayah yang berdekatan dengan khatulistiwa.
- Iklim musim (Am) yang mempunyai musim kemarau dan musim hujan, di mana curah hujan adalah cukup bagi pertanian (mis. P. Jawa).
- Iklim sabana dengan musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang pendek (Nusa Tenggara), sehingga air bagi pertanian kurang cukup.

Di bawah ini dicantumkan gambar mengenai iklim beberapa tempat di Indonesia (Gambar no. 3).

d. Tubuh-tanah ("Soil")

Pembentukan tubuh tanah terjadi oleh pelapukan, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi dan pelapukan organik. Dalam proses pelapukan ini terjadilah macam-macam tekstur tubuh tanah, yaitu besarnya butir-butir tubuh tanah, yang kasar (pasir kasar), agak halus (pasir halus), halus sekali (lempung). Dalam proses pelapukan tersebut, terjadilah pula macam-macam perubahan, sehingga timbullah macam-macam struktur tubuh-tanah, yaitu susunan tubuh-tanah yang terdiri atas butir tubuhtanah, air tanah, dan ruang-ruang udara, serta bagian-bagian organik (humus).

Jadi tubuh-tanah itu adalah lapisan batuan-batuan yang telah melapuk, yang letaknya saling atas pada permukaan bumi. Dapat dibedakan horizon-A yang letaknya paling atas, horizon-B yang letaknya di tengah dan horizon-C yang letaknya di bawah, (Gambar no 4). Horizon-horizon A, dan B adalah tubuh tanah sebetulnya (disebut "solum"), horizon C masih merupakan batuan induk yang belum sama sekali melapuk. (kadang-kadang ditambahkan horizon D yang merupakan batuan induk yang masih keras, karena belum melapuk, serta letaknya paling bawah).

Tubuh-tanah adalah tempat berdiri tanam-tanaman dan tempat tanam-tanaman mengambil sebagian dari makanannya dan air. Horizon-A adalah tempat sumber makanan dan air bagi tanam-tanaman berakar pendek. Pohon-pohonan mengambil makanan dan air dari lapisan-lapisan yang lebih dalam, kadang-kadang akar-akarnya yang panjang itu dapat menyusup sampai batu-batuan yang masih keras. Selain itu tubuhtanah itu tempat hidup binatang-binatang kecil dan bakteri. Manusia menggunakan tubuhtanah bagi pelindung pipa air, pipa gas, pipa minyak, dan sebagainya. Di beberapa wilayah untuk menimbuni jalan-jalan yang telah dilapisi batu itu, tidak digunakan aspal, tetapi tubuhtanah.

Tubuhtanah tertentu dapat digunakan dalam perindustrian, misalnya tanah-liat dibuat bata, genting, barang-barang keramik, dan sebagainya; pasir digunakan dalam pembangunan rumah dan bangunan-bangunan lain, pembuatan ubin, dan sebagainya.

pohon kecil, tumbuhan memanjat dan perdu. Pohon-pohonannya sangat heterogen, serta menghijau sepanjang tahun. Vegetasi hutan hujan tropik disebut juga: selva.

- Vegetasi hutan musim, yang terdapat di wilayah iklim musim yang mempunyai temperatur yang tinggi dan mengalami musim hujan dan musim kemarau berganti-ganti (menurut Koppen: iklim Am) yang terdiri atas pohon-pohonan yang homogen dan tidak begitu besar (tinggi \pm 40m, dan penampang \pm 1m) serta hutannya tidak begitu rapat jika dibandingkan dengan hutan hujan tropik; beberapa dari pohon-pohonannya menggugurkan daunnya pada musim kemarau.
- Vegetasi sabana yang terdapat di wilayah iklim sabana yang akibat kemarau yang panjang, terdiri atas tegal rumput diselingi pohon-pohonan yang jarang sekali.

Wilayah vegetasi hutan hujan tropik sukar berkembang, karena hutannya rapat, dan pohon-pohonannya besar-besar, dan kadang-kadang berawa-rawa. Penduduknya jarang, kota-kota tidak banyak. Wilayah vegetasi hutan musim merupakan wilayah yang baik. Wilayah ini merupakan wilayah yang sesuai untuk ditanami padi-sawah dan padi gogo, kelapa, tembakau, teh, karet, macam-macam bumbu, macam-macam buah-buahan seperti jeruk, nenas, dan sebagainya, dan macam-macam sayuran. Penduduknya rapat dan kota-kota dapat berkembang.

Wilayah vegetasi sabana mengalami kesukaran-kesukaran akan air bagi pertanian dan rumah tangga, sehingga pertanian kurang maju. Wilayah itu merupakan wilayah peternakan. Penduduknya kurang rapat.

b. Keadaan Fisik bagi Pertanian

1. Bentuk daratan dan tubuh tanah

Bentuk daratan yang berbeda sering memperlihatkan pula perbedaan dalam tumbuh-tumbuhan. Beberapa tumbuh-tumbuhan baik tumbuhnya di dataran rendah, sedangkan tumbuh-tumbuhan lain lebih baik jika tumbuh di pegunungan. Ada tanam-tanaman yang subur hidupnya jika ditanami di wilayah yang datar, sedangkan tanaman lain lebih se-

kwalitinya: baik sekali, sedangkan tanam-tanaman lain dapat tumbuh subur dalam berbagai kwalita tubuh tanah. Baik buruknya sebidang tanah untuk pertanian biasa diperhitungkan dalam menilai sebidang tanah untuk penggunaan pertanian tertentu, yang disebut kelas kapabilitas tanah atau "land capability class" (Tabel no. 4).

TABEL NO. 4

PENGGUNAAN TANAH YANG PALING BAIK PADA TIAP
KELAS KAPABILITAS TANAH (MENURUT VERNON)

Kelas kapabilitas tanah

I. Tubuh tanah yang baik pada lereng A dan B.	Baik untuk pertanian (bahan makanan) dengan hampir tidak ada pembatasan.
II. Tubuh tanah yang baik pada lereng C.	Baik untuk pertanian, dengan beberapa pembatasan.
III. Tubuh tanah yang kurang baik pada lereng D dan sebagian kecil lereng yang lebih landai.	Baik untuk pertanian, dengan pembatasan-pembatasan yang keras.
IV. Sebagian besar merupakan lereng E, dan sebagian kecil pada lereng D.	Baik untuk tanaman keras dan rumput dan sedikit sekali kemungkinan untuk pertanian bahan makanan.
V. Sebagian besar merupakan lereng E dan lereng F.	Tidak dapat digunakan untuk pertanian, hanya boleh digunakan untuk hutan-atau tanaman keras.
VI. Lereng-lereng yang berbatu batu di daerah yang iklimnya kering.	Tidak dapat digunakan untuk pertanian. Hanya untuk hutan.
VII. Tanah yang terdiri dari batu keras, atau luapan sungai, dan sebagainya.	Sedikit sekali gunanya atau sama sekali tak dapat digunakan.

(Lanjutannya pada halaman berikut).

temperatur (yang disebabkan oleh: a. lamanya penyinaran dan b. besarnya sudut sinar) dan curah hujan. Yang diperlukan oleh tumbuhan adalah : musim panas, yang perlu untuk pertumbuhan; dan banyaknya curah hujan, yang membantu pertumbuhan. Umumnya terdapat 3 pokok dari vegetasi :

- Pohon-pohonan : Yang memerlukan banyak hujan dan musim panas yang lama sebagai masa pertumbuhan yang panjang (Di pegunungan-pegunungan terdapat batas pohon, untuk wilayah tropika: 3000m).
- Belukar dan perdu : Yang tumbuh di wilayah kering; pada batas rawa; atau di lereng gunung pada batas antara kawasan pohon-pohonan dan kawasan rumput.
- Rumput : Yang merupakan tumbuhan yang paling kuat; tahan keke-
rangan, dingin dan hujan.

Ketiga macam tumbuh-tumbuhan di atas itu mungkin juga terdapat pada suatu gunung : rumput (pada kaki gunung), belukar dan pohon-pohonan yang tahan kering (agak tinggi), pohon-pohonan yang tahan basah (lebih tinggi), belukar dan rumput (tinggi sekali).

Dalam hubungan tanam-tanaman dengan iklim dapat dikatakan bahwa tiap tanaman mempunyai syarat-syarat tertentu dalam tinggi temperatur dan curah hujannya. Pohon karet misalnya hanya dapat tumbuh pada temperatur yang sepanjang tahun kira-kira $70 - 80^{\circ}\text{F}$, dengan hujan 200 - 300 cm per tahun di mana bulan terkering harus mempunyai curah hujan maksimal 6 cm. Keadaan semacam ini terdapat pada $10^{\circ}\text{LU} - 10^{\circ}\text{LS}$, dan Indonesia terletak di wilayah semacam itu.

3. Unsur-unsur yang abstrak

Unsur-unsur fisik yang abstrak pun banyak pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial umumnya, dalam pertanian khususnya.

Unsur-unsur yang abstrak itu misalnya: posisi, lokasi dan jarak.

Bagaimana pengaruh jarak dalam kehidupan sehari-hari, dapat diterangkan seperti di bawah ini :

Di suatu wilayah di salah satu propinsi di Indonesia terdapat suatu aturan bahwa tanah adalah kepunyaan marga (desa), sehingga tanah itu merupakan permilikan komunal. Tiap kepala keluarga di sana diperbolehkan menggunakan tanah (dengan membuka hutan) seluas 100 depa

Enam fungsi urban yang mempengaruhi penggunaan tanah di kota adalah:³⁾

1. Industri (pabrik-pabrik, perumahan pegawai, dan sebagainya).
2. Perdagangan (pasar, kawasan pertokoan, gudang-gudang, dan sebagainya).
3. Administrasi (pemerintahan).
4. Pertahanan (komplek-komplek militer dengan asrama, lapangan untuk latihan, dan sebagainya).
5. Kebudayaan (universitas, tempat-tempat peribadatan, museum, perpustakaan, dan sebagainya).
6. Rekreasi (taman-taman, teater, bioskop, lapangan olah raga, kolam renang, dan sebagainya).

Dari perbedaan "land use" di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan itu, tampak jelas bahwa wilayah pedesaan memberikan hasil pertaniannya dan jasanya ke kota-kota, dan kota-kota memberikan jasa-jasanya (pelayanannya) dan hasil industri ke wilayah pedesaan.

b. Macam-Macam Kegiatan Ekonomi yang Mempengaruhi Tataguna Tanah di Pedesaan adalah :

1. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Indonesia. Penduduk Indonesia \pm 70% hidup dari bercocok tanam. Tanah merupakan sumber alam terpenting.

Pertanian itu dapat dibagi menjadi :

a. Pertanian primitif, yang di Indonesia merupakan :

"Shifting cultivation" yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut : perladangan bakar, perladangan liar atau huma, serta dalam bahasa Inggris digunakan juga istilah-istilah: "migratory agriculture" atau kadang-kadang disebut juga "slash and burn agriculture" atau "swidden". Perladangan bakar itu merupakan pertanian yang sederhana sekali: menebang pohon dengan parang (alat satu-satunya dari besi), membakar pohon-pohon yang telah ditebang, meratakan tanah dan menanaminya. Syarat-syarat untuk pertanian semacam ini adalah tanah yang luas, penduduk yang jarang dan permilikan tanah yang komunal (hutan kepunyaan desa). Syarat-syarat itu diperlukan karena

- pengairan tanah (irigasi).
- pemupukan tanah (dengan pupuk alam atau "manure" dan pupuk buatan atau "fertilizer").
- pencegahan erosi seperti : teras-teras sawah, pembajakan menurut garis tinggi ("contour ploughing"), tanaman berjalannya ("strip cropping"), penghijauan, penghutanan kembali, dan lain sebagainya.
- seleksi benih.
- penumpasan hama.
- dan sebagainya.

2. Perikanan dan peternakan

Di negeri-negeri yang tanahnya digunakan bagi pertanian bahan makanan akan merupakan sumber protein hewani utama.

Di Indonesia terdapat 2 macam perikanan :

a. Perikanan darat merupakan kegiatan ekonomi reproduktif, yaitu pemeliharaan ikan tawar di dalam kolam (di Jawa Barat), sawah, rawa (pantai timur Sumatra), danau-danau (danau Tempe di Sulawesi dan sebagainya), dan ikan payau di dalam tambak atau empang (sepanjang pantai utara Laut Jawa).

Di Indonesia tidak terdapat sungai yang menghasilkan ikan yang penting.

b. Perikanan laut merupakan kegiatan ekonomi ekstraktif: yaitu penangkapan ikan di laut.

Perikanan laut di Indonesia masih merupakan perikanan laut dangkal dan perikanan pantai, yang menggunakan perahu-perahu/kapal-kapal dan peralatan yang sederhana. (Di negeri-negeri lain di samping perikanan laut dangkal dan pantai, dilakukan pula perikanan lautdalam ("deep sea fishery"), yang menggunakan kapal-kapal dan peralatan-peralatan yang lebih modern, sehingga kadang-kadang kapal-kapal itu merupakan pabrik yang mengolah dan mengalengi ikan).

Penduduk di Indonesia menggunakan kapal layar atau kapal bermotor yang kecil yang dilengkapi dengan jaring. Perusahaan-perusahaan perikanan laut yang besar di Indonesia menggunakan kapal-kapal yang

dang di dekat hutan-hutan semacam itu terdapat perusahaan penggergajian kayu. Pengusaha-pengusaha hutan itu berkewajiban menanam pohon-pohonan muda lagi (peremajaan hutan) setelah menebang pohon-pohonan yang besar, untuk dijual.

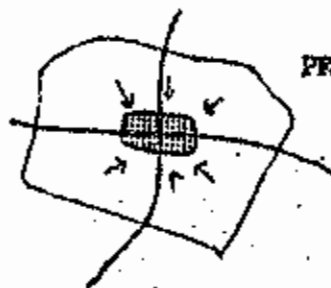
b. Hutan buatan ("artificial forest")

Hutan buatan ("artificial forest") terdiri atas hutan jati (di P. Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lainnya), dan lain sebagainya. Bagi pulau Jawa hutan buatan itu sangat penting artinya. Konsumsi kayu bakar per kapita di P. Jawa merupakan konsumsi tertinggi di Asia Tenggara ($0,5 \text{ m}^3/\text{orang}/\text{tahun}$). Di samping penggunaan kayu untuk bangunan dan industri (misalnya mebel), diperlukan persediaan kayu yang cukup untuk kayu bakar. Dengan demikian adalah penting untuk mengusahakan hutan buatan itu secara terencana sehingga produksi meningkat. Dalam kehutanan dikenal istilah rotasi atau "forest calender" yang meliputi :⁴⁾ menanam pohon, melindungi, menebang sebagian pohon muda untuk penjarangan, memelihara dan menebang pohon yang telah dewasa. Rotasi atau "forest calender" itu berkisar antara 7 tahun sampai 60 tahun: 7 tahun untuk pohon kayu putih (eucalyptus) dan 60 tahun untuk jati. Di negeri Inggris terdapat peraturan yang menentukan bahwa dalam tiap tahun luas penanaman pohon itu, minimal harus sama dengan luas penebangan pohon. Peraturan itu penting artinya bagi kelangsungan hidupnya pohon-pohonan di hutan itu. Di Inggris di samping hutan negara terdapat pula hutan-hutan buatan kepunyaan swasta, yang harus pula mengikuti peraturan tersebut.

Menurut peraturan kehutanan pada 1967, di Indonesia hutan itu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Hutan proteksi (hutan lindung), yang mengatur air tanah, mencegah banjir dan erosi, dan melindungi tanah.
2. Hutan produksi, yang menghasilkan hasil hutan bagi bangunan, industri dan ekspor.
3. Hutan cagaralam, untuk melindungi alam.
 - a. Cagaralam untuk tumbuh-tumbuhan untuk ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 - b. Cagaralam untuk hewan ("wild life").

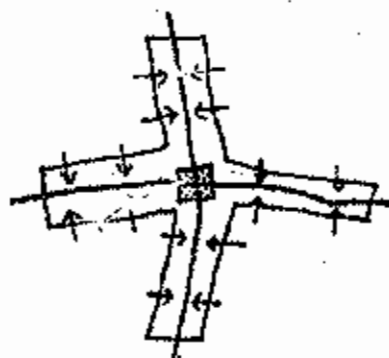
PERKAMPURGAN DI PEDALAMAN

Kampung Memusat (koncentrik)

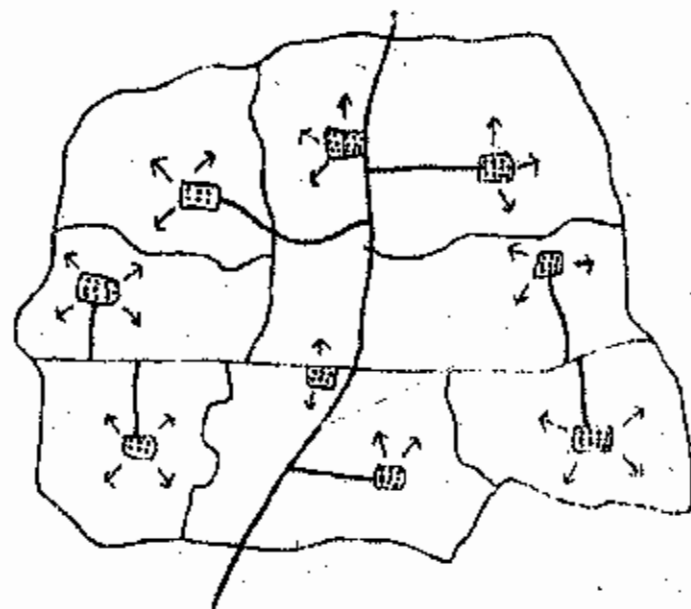
Pemusatan terjadi karena adanya kegiatan fungsional yang tunggal di bagian tengah desa.

Kampung Memanjang (linear)

Memanjang (linear) karena adanya orientasi ke jalan utama dan adanya pusat-pusat kegiatan fungsional yang tersebar sepanjang jaringan jalan utama.

Kampung Berbentuk Pita (ribbon development)

Perkembangan pita terjadi karena adanya orientasi ke jalan utama dan ke kampung-kampung yang lebih besar, lainnya atau ke kota-kota tertentu.

Perkampungan Terpecah (diperse)

Perkembangan desa bermotivasi orientasi ke tempat bekerja di lapangan pertanian (rawah, ladang) dengan maksud agar perjalanan ke tempat bekerja tidak terlalu lama. Pola ini terpecah juga di perkampungan pertambangan, karena kampung-kampung tersatukan oleh beberapa kawasan pertambangan.

c. Penyebaran Penduduk di Pedesaan dan Perkotaan

Indonesia merupakan negara agraris, karena lebih dari separuh penduduk Indonesia hidup dari pertanian. Berhubung dengan itu sebagian besar dari penduduk (+ 83%) bertempat tinggal di pedesaan, hanya sedikit saja (+ 17%) yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan.

Penggunaan tanah bagi matapecaharian di wilayah pedesaan (pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan) dalam tiap satuan usaha dan bagi tiap orang adalah relatif luas, sehingga penduduk di pedesaan adalah jarang. Penggunaan tanah bagi matapecaharian di wilayah perkotaan (jasa, industri) bagi satuan usaha dan bagi tiap orang adalah kecil, sehingga penduduk di perkotaan adalah rapat. Berhubung dengan itu sebagian besar dari luas wilayah tanah air (+ 99%) merupakan pedesaan, hanya sebagian kecil saja (+ 1%) merupakan perkotaan.

Keadaan penyebaran penduduk di Indonesia sebagai negara agraris sangat berlainan dengan keadaan penyebaran penduduk di negara-negara maju yang umumnya merupakan negara-negara industri.

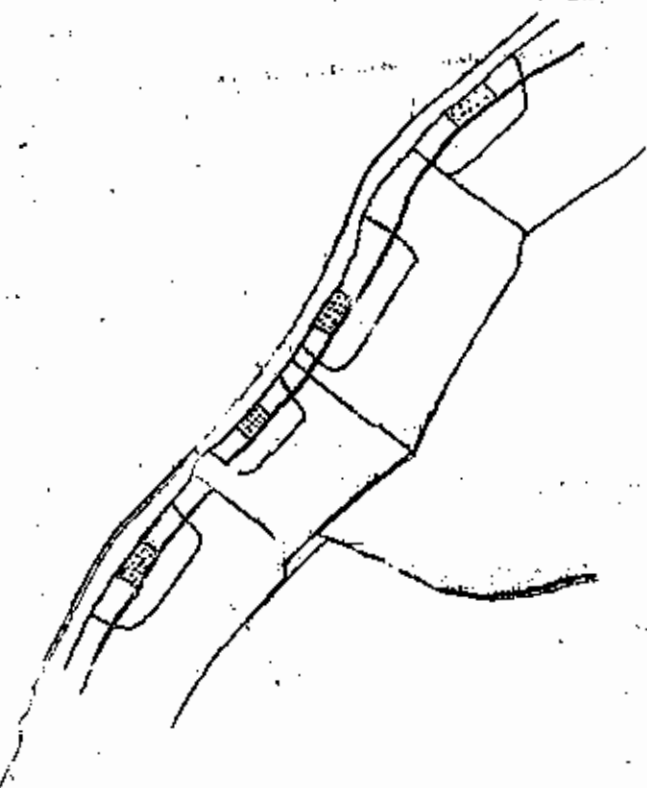
Friedman mengutarakan⁵⁾, bahwa kawasan perkotaan di Amerika Serikat terus meluas dan berkembang dan lebih dari 90% penduduk Amerika Serikat itu bertempat tinggal di dalam kawasan tersebut.

Dapat difahami, bahwa negara-negara industri yang penduduknya sebagian besar (60-90%) tinggal di kota-kota sangat memertingkatkan pengembangan kota dan kurang memperhatikan pengembangan pedesaan, sebab penduduknya hanya sedikit (10-40%).

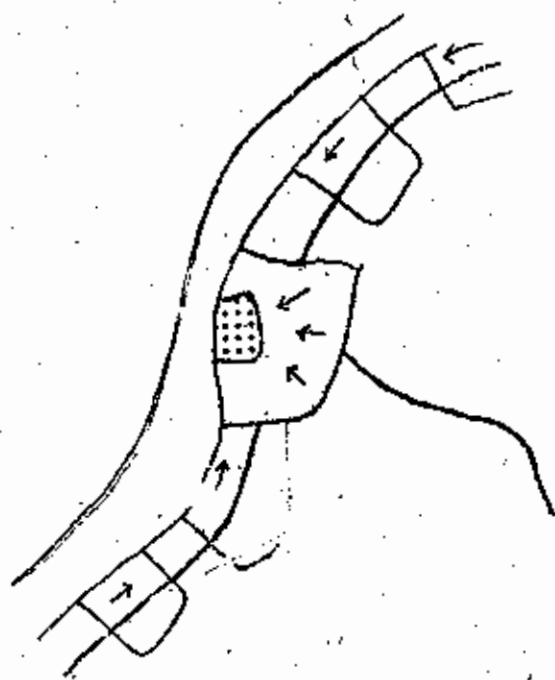
Di Inggris misalnya yang diusahakan di wilayah pedesaan oleh salah satu badan yang melestarikan sumberdaya alam, adalah "menanggulangi pencemaran, menjaga supaya hewan liar tidak punah, mengatur supaya petani berdisiplin dan menyelenggarakan rekreasi bagi penduduk kota. Kebutuhan penduduk pedesaan yang merupakan minoritas, baru diperhatikan sesudah keperluan perkotaan yang merupakan mayoritas, terpenuhi.⁶⁾

Keadaan penyebaran penduduk di negeri Indonesia yang berlainan dari keadaan di negeri industri itu, (yaitu di Indonesia sebagian besar penduduk tersebar di pedesaan), menyebabkan pemerintah Indonesia memberi perhatian pada pembangunan wilayah pedesaan yaitu dengan menitikberatkan pada pembangunan pertanian, walaupun pembangunan industri merupakan hal yang penting.

PERKAMPONGAN SEPANJANG SUNGAI

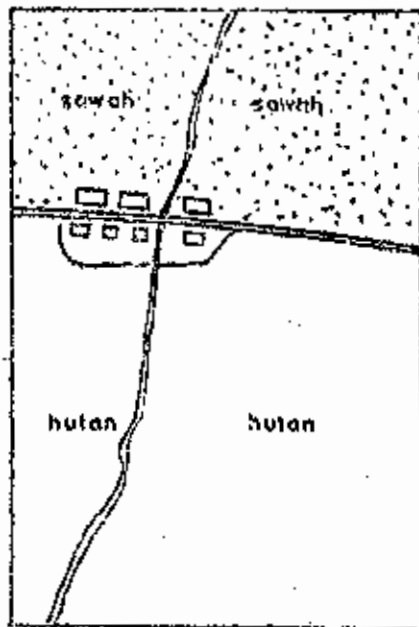
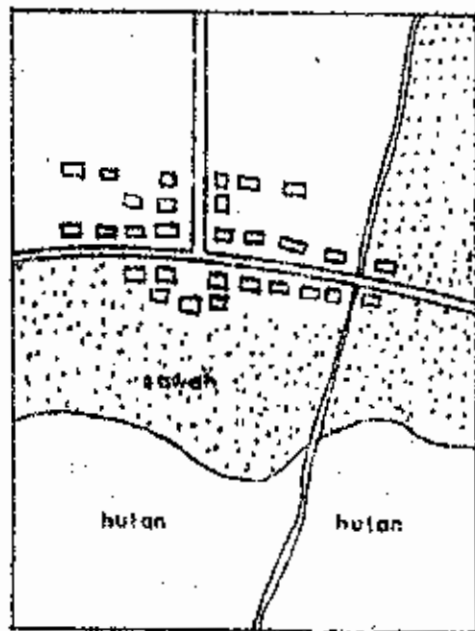
Kampung Memanjang (linear)

Pada desa-desa sungai dimana selain sungai merupakan sarana pergerakan yang utama juga merupakan sumber mata pencaharian maupun sumber kebutuhan hidup sehari-hari (mandi, cuci, masak dan buangan) maka umumnya desa-desa sungai berbentuk memanjang (linear) sepanjang tepi sungai. Orientasi biasanya juga ke arah daratan sebagai tempat tanah garapan pertanian.

Kampung Memusat (konsentrik)

Pada desa-desa sungai yang berfungsi sebagai kota besar memang terdapat sifat memusat. Dalam hal ini kota besar tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi, pasaran/distribusi dan pusat lalu lintas angkutan.

GAMBAR NO. 9

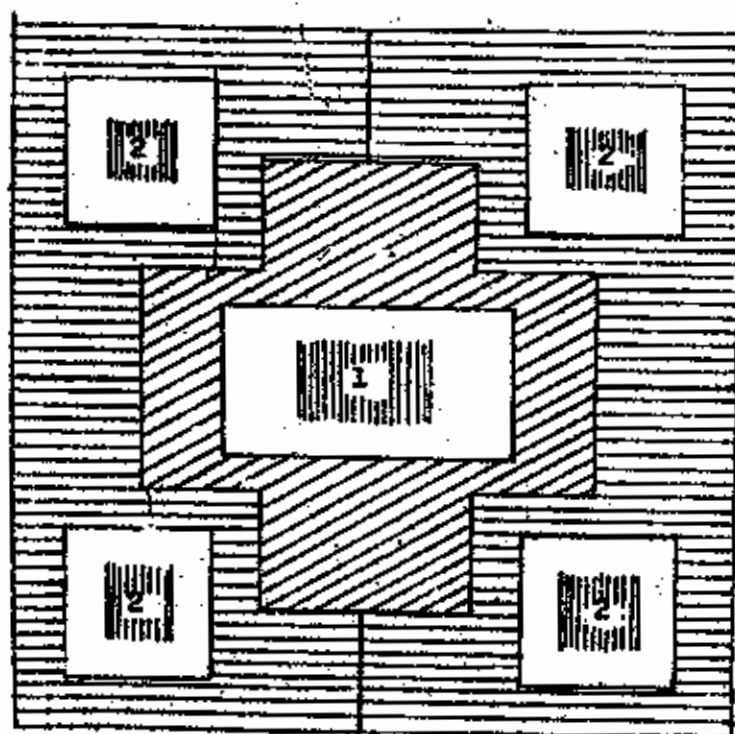
Peta Penggunaan Tanah
10 tahun yang laluPeta Penggunaan Tanah
sekarang

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perorintah Daerah, 1979.

a. Pembagian Kawasan





1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

b. Sata bentuk Pancawilayah



Sumber : Dit Jen Pembangunan Desa, 1976.

Keterangan :

-  Kampung induk
-  Kampung-kampung satelit
-  Tanaman bahan makanan (tanaman musiman dll.)
-  Tanaman keras untuk kampung induk

olahraga, taman, dan sebagainya.

Dengan pengaturan demikian penduduk di kampung itu dapat tinggal berdekatan dengan tetangga, tidak jauh dari tanah pertaniannya, dan dekat ke fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi.

Pada kawasan yang luas, dari beberapa satuan panca wilayah ini dapat dipilih satu satuan panca wilayah (misalnya yang kira-kira letaknya di tengah) untuk tempat prasarana sosial-ekonomi yang diperlukan oleh penduduk dari seluruh kawasan yang luas itu, seperti : pusat kesehatan, kantor pos, bank, pasar yang lebih besar dan mungkin kantor kecamatan.

Sistem Panca Wilayah adalah pengaturan pemukiman untuk ketahanan dan kemudahan penduduk di pedesaan, yaitu bertempat tinggal dekat dengan tetangga, dekat dengan tempat kerja dan dekat ke prasarana sosial-ekonomi.

Di samping itu produksi pertanian atau produksi perkebunan hasilnya lebih terjamin.

Dapat disadari bahwa dalam pertanian/perkebunan itu, fotosintesa terjadi pada tumbuh-tumbuhan yaitu pada daun-daun hijau, mengolah sinar matahari yang jatuh kepada daun-daun itu dan air yang diambil akar tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah itu, serta menghasilkan hidrat-arang yang merupakan : tepung, lemak, gula dan protein. Bahan makanan tersebut digunakan untuk hidup tumbuh-tumbuhan itu dan sisanya disimpan (ditabung) dalam buah (padi, kelapa, mangga) dalam akar (ketela, kacang tanah), dalam batang (tebu), dan sebagainya. Bahan makanan tersebut kemudian digunakan (dimakan) oleh hewan dan manusia.

Jelaslah, bahwa tumbuh-tumbuhan merupakan dasar bagi kehidupan di dunia.

f. Keadaan lingkungan binaan di negara-negara lain.

Keadaan lingkungan pedesaan di Jepang lebih teratur dalam pengelolaan tanah pertanian

Sistem sawah di Jepang adalah sangat efisien karena tiap hektar sawah dilakukan dengan pengerjaan intensif, yaitu dengan penanaman lebih dari dua kali panen ("multi cropping") per tahun, sehingga per hektar dapat memberi makan cukup untuk 22 orang, sedangkan di Amerika Serikat hanya untuk 11 orang dan di India hanya untuk 3 orang.

Harus diketahui bahwa kebutuhan fisik akan energi makanan adalah kira-kira 2.500 Kcalories (menurut FAO minimum : 2.000 Kcalories) per orang per hari. Sejumlah 2.500 Kcal : sama dengan energi makanan dalam 700 gram terigu, beras atau jagung. (Secara kasar : 1 gram karbohidrat memberikan 4 Kcal ; 1 gram protein memberikan 4 Kcal, dan 1 gram lemak/minyak goreng memberikan 9 Kcal). Jadi tiap orang rata-rata memerlukan 250 kg padi-padian (terigu, beras, jagung dan sebagainya) tersebut di atas, dalam satu tahun.

Dengan pengolahan sawah yang efisien seperti di Jepang itu, Indonesia dapat meningkatkan produksi padinya, sehingga ekspor beras dapat dikurangi atau dihilangkan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA

1. Maksud dan Tujuan Pembangunan Desa di Indonesia

Suatu desa¹⁾ meliputi wilayah tertentu dan mempunyai sejumlah penduduk, dengan suatu pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah pemerintahan kecamatan.

Hak otonomi desa yang diakui dalam rangka ketata-negaraan adalah :²⁾

1. Adanya tanah desa
2. Adanya kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa.
3. Adanya adat desa yang ditaati oleh penduduk desa.

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dapat terbagi habis atas sejumlah besar desa dan kelurahan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dan juga setiap subyek dan obyek pembangunan, berlokasi di suatu desa/kelurahan atau di beberapa desa/kelurahan, baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Tidak setiap pembangunan dapat disebut pembangunan pedesaan, walaupun hasilnya dapat secara langsung atau tidak langsung dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Istilah "pembangunan desa" baru dikenal pada 1969, karena dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia pada Februari 1969.

Pembangunan desa itu mengikuti garis besar yang ditentukan dalam Garis Besar Haluan Negara dan dalam Rencana Lima Tahun (Tabel no. 5).

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengandung garis-garis besar daripada Pola Pembangunan Nasional. Menurut GBHN, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. GBHN diperinci dan diimplementasi³⁾ di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Nasional, yang kemudian diperinci lagi di dalam Repelita Propinsi dan Repelita Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembangunan/pengembangan desa ditangani oleh berbagai departemen, dan Departemen Dalam Negeri mempunyai suatu direktorat jenderal yang khusus mengelola pembangunan desa.

Pada hakekatnya pembangunan pedesaan mengikuti prinsip-prinsip "community development" yang telah diprakarsai oleh berbagai badan Perseri-

2. Dalam identifikasi, diperlukan beberapa indikator.

Indikator atau penunjuk itu antara lain :

1. alam (tanah, air, iklim, topografi),
2. letak desa (situasi dan posisi),
3. manusia,
4. mata pencaharian,
5. hasil produksi,
6. adat istiadat
7. kelembagaan desa,
8. pendidikan,
9. swadaya gotong royong,
10. prasarana,
11. administrasi

Dari hasil analisa keadaan desa diperoleh petunjuk tentang :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi
- b. Potensi-potensi yang dapat dikembangkan guna mengatasi masalah-masalah tersebut.
- c. Tingkat kehidupan atau perkembangan desa yang bersangkutan.

Secara hypothetis desa-desa dapat diidentifikasi di dalam tiga tingkat (kelas, tipe) : 1. tingkat swadaya, 2. tingkat swakarya, 3. tingkat swasembada, berturut-turut dari yang belum maju, bentuk antara, dan yang sudah maju. Di beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat pradesa, yaitu suatu kesatuan yang batas wilayahnya belum jelas/tepat dan penduduknya belum menetap.

Bagi desa swadaya, tujuan antara ialah tingkat swakarya, dan bagi desa swakarya, tujuannya adalah mencapai tingkat swasembada.

Uraian-uraian tentang tipe-tipe desa berdasarkan tingkat-tingkat pertumbuhan tersebut, disebut tipologi desa. Tingkat-tingkat desa swadaya-swakarya-swasembada itu ukurannya tergantung kepada kabupaten masing-masing

3. Wilayah Pengembangan di Indonesia

Pada tingkat teknologi sederhana (desa swadaya) tiap desa dapat menyelenggarakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tingkat desa ditingkatkan, dan hal itu memerlukan peningkatan teknologi, dari yang sederhana menjadi agak maju. Peningkatan teknologi menuntut perluasan wilayah pelayanan, sehingga tidak melibatkan satu desa saja, melainkan beberapa desa.

Masing-masing desa tidak lagi berdiri sendiri dalam melakukan perencanaan, tetapi bersama-sama; wilayah yang lebih luas itu memberi kemungkinan dan keuntungan bagi peningkatan teknologi.

Dengan perluasan wilayah perencanaan, dan peningkatan teknologi, desa menjadi terbuka bagi usaha-usaha pengembangan lebih lanjut, dan demikian seterusnya.

Desa swasembada
(Maju/berkembang)

Setingkat lebih maju dari desa swakarya, adat istiadat tidak rombak, hubungan antara warga rasional, mata pencaharian bervariasi ke sekitar ter-sior, teknologi baru dimanfaatkan untuk usaha pertanian/kerajinan dan industri pedesaan, produktivitas tinggi, diim-bangi kebutuhan prasarana dan sarana yang cukup dan memadai.

- a. Mata pencaharian penduduk meningkat ke sektor tersier (E₃).
- b. Out-put/Produksi desa meningkat (> Rp. 100 juta/TH) (Y₃).
- c. Adat istiadat dan sikap masyarakat yang tidak mengikat dan mendukung program-program pembangunan (A₃).
- d. Lembaga - lembaga desa efektif dan efisien, kordinasi berjalan sebaik-baiknya (L₃).
- e. Tingkat pendidikan sudah tinggi (> 60% penduduk lulus SD) (PD₃).
- f. Swadaya dan gotong royong masyarakat tampak nyata (GR₃).
- g. Prasarana desa cukup dan memadai (P₃). Hubungan lancar antara desa dengan kota.

TH. 1973/1974 : 3%
TH. 1974/1975 : 4,5%
TH. 1975/1976 : 6,4%
TH. 1976/1977 : 8,5%
TH. 1977/1978 : 10,5%

- h. Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- i. Masyarakat desa harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- j. Dapat memanfaatkan potensi desa secara rasional dan optimal, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam.
- k. Dilakukan dengan melalui tahap-tahap desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada dengan pelaksanaan secara komprehensif (menyeluruh) dan koordinatif.

Langkah pertama ialah mengidentifikasikan (mengenal, memahami) keadaan desa. Untuk dapat melakukan identifikasi, maka diperlukan beberapa indikator atau petunjuk, antara lain :

1. alam (topografi, iklim, dan sebagainya).
2. manusia (keadaan penduduk dan kebudayaan termasuk keadaan sosial - ekonomi).

Dari hasil analisa keadaan desa diperoleh petunjuk tentang :

1. Masalah yang dihadapi
2. Potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan
3. Perkembangan desa yang bersangkutan.

5. Kabupaten sebagai Unit Daerah Perencanaan Pembangunan

Daerah Tk. II (Kabupaten) pada dasarnya dapat dianggap sebagai satuan wilayah pembangunan desa, yang disebut Unit Daerah Perencanaan Pembangunan Desa (UDEPPD), dengan pertimbangan-pertimbangan :⁸⁾

1. Daerah Tk. II adalah Daerah Otonom terendah yang mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan lengkap :
 - a. Eksekutif
 - b. Legislatif
 - c. Yudikatif (sungguhpun bukan unsur Pemerintahan Daerah)
 - d. Aparat pengawasan
 - e. Aparat perencanaan (misalnya Badan Perencana Pembangunan Kabupaten).
2. Daerah Tk. II memiliki sumber-sumber pembiayaan resmi (formal), misalnya IPEDA.

6. Sebagai kepala wilayah, camat memegang wewenang kebijaksanaan politik polisional pemerintah sipil di dalam wilayahnya.

7. Dan sebagainya.

Ibukota kecamatan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan, dan dengan demikian dapat mengikat desa-desa dalam wilayahnya dalam suatu ekosistem.

Wilayah kecamatan yang hendak dijadikan prioritas UDKPD perlu memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Mewakili tipologi kecamatan yang ada di dalam kabupaten yang bersangkutan, misalnya :
 - a. Kecamatan pantai.
 - b. Kecamatan perbatasan.
 - c. Kecamatan (yang tanahnya atau wilayahnya) kritis.
 - d. Kecamatan (yang masyarakatnya) rawan.
 - e. Kecamatan dalam kota.
 - f. Kecamatan biasa.
2. Letaknya strategis, baik terhadap pusat pertumbuhan yang lebih besar, maupun terhadap kecamatan sekitarnya.
3. Dan sebagainya.

b. Wewenang dan tugas camat dalam pembangunan desa dan UDKP

Wewenang camat di bidang pemerintahan, adalah bertanggung jawab atas maju mundurnya wilayah kecamatan, pada prinsipnya melakukan segala wewenang, (kecuali 4 hal, yaitu : bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri, dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, dan menentukan nilai mata uang).

Kecamatan berperan sebagai saluran untuk bertindak yaitu pemerintahan yang merupakan unit yang terendah, di mana unsur teknis pelaksana relatif lengkap dan juga sebagai pemerintahan yang letaknya dekat atau berhadapan langsung dengan desa.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 1973, maka tugas dan tanggung jawab Pembangunan Desa pada tingkat kecamatan ialah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan

4. Desa adalah sumber tangan pertama daripada data tentang keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian yang perlu diadministrasikan oleh kantor desa sebagai satuan administrasi yang terkecil dan terendah.

b. Peranan Kepala Desa.

Kepala desa dalam desa itu adalah sebagai "central authority" yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap berhasilnya pembangunan desa, karena kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang paling menguasai lapangan.

Kepala desa itu dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan desa bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan di desanya. Kepala desa dalam pembangunan desa mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. Kepala desa sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
2. Kepala desa yang bertanggung jawab atas data-data pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan desa.
3. Kepala desa melakukan titik pangkal administrasi bantuan desa antara lain menyusun laporan di samping menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
4. Kepala desa yang bertanggung jawab dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian operasional pembangunan desa, baik di pusat maupun di daerah sampai dengan tingkat kecamatan, dilakukan dengan Sektor Khusus (K) Pembangunan Desa, berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1969, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 1969.

8. Bidang Pengembangan di Indonesia

Dengan uraian di atas jelaslah, bahwa baik UDPPD, UDKPD, dan UDAPD, bukan suatu organisasi baru, melainkan suatu sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, dan sistem pengadministrasian pembangunan desa, dimana kegiatan pembangunan sektoral, kegiatan daerah dan kegiatan masyarakat, diarahkan, dibimbing, dan digairahkan di bawah koordinasi dan pimpinan kepala wilayah/daerah tingkat-II, camat, dan kepala desa yang bersangkutan, dalam berbagai bidang.

Berdasarkan GBHN dalam Repelita IV di Indonesia, pembangunan pertanian¹⁰⁾ dalam arti luas terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan bahan makanan dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kegiatan transmigrasi. Dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan, produksi beras dalam 1984, mencapai 25 juta ton, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras.

b. Bidang sosial yang dikembangkan, ialah :

1. Sektor kependudukan, yang mempunyai kebijaksanaan : mengatur / mengendalikan penyebaran penduduk; mengendalikan pertumbuhan pen-

TABEL NO.7

DISTRIBUSI MATAPENCARHARIAN 1961, 1971 DAN 1976
(DALAM %)

Matapencarharian	Sept. 1961	Sept. 1971	Sept. - Des. 1976
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	73.4	65.9	61.8
Pertambangan	0,3	0.2	0.2
Industri	5.8	7.8	8.4
Konstruksi	1.3	2.0	1.7
Listrik, Gas, Air	0.2	0.1	0.1
Perdagangan, Keuangan, Asuransi	6.8	11.2	14.5
Pengangkutan, Penggudangan, Per- hubungan	2.1	2.4	2.7
J a s a	9.6	10.4	10.6
J u m l a h	100.0	100.0	100.0

Sumber : A World Bank Country Study, 1980.

c. Bidang fisik dan prasarana.

1. Yang termasuk bagian fisik (alam) adalah : daratan, lautan dan angkasa, beserta isinya, seperti : tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang, air, udara, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan energi tidak dapat dilepaskan dari pemilihan jenis teknologi. Di Indonesia umumnya digunakan teknologi madya.

Kriteria dari teknologi madya adalah :

- a. Biaya investasi yang rendah
 - b. Menggunakan bahan-bahan setempat jika mungkin.
 - c. Menciptakan kesempatan kerja, menggunakan keahlian dan tenaga setempat.
 - d. Mempunyai skala yang kecil sehingga terjangkau oleh kelompok kecil warga desa.
 - e. Mudah dimengerti
 - f. Dapat dibuat oleh tukang (misalnya pandai besi) setempat
 - g. Keputusan secara kolektif lebih mudah diciptakan
 - h. Meliputi pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui
 - i. Mudah ditiru dan disempurnakan
 - j. Tidak memerlukan hak cipta, royaltis, honorarium konsultan, dan sebagainya.
2. Yang termasuk prasarana, terjadi dari prasarana ekonomi (sawah, kolam, pabrik, irigasi, jalan, pasar, toko, sentral listrik, dan sebagainya) dan prasarana sosial (jalan, rumah, gedung sekolah, gedung rumah sakit, sentral listrik, kawat telepon, riol, dan sebagainya). Prasarana itu dapat dibagi juga menjadi prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana sosial, prasarana pemasaran dan prasarana umum atau prasarana pemerintahan.
- Pengembangan bidang fisik dan prasarana bertujuan : memelihara keseimbangan antara usaha-usaha pemenuhan kebutuhan hidup dengan pemanfaatan sumber-sumber alam, sehingga lingkungan alam dapat terpelihara; mencegah/menanggulangi terganggunya keseimbangan karena : usaha-usaha penggalan yang kurang bijaksana, pencemaran lingkungan, bencana alam, kecerobohan manusia, tata guna ta-

- b. Kebijaksanaan dalam mengembangkan pemerintahan di daerah tingkat-II, di kecamatan, dan di desa, yang mampu berperanan positif guna mengarahkan, mengawasi, dan mempercepat pembangunan desa.
- c. Usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah :
1. Tugas pokok dan fungsi pemerintah di daerah (Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah), tugas pokok dan fungsi pemerintah desa.
 2. Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa tradisional adalah pengaturan dan pengurusan rumahtangga desa, yang disebut otonomi desa, dan sejak Indonesia merdeka, tugas-tugas pemerintah desa bertambah, sebab tugas ekonomi desa, dibebani tugas dekonsentratif (yaitu tugas pemerintah atasan, yang demi efisiensi didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah desa) dan juga tugas-tugas yang bersifat bantuan.
 3. Pengaturan dan pengarahan pertumbuhan dan perkembangan desa yang oleh kondisi-kondisi tertentu statusnya bergeser dari desa yang berotonomi desa ke desa administratif, dan yang masih tetap diakui sebagai desa yang berotonomi desa.
 4. Pengaturan dan pengarahan pertumbuhan desa yang diakui berotonomi desa sangat penting, mengingat pertimbangan-pertimbangan tertentu.
 5. Untuk mampu berotonomi desa, setiap desa perlu memenuhi persyaratan tertentu, sebagai modal pokok atau landasan pengembangannya.

9. Cara-Cara Pembangunan Desa

Dalam pembangunan diusahakan peningkatan kemajuan ("progress") supaya kesejahteraan penduduk meningkat. Harus diusahakan supaya pembangunan dan kemajuan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif pada lingkungan, yang kemudian akan merugikan penduduk. Glikson¹²⁾ mengemukakan bahwa kadang-kadang orang berpendapat bahwa tanah adalah alat untuk mendapat keuntungan secepat mungkin. Orang yang mempunyai sikap demikian akan berusaha untuk mencapai tujuannya itu dengan berbagai cara, sehingga dalam jangka waktu tertentu ia mendapat keuntungan yang besar. Ia mungkin akan bangga atas hasil yang dapat dicapainya : Hasil pertanian meningkat, mungkin akibat bantuan mesin-mesin pertanian dan pupuk

terampilan, sehingga dapat berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Harus disadari, bahwa pada dewasa ini orang-orang desa, yang menyediakan makanan dan serat bahan pakaian bagi seluruh penduduk mendapat keuntungan paling sedikit.

Lapisan elite akan merasa lebih puas, kalau dapat memberi imbalan yang lebih baik kepada para petani itu.

Dalam hubungan itu untuk para elite dapat disarankan supaya: ¹⁴⁾ 1. Para politisi dapat menyatukan rakyat dan memecahkan masalah-masalah mereka. 2. Para birokrat dapat bekerja untuk mencapai hasil yang baik. 3. Para akademisi dan para pendidik dapat terus belajar supaya dapat mengajar masyarakat dengan baik. 4. Para pengusaha dapat memproduksi barang dan mendapatkan keuntungan yang halal dan tidak berspekulasi dan bermanipulasi. 5. Para pengelola dan teknokrat dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya bagi keuntungan sendiri.

10. Standar Jumlah dan Penyebaran Prasarana Sosial Ekonomi di Indonesia

Baik pembangunan sosial maupun ekonomi serta pembangunan fisik dan pemerintahan memerlukan fasilitas dengan prasarana tertentu.

Sebagai contoh diberikan standar bagi prasarana sosial ekonomi ¹⁵⁾ :

a. Tempat ibadah :

1. ditaksir 10% dari penduduk menghadiri peribadatan.
2. satu langgar atau musholla untuk 50 - 500 penduduk.
3. satu mesjid untuk 250 - 2.500 jiwa

b. Pendidikan :

1. satu SD untuk 1.500 penduduk.
2. satu ruang untuk 40 murid SD.
3. satu ruang untuk 20 atau 25 murid TK
4. seorang guru untuk satu ruang kelas TK atau SD.
5. untuk 5 - 7 SD diperlukan satu sekolah menengah umum dan satu sekolah lanjutan kejuruan.

c. Kesehatan :

1. untuk satu desa atau 2.500 jiwa: satu pos keluarga berencana (K.B)
2. untuk satu kecamatan atau 5.000 - 15.000 jiwa; satu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

atif dari kalangan masyarakat sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh instansi pemerintah.

d. Usaha LKMD ialah :

1. Mengusahakan perubahan yang terarah bagi desa dan masyarakat desa dalam kemajuan material maupun spiritual.
2. Meningkatkan perkembangan desa dan masyarakat desa sebagai satuan potensi ekonomi dari desa swadaya, ke desa swakarya menuju desa swasembada.
3. Mengusahakan peningkatan di bidang ketrampilan, bagi tenaga-tenaga pelaksana pembangunan masyarakat desa.
4. Mengusahakan pemupukan dana dan modal untuk usaha-usaha pembangunan masyarakat desa.

e. Pembiayaan LKMD pada prinsipnya didasarkan atas swadaya masyarakat desa dan di samping itu memungkinkan juga diterimanya bantuan yang syah dan tidak mengikat.

12. Kelembagaan yang Terdapat di Desa, di Indonesia

1. Rembug Desa (desa swadaya, swakarya, dan swasembada).
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (desa swadaya, swakarya dan swasembada).
3. Rukun Tetangga, Rukun Kampung - RT/RW (desa swadaya, swakarya dan swasembada).
4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada).
5. Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan desa swasembada).
6. Koperasi Unit Desa - KUD/BUUD, dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada).
7. Majelis Ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada).
8. Perkumpulan Kematian (desa swasembada).
9. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (desa swasembada).
10. Lembaga Sosial Kampung - LSK, dan sebagainya (swasembada).

13. Biaya Pelaksanaan

1. Bantuan Pemerintah, untuk biaya pembangunan :
 - a. Bantuan Daerah Tingkat II melalui APBD.

- b. Bantuan langsung melalui Subsidi Desa.
 - c. Bantuan keserasian, yang disalurkan melalui kecamatan.
2. Dari masyarakat : pemungutan dan iuran.
- Yang ditetapkan secara musyawarah, untuk biaya pembangunan.
3. Pendapatan desa sendiri (asli dari desa) untuk biaya rutin.
- a. Hasil dari tanah-tanah desa (titisara, dan sebagainya).
 - b. Hasil perusahaan desa (pasar desa, koperasi desa, pangkalan desa dan sebagainya).
 - c. Tenaga kerja (manusia dan hewan) di desa dan substitusinya.
 - d. Bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dihitung dengan uang.
 - e. Pungutan-pungutan resmi yang svah.

Dilihat secara garis besar, dalam pelaksanaan pembangunan wilayah pedesaan di negara berkembang sering terdapat tiga pihak : 1. penduduk wilayah pedesaan, 2. pemerintahan, 3. badan dari luar, mungkin badan besar (misalnya F.A.O) atau kecil (misalnya suatu badan swasta tertentu dari negara asing). Untuk mensukseskan pengembangan desa tersebut harus terdapat kerjasama antara pemerintah setempat dan badan internasional dari luar yang membantu itu. Seringkali pemerintah setempat itu menganggap badan internasional itu hanya sebagai sumber keuangan, dan kadang-kadang badan internasional tertentu beranggapan bahwa pemerintah setempat itu kurang serius dalam menangani kesejahteraan penduduk pedesaan itu, dan hanya berminat pada pengaliran uang ke dalam negerinya saja. Karena telah lama menderita kemiskinan dalam hal seperti itu penduduk desa melihat kedua badan yang membantu mereka itu (pemerintahnya sendiri dan badan internasional itu) kadang-kadang dengan harap-harap cemas, dan mungkin pula dengan acuh tak acuh. Keadaan seperti ini, seyogyanya diperbaiki.

4.3. Berbagai masalah pedesaan dan pemecahannya

Dalam pembangunan/pengembangan pedesaan terdapat berbagai masalah baik dalam hubungan dengan sumberdaya alam maupun dalam hubungan dengan sumberdaya manusia. Baik masalah yang berhubungan dengan sumberdaya alam maupun masalah yang berhubungan dengan sumberdaya manusia mungkin dapat dihubungkan dengan modal, teknologi, pendidikan, penyuluhan dan lain sebagainya. Penduduk pedesaan umumnya lebih miskin daripada penduduk perkotaan. (Tabel no. 8).

Sejumlah dua per tiga penduduk dunia hidup di wilayah pedesaan.

Sejumlah 40 % dari penduduk wilayah pedesaan hidup dalam kemiskinan mutlak

Yang penting dalam pembangunan pedesaan itu adalah penduduk pedesaan yang merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam pembangunan desa itu penduduk desa harus diusahakan supaya dapat berpartisipasi dalam pembangunan, supaya dapat mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Kalau kurang diikuti sertakan, penduduk pedesaan itu sering seperti tidak acuh, karena kurang menyadari bahwa pembangunan desa itu dilakukan untuk kepentingan mereka itu.

Mengenai gambaran penduduk pedesaan di Amerika Serikat, Peet¹⁷⁾ berpendapat bahwa penduduk pedesaan hidup dalam dunia tertutup dengan cita tradisional sebagai warisan nenek moyang, dan dengan sedikit masukan dari luar. Penduduk pedesaan itu menggunakan sebagian besar dari waktunya dalam keluarga dan interaksi kegiatan terjadi antara para anggota kerabat. Penduduk pedesaan digambarkan dengan : kurang materialistis, kurang agresif dalam mengejar tujuan, lebih memperhatikan hubungan pribadi, kurang mengabdikan perjalanan dan kurang yakin akan nilai pendidikan formal, dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal-hal terakhir mungkin dapat ditanggulangi dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Dalam pelayanan fasilitas sosial-ekonomi, terdapat masalah, karena penduduk pedesaan kalah jika bersaing dengan penduduk perkotaan, karena sekolah tinggi yang besar, rumahsakit lengkap yang besar, dan lain sebagainya, memerlukan jumlah penduduk tertentu sebagai ambang,¹⁸⁾ sehingga tidak terdapat di wilayah pedesaan. Pengadaan macam fasilitas sosial-ekonomi itu ditentukan oleh peraturan ekonomi, dan peraturan ekonomi itu menentukan urutan prioritas.

Konsentrasi penduduk di kota mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan penduduk pedesaan yang tersebar.

Masalah ekonomi di pedesaan itu terdapat juga di negara-negara industri, walaupun penyebab dan keadaan serta luas masalah itu berlainan. Di Amerika Serikat misalnya terdapat juga berbagai masalah di wilayah pedesaan itu. Peet¹⁹⁾ menceritakan bahwa perkembangan ekonomi kapitalis di Amerika Serikat menghasilkan suatu kekayaan akan kebendaan yang berlebihan, tetapi di samping itu menyebabkan terjadinya ketidak-samaan dalam kemakmuran seperti ketidak-samaan antara penduduk yang tinggal di berbagai wilayah dan khususnya ketidak-samaan antara penduduk pedesaan dan perkotaan.

(1984-1989) walaupun pertanian tetap merupakan bidang yang penting, akan diadakan perluasan dalam program industri. Kampung-kampung di pedesaan dapat menunjang program pembangunan ini dengan memperluas industri kecil. Dalam pembangunan, pedesaan harus menunjang perencanaan pengembangan wilayah/daerah secara umum, dengan berpartisipasi dalam program-program pengembangan wilayah yakni program-program pembangunan dalam: pertanian, industri, pertambangan dan pariwisata.

Prioritas pembangunan daerah pada dewasa ini adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja di sektor non pertanian di pedesaan.
2. Peningkatan kemampuan profesional aparat pelaksana dan pengawas.
3. Pengembangan Koperasi di pedesaan.
4. Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam pertanian sebetulnya tanah di luar Jawa masih dapat dikembangkan bagi keperluan pertanian, sebab tanah di seluruh Indonesia yang digunakan bagi pertanian itu baru sedikit, yaitu pada 1973 baru 16 juta hektar dari luas wilayah nasional sebesar + 200 juta hektar. (Tabel no. 9 dan no. 10). Beberapa program yang bersifat pedesaan yang mengembangkan tanah untuk pertanian dan membangun perkampungan yang baru adalah program: pemukiman kembali, perkebunan inti - rakyat (PIR), transmigrasi.

- a. Program pemukiman kembali ("resettlement") dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri yang mengatur tempat tinggal dalam kampung yang terpusat. beserta tanah pertanian untuk penduduk pedalaman di luar Jawa yang tinggalnya masih tersebar dan masih melakukan perladangan liar.
- b. Program perkebunan inti-rakyat (PIR) dilakukan oleh Departemen Pertanian yang mengatur supaya penduduk mengusahakan perkebunan (yang masing-masing luasnya kecil), yang pemasaran dan pengolahan hasilnya digabung dengan perkebunan inti (perkebunan besar). Perkebunan rakyat yang masing-masing luasnya kecil itu, dikelola seperti perkebunan besar dengan digabung dalam suatu badan koperasi.
- c. Program transmigrasi dilakukan oleh Departemen Transmigrasi, yang mengusahakan memindahkan dan memukiman kembali penduduk dari wilayah yang rapat penduduknya (Jawa dan Bali), wilayah yang ditimpa bencana alam (misalnya pada 1982 dari wilayah Jawa Barat yang ditimpa bencana letusan G. Galunggung), wilayah tandus dan kritis (wilayah pegunungan kapur dan wilayah erosi - kritis), dan wilayah yang terkena proyek pem-

bangunan (misalnya pada 1979 pembuatan dam di Wonosari Jawa Tengah), ke wilayah-wilayah di luar Jawa yang masih jarang penduduknya dan yang memerlukan tenaga manusia bagi pembangunan wilayah-wilayah tersebut seperti: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan lain sebagainya.

(Sugeng, 1980: 3)

Dalam program transmigrasi diusahakan supaya penduduk pendatang dan penduduk asli dapat berintegrasi dengan jalan akulturasi dan asimilasi. Kondisi yang mendorong atau menghalangi akulturasi menurut Taft dan Robbins⁽²¹⁾ adalah :

- a. Migran yang muda lebih mudah menerima nilai-nilai baru dan cepat menyesuaikan diri. Laki-laki dapat bertemu dengan penduduk asli umumnya dalam pekerjaan, dan perempuan di dalam lingkungan tempat tinggal, seperti dalam peribadatan, dan sebagainya.
- b. Makin besar kelompok migran, makin kurang lajunya kecepatan asimilasi.
Laju yang kurang cepat itu masih menjamin adanya asimilasi.
- c. Pertumbuhan jumlah migran yang terlalu cepat menghawatirkan penduduk penerima.
- d. Pemukiman di wilayah pedesaan merupakan isolasi yang lebih besar untuk asimilasi daripada dalam pemukiman di wilayah perkotaan.
- e. Isolasi yang disebabkan oleh suku yang berkelompok tidak menghalangi asimilasi, dan dalam hal demikian, terjadi asimilasi secara kelompok.
- f. Beberapa keadaan ekonomi dan budaya mendorong atau menghalangi asimilasi. Petani-petani yang pendidikannya rendah lebih sukar untuk berasimilasi.
- g. Kemajuan relatif dalam perekonomian merupakan hal yang memuaskan.
- h. Persaingan antara pendatang dan penduduk asli merupakan penghalang.
- i. Mudahnya kemungkinan untuk kembali ke tempat pendatang menyukarkan akulturasi.
- j. Kesamaan dalam nilai kebudayaan pendatang dan asli mendorong asimilasi.
- k. Kesamaan tingkat kebudayaan mendorong akulturasi.
- l. Penggunaan nilai-nilai kebudayaan yang hampir sama memudahkan penyebaran nilai-nilai itu.

penduduk tersebut yang melibatkan sikap, nilai dan harapan masing-masing individu atau kelompok penduduk. Hal itu akan menghasilkan proses saling mempengaruhi dengan adanya perubahan sikap, tindakan dan sistem nilai sehingga akhirnya akan timbul penyesuaian dari sikap dan tindakan masing-masing individu. Perubahan tata kelakuan penduduk dapat tampak dalam perubahan unsur-unsur kebudayaan penduduk, sebagai proses interaksi sosial penduduk tersebut. Dengan adanya proses-proses sosial penduduk, sebagai interaksi sosial yang berlangsung di antara penduduk, akhirnya dapat terbentuk kesatuan sosial penduduk.

Keadaan sosial yang baik dari penduduk akan menjadi pendorong bagi kelancaran dalam pengolahan tanah yang baru khususnya, dalam seluruh pembangunan umumnya.

Dengan program transmigrasi itu pemerintah Indonesia telah memindahkan dan memukimkan kembali penduduk di berbagai pulau di luar Jawa, dalam Pelita I sebanyak \pm 46 ribu keluarga, dalam Pelita II sebanyak \pm 80 ribu keluarga dan dalam Pelita III sejumlah 500 ribu keluarga.

Menurut rencana dalam Repelita IV akan dipindahkan 750 ribu keluarga. Yang harus diperhatikan baik dalam pembuatan pemukiman baru maupun di wilayah yang telah berkembang, adalah adanya hutan lindung bagi pelestarian lingkungan alam. Telah dikenal pembagian penjaluran menjadi tiga jalur: 1. Jalur Preservasi, yaitu di mana hutan diserahkan kepada perkembangan secara alamiah (tidak diganggu-gugat manusia) walaupun dengan pengawasan; 2. Jalur Konservasi, di mana penggunaan tanah dilakukan secara hati-hati (yaitu di wilayah pedesaan dalam pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya) sehingga tiap satuan luas tanah hanya digunakan oleh manusia dalam jumlah yang sedikit saja. 3. Jalur Pembangunan, di mana penggunaan tanah dilakukan secara intensif sekali (yaitu di wilayah perkotaan), sehingga tiap satuan luas tanah dapat digunakan oleh manusia dalam jumlah yang banyak. Semua jalur tersebut harus terpelihara secara baik, supaya dapat terus digunakan baik sekarang, maupun oleh generasi selanjutnya.

Ordway²²⁾ mengemukakan, bahwa keinginan untuk mengkonservasi itu akan timbul dari dorongan yang lebih kuat dan lebih baik dari pada bahaya, yaitu dari rasa cinta dan sayang terhadap sumber daya alam itu dan keinginan keras untuk mewariskan benda yang kita sayangi itu kepada masa depan, yaitu kepada generasi selanjutnya.

- c. Kualitas estetis/menarik : kualitas pemandangan indah, kualitas untuk bertualang di alam bebas, kualitas ruang terbuka, ciri fisis (bumi) yang unik, taman, suaka alam, jenis (tumbuhan atau hewan) dan ekosistem unik/langka, objek dan tempat bersejarah atau arkeologis, kemungkinan bencana.
- d. Status Budaya : pola budaya (gaya hidup), kesehatan dan keselamatan, lapangan kerja, kepadatan penduduk.
- e. Kegiatan dan Fasilitas Konstruksi : berbagai struktur bangunan, jaringan transportasi, jaringan utilitas, pembuangan sampah.

D. Hubungan Ekologis

- a. Salinisasi sumberdaya air,
- b. Eutrofikasi,
- c. Vektor penyakit yang disebabkan oleh serangga.
- d. Rantai makanan
- e. Salinisasi materi permukaan
- f. Pertumbuhan semak belukar
- g. Dan lain-lain.

Dampak yang kurang baik bagi lingkungan hidup itu harus diusahakan untuk diperbaiki. Studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan putusan, disebut analisis Dampak Lingkungan (Andal). Dengan adanya suatu gambaran yang menyeluruh mengenai lingkungan itu maka analisa dampak lingkungan dampak dilakukan dengan mudah. Andal itu digunakan dalam studi kelayakan suatu rencana pembangunan yang baru. Setelah diadakan analisa dampak lingkungan itu dapat diambil keputusan apakah rencana itu dapat dilaksanakan atau tidak.

Studi semacam itu untuk suatu pembangunan yang sudah dilakukan, disebut: Studi Evaluasi Lingkungan.

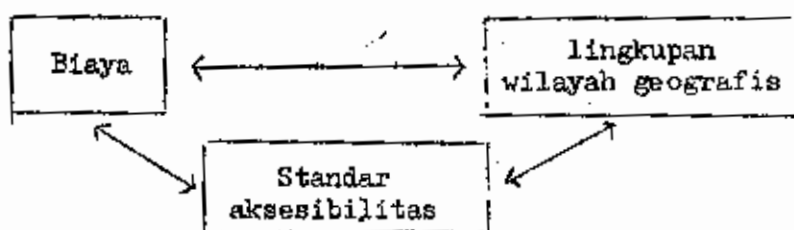
Plowden²⁹⁾ mengemukakan bahwa, banyaknya perjalanan, arah perjalanan, waktu perjalanan dan sifat perjalanan, semuanya dipengaruhi oleh penyediaan pelayanan pengangkutan/transportasi, kualitas dan harga pelayanan pengangkutan, dan juga oleh lokasi pelayanan transportasi serta maksud pelayanan pengangkutan yang menyelenggarakan berbagai macam perjalanan.

Model transportasi yang konvensional dibuat berdasarkan penggunaan yang nyata dari transportasi itu, sebagai kenyataan dari permintaan akan adanya transportasi itu.

Pusat perhatian dalam suatu model pengangkutan yang konvensional (yang biasanya untuk di kota) adalah mengenai kualitas sistem pengangkutan (pengaturan supaya aman dan nyaman, waktu tunggu, waktu perjalanan dan ongkos perjalanan, dan sebagainya).

Dalam pengangkutan di pedesaan hal-hal seperti di atas itu kurang penting, seperti di atas itu kurang penting yang penting adalah : apakah perjalanan tertentu dapat dilakukan? Jadi pusat perhatian di wilayah pedesaan adalah pada : adanya pelayanan pengangkutan, arah pelayanan, dan waktu serta frekuensi pelayanan pengangkutan, ongkos, dan sebagainya.

Dalam perencanaan sistem aksesibilitas di pedesaan, menurut Mosely dan rekan³⁰⁾ terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi : 1. biaya, 2. standar (tingkat) aksesibilitas dan 3. lingkup wilayah geografis.



Jika suatu sistem pelayanan pengangkutan layak dilaksanakan, untuk biaya tertentu dapat diadakan tingkat pelayanan tertentu untuk wilayah kecil. Kalau pembiayaan itu diperbesar maka akan dicapai tingkat/standar pelayanan yang lebih tinggi untuk wilayah yang lebih luas.

Dalam suatu wilayah jika terjadi peningkatan produksi dan kegiatan konsumsi akan berakibat peningkatan koleksi dan distribusi. Kegiatan tersebut menyebabkan interaksi antar wilayah (dengan anggapan bahwa surplus produksi suatu wilayah akan dipasarkan di luar wilayah) dan harus di didatangkan

Dapat juga digunakan kendaraan yang hanya setengah ruangnya disediakan untuk orang, dan setengah ruangan lagi adalah untuk barang.

Sering pemerintah mengadakan usaha untuk meningkatkan dayacapai suatu wilayah pedesaan, yaitu supaya penduduknya dalam berbagai keadaan dapat menjangkau pelayanan sosial ekonomi yang mereka butuhkan.

Dalam meningkatkan tingkat aksesibilitas pedesaan dapat diambil alternatif kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Membantu mobilitas perorangan (ke tempat kerja, sekolah, pasar, balai pengobatan, dan sebagainya).
2. Memberikan kegiatan pelayanan untuk penduduk (pelayanan keliling: kesehatan, perpustakaan dan sebagainya).
3. Merelokasi penduduk supaya dekat ke pusat kegiatan: pasar, sekolah, dan sebagainya), dan jalur pelayanan angkutan.
4. Merelokasi kegiatan (supaya dekat dengan penduduk).
5. Mengadakan kebijaksanaan tentang waktu (untuk berbagai kegiatan, dan untuk penjadwalan waktu seperti untuk: jam sibuk bagi sekolah, pasar, balai pengobatan, kantor desa, dan sebagainya).

Dapat dipahami bahwa alternatif-alternatif tersebut di atas sering digunakan dalam perencanaan suatu wilayah pedesaan secara keseluruhan.

BAB III

1. Anonim, Petunjuk Teknis Tata Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri, 1975, hln. 2.
2. Anonim, loc cit, hln. 3.
3. Anonim, loc cit, hln. 23.
4. Mosher, A.T., Creating a Progressive Rural Structure: To Serve a Modern Agriculture, Agricultural Development Council, New York, 1969, hln. 45 .
5. Anonim, op cit, hln. 23.
6. Misra, R.P., Rural Development: National Policies and Experiences, Towards a Rural Development in Asia, Maruzen Asia, Nagoya - Japan, 1981, hln. 233-237.
7. Anonim, op.cit, hln. 33-34.
8. Anonim, loc.cit, hln. 58-59.
9. Anonim, loc.cit, hln. 62.
10. Anonim, loc.cit, hln. 65.
11. Mosher, A.T., Creating a Progressive Rural Structure: To Serve a Modern Agriculture, Agricultural Development Council, New York, 1969, hln. 89.
12. Glikson, A., Regional Planning and Development, Sijthoff's Uitgevers Maatschappij N.V., Leiden, 1955, hln.
13. FAO, Ideas and Action, Bulletin no. 142, 1981/- 4, Kurien: The Role of the Elita in Modernizing a Predominantly Rural Society, hln. 6-10.
14. FAO, loc.cit, hln.
15. Anonim Petunjuk Teknis Tata Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri, 1975m hln. 67-69.
16. Mosher, op.cit, hln. 4.
17. Bourne, L.S., and Simmons, J.W., Systems of Cities, Peet, R.: Rural Inequality and Regional Planning, hln. 461.
18. Bourne, loc.cit, hln. 463.
19. Bourne, loc.cit, hln. 457.
20. Bourne, loc.cit, hln. 469-470.
21. Taft, D.R., and Robbins, R., International Migration, The Ronald Press Company, New York, 1955, hln. 143.
- 21a Town and Country Planning, June 1979, Vol. 48, no. 31, Kasey, M.J., and Smith, P.R., Hungary: Urban and Rural Planning, hln. 891.

BAB IV
PERENCANAAN PUSAT WILAYAH PEDESAAN

1. Maksud dan Tujuan Perencanaan Pusat Wilayah Pedesaan

Dalam tahun 1976, "Economic and Social Commission for Asia and the Pacific" (ESCAP) mengusahakan penyelidikan mengenai perencanaan dan pembangunan pemukiman di wilayah pedesaan, yang meliputi penyediaan pusat-pusat wilayah pedesaan. Yang diselidiki adalah negara-negara: 1. India, 2. Malaysia, 3. Nepal, 4. Filipina, 5. Thailand, 6. Birma, 7. Iran, 8. Afghanistan. Dalam penyelesaian laporan penyelidikan tersebut pada 1978 diikutsertakan para ahli dari : 1. Indonesia, 2. Bangladesh, 3. India, 4. Nepal, 5. Filipina, 6. Sri Lanka, 7. Thailand.

Minat yang makin besar pada pusat wilayah pedesaan adalah akibat dari strategi "Kebutuhan Pokok" yang memberikan perhatian yang besar pada pemerataan dalam pembagian hasil usaha pembangunan nasional. Strategi "Kebutuhan Pokok" itu bukan hanya meliputi kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan saja, tetapi mengusahakan juga perbaikan pendapatan bagi penduduk miskin di wilayah pedesaan misalnya, dengan : pemberian kredit, penyebaran masukan pertanian, pemasaran, dan sebagainya.

Di kebanyakan negara wilayah ESCAP, kira-kira sejumlah 80% dari penduduk tinggal di wilayah pedesaan dan kurang mendapat perhatian dalam kesejahteraan sosial-ekonomi. "Rural Centre Planning" (Perencanaan Pusat Wilayah Pedesaan) bertujuan untuk mengadakan perbaikan dalam hal itu. Titik berat pada Perencanaan Pusat Wilayah Pedesaan adalah : perencanaan dan penyebaran.

Yang harus diperhatikan, adalah :

- a. Pengembangan wilayah pedesaan dapat berjalan lancar, jika fasilitas dan pelayanan yang mendorong produksi berlokasi di pusat wilayah pedesaan.
- b. Pengembangan pedesaan macam ini, didasarkan akan hirarki pusat pedesaan, misalnya : ibukota propinsi, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat wilayah pedesaan.
- c. Perencanaan dilakukan untuk tiap satuan wilayah (yang mungkin dapat dibagi-bagi lagi) yang ditentukan dengan batas menurut keadaan faktor geografis atau faktor administratif atau faktor ekonomi.

rut Adelman, sebaiknya disebar/diredistribusi dulu alat produksi yang penting tersebut di atas, sebelum diadakan usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mungkin hal ini pada permulaan merugikan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi kerugian ini kemudian akan diimbangi oleh percepatan pertumbuhan yang lebih lancar. Yang penting dalam cara ini adalah : tiap orang mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Umum mengenai Ekonomi Maju dan Ekonomi yang Berkembang

Dalam ekonomi terdapat dua aliran yang penting, yaitu : Aliran Evolusi dan Aliran Difusi (Polarisasi).

a. Menurut aliran Evolusi dari Rostow dalam proses perkembangan ekonomi terdapat beberapa fasa yaitu : fasa tradisional, - transisi, - lepas-landas ("take off"), - dewasa, - konsumsi massal. Menurut teori ini usaha dalam pertumbuhan ekonomi itu adalah bergantung kepada peningkatan tabungan dan peningkatan investasi.¹⁾ Perkembangan lainnya dianggap akan mengikutinya secara otomatis. Rostow memberikan perhatian yang menghasilkan lebih banyak bahan makanan dan peningkatan pemasaran, serta peningkatan dana untuk membiayai sektor modern. Yang penting dalam fasa itu adalah investasi dalam prasarana, yang meliputi pelayanan sosial-ekonomi : jalan, pasar, sekolah, tempat peribadatan, balai pengobatan, pasar, irigasi dan sebagainya.

Teori ini adalah berdasarkan kenyataan yang telah terjadi di beberapa negara maju.

b.1. Boeke mengemukakan suatu teori ekonomi lain, yang mengandung prinsip difusi yaitu : model dualistik. Ia dan pengikutnya, Higgins, membedakan negara maju di mana kapitalisme telah berkembang secara wajar serta merupakan unsur yang telah tumbuh dalam masyarakatnya, dan negara yang sedang berkembang di mana kapitalisme adalah suatu unsur yang diimpor dan hanya menyusup ke dalam bagian kecil dari masyarakat, yaitu pada masyarakat lapisan atas atau masyarakat kota.²⁾ Sebagian besar dari penduduk negara berkembang tinggal di wilayah pedesaan dan berproduksi untuk konsumsi sendiri. Ahli ekonomi pengikut model dualistik itu sering mempertentangkan pengurangan kesempatan kerja

sepihak ("dependent economy") dicirikan oleh perbedaan dalam tingkat upah buruh yang besar sekali di dalam negeri, sebagai akibat terdapatnya tenaga-buruh yang murah dan penggunaan teknologi yang padat modal.

Teori ketergantungan sepihak ("dependency theory") itu tidak mempunyai pemasaran setempat.

- c. Friedman mengemukakan hal yang merupakan gabungan antara aliran Evolusi dan aliran Difusi itu dan teori Ketergantungan Sepihak. Ia memandang inti ekonomi dualistik sama dengan ekonomi untuk konsumsi sendiri ("subsistence") dan ekonomi pertukaran barang ("exchange economy") yang berdampingan di suatu negara. Yang pertama tidak menghasilkan barang, yang kedua menghasilkan barang. Yang pertama ("subsistence economy") menghasilkan tenaga buruh yang murah, sehingga jika dimasukkan sektor kapitalis yang modern akan terjadi suasana "penjajahan di dalam negeri sendiri:"⁴⁾ beberapa wilayah menghasilkan bahan makanan serta bahan mentah dan sebagai imbalan menerima sedikit investasi, dan keadaan yang timpang itu dapat berlangsung berlarut-larut.

Bentuk ekonomi dualistik yang sederhana adalah : di kawasan perkebunan besar.

4. Beberapa Teori Pembangunan Wilayah

- a. Implikasi menurut ruang ("spatial") dari pembangunan: dua ahli ekonomi yaitu Hirschman (1958) dan Myrdall (1957) melihat adanya implikasi menurut ruang dari proses pembangunan.

Menurut Hirschman pertumbuhan ekonomi itu berlaku tidak seimbang : industri baru akan timbul dalam lokasi di dekat industri yang sudah ada dan menyebabkan pemusatan ("polarization"); hal itu disertai dengan ketimpangan di kawasan-kawasan yang lain. Tetapi dalam hal tersebut terdapat penjalaran ("spread") perkembangan, atau penetesan ("trickling down effect") yang memperbaiki ketidak seimbangan.

Myrdall menganggap perkembangan itu sebagai proses yang berinteraksi antara kawasan-kawasan, yang menyebabkan perbedaan kemakmuran.

Ia beranggapan pula bahwa pada suatu waktu akan terjadi keseimbangan karena adanya proses penjalaran ("spread") dan penarikan ("backwash").

Dalam kenyataan kota-kota merupakan wilayah inti ("core region" dan yang merupakan wilayah pinggiran adalah wilayah-wilayah yang mempunyai kaitan dengan kota itu. Wilayah inti (kota) mempengaruhi wilayah pinggiran (pedesaan), karena :

1. Kemampuan yang lebih besar ("dominance"): wilayah pinggiran menjadi makin lemah karena pemindahan sumberdaya (alam dan manusia) ke wilayah inti.
2. Pengaruh informasi: hubungan dan interaksi yang potensial adalah lebih besar di dalam wilayah inti.
3. Pengaruh psikologis; dari keberhasilan inovasi.
4. Pengaruh modernisasi: dalam wilayah inti perubahan nilai dan perubahan tindakan berlaku lebih cepat.
5. Pengaruh kaitan ("linkage"): inovasi menghasilkan inovasi.
6. Pengaruh produksi: terdapat imbalan yang menarik bagi inovasi mengenai spesialisasi, produksi dalam skala besar, dan sebagainya.

5. Beberapa Metoda pembangunan pada waktu sekarang

1. Redistribusi

Pembangunan mempunyai arti yang lebih luas dari pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dari kehidupan ekonomi dan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional, sedangkan pembangunan terutama mempunyai hubungan dengan kesejahteraan penduduk yang meliputi perubahan menurut kepranataan di mana termasuk: pembagian yang merata dari pendapatan nasional, pemerataan pendidikan dan sebagainya.

Dalam perekonomian yang tumbuh, menurut Adelman⁷⁾ yang menerima keuntungan adalah orang-orang yang mempunyai faktor produksi penting, yaitu: tanah, modal dan ketrampilan.

Menurut Adelman itu, untuk memperoleh pemerataan dari hasil pembangunan, faktor produksi tersebut di atas harus didistribusikan dulu sebelum diadakan pengaturan untuk mempercepat pertumbuhan itu.

Pertumbuhan ekonomi dengan redistribusi yang dilaksanakan dengan proyek-proyek kecil dan partisipasi penduduk secara maksimal dalam pengambilan keputusan, sering dilaksanakan di negara-negara berkembang.

Myrdal⁸⁾ mengemukakan bahwa menurut konsepsi ekonomi umumnya dianggap bahwa terdapat masalah yang bertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial tetapi di negara-negara berkembang dapat diselenggarakan keadilan sosial dulu untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi. Ketidak-rataan sosial adalah berhubungan dengan status serta meliputi kekurangan mobilitas sosial, dan disebabkan

2. Kebutuhan pokok

Strategi yang tidak begitu ekstrim, seperti redistribusi adalah: pendekatan dengan kebutuhan pokok. Strategi ini mengusahakan kebijaksanaan dalam pendapatan dan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam jangka waktu satu generasi (duapuluh lima tahun), bagi penduduk termiskin di negara-negara yang sedang berkembang. Kebijaksanaan dalam kebutuhan pokok itu meliputi penciptaan pendapatan (dalam bentuk pekerjaan yang produktif) dan pelayanan. Di Indonesia dalam kebijaksanaan kebutuhan pokok dikenal: 9 bahan kebutuhan pokok, (Tabel no 11.)

3. Model ekologi (pengembangan lingkungan).

Dalam model ekologi, manusia itu merupakan bagian dari lingkungan alam atau ekosistem. Ekosistem itu terdiri atas : 1. Iklim, 2. tumbuhan dan mineral, 3. air, 4. vegetasi, 5. hewan dan 6. manusia serta masyarakatnya.

Ekosistem harus dianggap sebagai kesatuan yang menyeluruh di mana terdapat interaksi antara lingkungan alam dan jasad hidup (termasuk juga: manusia). Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan suatu jenis hewan/tumbuhan secara langsung atau tidak langsung dibatasi oleh lingkungan alam itu. Hanya manusia yang bebas dari peraturan tersebut, karena manusia itu mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kebutuhannya. Dalam melakukan hal itu terdapat batas dalam jumlah manusia yang dapat hidup dalam ekosistem tertentu. Hal itu disebut daya dukung ("carrying capacity"). Dalam hubungan dengan daya dukung terdapat bermacam tingkatan rapat penduduk: tingkat rapat penduduk yang optimal adalah suatu keadaan di mana semua orang mendapatkan semua barang/hal yang penting bagi kehidupan masing-masing, dan sebaliknya adalah: tingkat rapat penduduk yang maksimal yang akan tempak dari tingkat kehidupan "subsistence" yang maksimal, yakni suatu keadaan di mana produktivitas menurun dan akhirnya timbul bencana kelaparan.

(Juga hewan dan tumbuh-tumbuhan memerlukan luas minimal tanah tertentu untuk dapat hidup).

Daya dukung itu tidak statis dan dapat dimodifikasikan oleh kegiatan manusia, tetapi hal itu mengganggu keseimbangan. Kemampuan suatu ekosistem untuk mentolerir kegiatan manusia, adalah tidak sama, tetapi

Daerah Miskin Sekali,

adalah daerah-daerah yang pendapatan per kapita penduduknya di

M.S

bawah 75% dari kebutuhan minimum 75% = Rp 21.333,75

Daerah Miskin

adalah daerah-daerah yang pendapatan per kapita penduduknya 25%

kurang, tepat ("garis kemiskinan")

atau 25% lebih dari kebutuhan minimum

. 100% = Rp 28.445,00 M.K

Daerah Hampir Miskin,

adalah daerah-daerah yang pendapatan per kapita penduduknya 25%

H.H

lebih dari pada kebutuhan hidup minimum sampai mencapai kebutuhan

hidup sekunder. 200% = Rp 56.890,00

Daerah Tidak Miskin

adalah daerah-daerah yang pendapatan per kapita penduduknya me-

T.M

lebihi kebutuhan hidup sekunder. > 200%

3. Industri ringan yang merupakan industri kecil yang padat karya, di dekat usahatani
4. Gotongroyong dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
5. Pengembangan hierarki kota yang membantu pengembangan pedesaan
6. Pengaturan kelembagaan yang tepat dalam mengkoordinasikan proyek yang melibatkan banyak sektor.

6. Tahapan dalam Perencanaan

a. Dalam perencanaan terdapat 2 macam tahapan: 1. Tahapan Makro, 2. Tahapan Mikro.

1. Tahapan makro bertitik tolak dari keadaan sekarang yang kurang memuaskan dan menuju kepada keadaan yang diharapkan.

Yang diharapkan itu umumnya dicantumkan dalam sasaran dari perencanaan nasional, seperti : pertumbuhan ekonomi, pemerataan regional, persatuan nasional, dan sebagainya. Dari keadaan sekarang harus dibuat analisa dengan mengikutsertakan sumber alam dan kendala tertentu menuju ke keadaan yang agak memuaskan atau sasaran yang "feasible", yang sering dilakukan dengan : pentargetan. Contoh dari target semacam itu, misalnya besarnya pertumbuhan industri, investasi dan besarnya penciptaan kesempatan kerja, dan sebagainya. Dalam kebijaksanaan yang diambil, harus ditentukan bagaimana target itu dapat dicapai dan cara-cara apa yang akan digunakan, misalnya :

5. Aplikasinya dalam situasi yang khusus.
6. Penilaian dari kebaikan alternatif yang telah diputuskan untuk diambil.

Antara ketiga pengambil keputusan (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah lokal) harus ada koordinasi yang baik.

c. "Top down approach" dan "bottom up approach"

Dalam sejarah, perencanaan itu sebagian besar mempunyai pendekatan "top down" (dari atas ke bawah). Pada dewasa ini karena kurang ahli yang terampil, di negara-negara berkembang perencanaan itu sering bertitik berat pada pendekatan "top down" ini dengan pengambilan keputusan pada tingkat nasional. Cara nasional ("top down approach") ini tidak berdasarkan potensi dari daerah masing-masing. Suatu pembangunan daerah harus mempunyai pendekatan yang terpadu.

Tiap daerah mempunyai potensi yang tertentu dan kendala tertentu.

Jika hal ini diperhitungkan bagi semua daerah, target nasional itu dapat diperkirakan dengan lebih riil tidak terlalu abstrak.

Sebaiknya setelah tujuan nasional ditetapkan, dan sebelum ditentukan pentargetan, harus diperkirakan/dibuat dulu rencana kasar dari daerah berdasarkan potensi daerah. Pendekatan ini disebut "bottom up approach" (pendekatan dari bawah ke atas).

Untuk wilayah pinggiran (pedesaan) sebaiknya digunakan "bottom up approach". Suatu perencanaan mengenai kebutuhan pokok harus berdasarkan pendekatan "bottom up" sehingga tiap wilayah mendapat serentetan program tertentu untuk mencapai sasarnya.

7. Perencanaan Pusat Wilayah Pedesaan ("Rural Centers")

a. Pengertian pusat wilayah pedesaan

Kriteria pusat wilayah pedesaan adalah dilihat dalam fungsinya, apakah suatu pusat perkembangan membantu kepada petani dalam kebutuhan dasar berhubungan dengan pelayanan ekonomi dan sosial, yakni dalam:

1. prasarana untuk pengumpulan dan pemasaran surplus produksi pertanian.
2. penyediaan dalam penyebaran bahan masukan yang penting bagi pertanian, misalnya: alat-alat, pupuk, kredit, perbengkelan, dan sebagainya.

Jadi dalam perencanaan pedesaan tersebut, banyak sekali jawatan yang diikutsertakan, sehingga harus diadakan koordinasi yang baik.

c. Pengembangan kawasan terpadu

Di beberapa negara dilakukan pengembangan kawasan terpadu ("integrated area development"). Dalam pengembangan terpadu terjadi kerja sama vertikal (sektoral berbagai departemen) dan kerjasama horisontal. Suatu kawasan adalah sebagian dari daerah dan luasnya lebih kecil dari suatu wilayah, dan suatu perencanaan terpadu lebih mudah dilakukan dalam satuan luas yang kecil. Keuntungan yang dapat dicapai dengan perencanaan kawasan itu, menurut pengalaman di Bangladesh adalah :

1. Mudah mendapatkan sumberdaya lokal, dan penggunaan modal, tenaga kerja dan faktor produksi lainnya dapat optimal.
2. Konsep perencanaan lokal yang mengikutsertakan partisipasi penduduk secara demokratis dapat direalisasikan lebih mudah dalam kawasan yang lebih kecil dari pada wilayah.
3. Karena kawasan itu lebih kecil dari wilayah, keadaannya lebih homogen, dan hal ini menguntungkan perencanaan sebab permasalahannya tidak kompleks.
4. Koordinasi dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai jawatan akan berjalan lebih lancar.

Yang penting sekali dalam perencanaan terpadu itu adalah : koordinasi.

d. Sistem Pusat Pedesaan

Perbedaan kemakmuran antara desa dan kota merupakan masalah yang besar di negara-negara Asia (Tabel No. 12). Perbedaan kemakmuran dalam kota dan desa di negara-negara Asia itu menurut Lo dan Salih¹²⁾ adalah karena :

1. Pada pembangunan yang telah lalu, kebijaksanaan pembangunan adalah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan terlalu besar ditunjukkan kepada strategi pembangunan industri yang bertempat di kota-kota.
2. Kemajuan dalam teknologi pertanian tidak banyak mencapai hasil yang memuaskan.

Untuk menanggulangi hal itu beberapa kebijaksanaan yang harus diambil adalah :

1. Pengurangan ketidak-seimbangan antara pendapatan kota dan desa.
2. Penciptaan kesempatan kerja di kota tidak merupakan pemecahan masalah, karena kesempatan kerja yang banyak akan menarik jumlah penganggur yang lebih banyak lagi.
3. Mengekang usaha memberikan pendidikan yang berlebihan, karena merupakan hal yang terlalu mahal.
4. Mengekang kenaikan upah di kota.
5. Menciptakan program-program untuk pembangunan desa terpadu yang meningkatkan pendapatan di desa dan mencegah migrasi ke kota.
6. Melakukan redistribusi pendapatan yang menguntungkan lapisan masyarakat miskin.

Dapat disarankan juga supaya di pedesaan diperluas sektor industri kecil yang padat karya.

d. Pengaruh Pusat Wilayah Pedesaan

Pusat-pusat pedesaan ("Rural centres") direncanakan dengan hubungan hierarki pemukiman dari sistim perkotaan, menurut teori tempat memusat, atau "centre place". Pusat-pusat wilayah pedesaan dibentuk di tempat-tempat tertentu (kota kecamatan, atau beberapa pusat dalam satu kecamatan atau satu pusat untuk dua kecamatan). Dengan pembentukan pusat-pusat antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan akan terdapat interaksi yang lebih baik.

Karena model pusat wilayah pedesaan itu berfungsi untuk memperbaiki ketidak-seimbangan, maka perencana cenderung untuk menyebar pusat-pusat sebanyak mungkin.

Dengan sistim "central place" dalam wilayah pedesaan terdapat pemusatan dari usaha pengembangan.

Menurut keterangan Rondinelli dan Rudd. 15)

1. Penempatan kegiatan sosial-ekonomi yang terpusat dalam suatu pusat wilayah pedesaan tertentu, keuntungannya lebih tinggi dan penjalaran pembangunan berlaku lebih baik.
2. Pusat wilayah pedesaan yang menghubungkan dengan perekonomian di wilayah hinterland, seperti : pasar, kantor pesanan, dan sebagainya, menambah kesempatan kerja.

3. Pusat wilayah pedesaan yang mempunyai prasarana yang lengkap dapat menarik orang-orang yang ingin maju dan wiraswasta yang berbobot, sehingga dapat terciptakan lingkungan yang baik bagi investasi baru.
4. Keuntungan dari investasi yang dari waktu dahulu, dapat membentuk modal baru dan memungkinkan pertumbuhan.
5. Investasi dalam prasarana dan utilitas dapat menarik kegiatan ekonomi baru.
6. Pemusatan prasarana sosial-ekonomi mendorong pembuatan jalan-jalan baru dan hal ini menarik kegiatan sosial-ekonomi baru.
7. Lokasi kegiatan ekonomi, fasilitas sosial dan bermacam-macam prasarana yang terdapat dalam suatu pusat wilayah pedesaan mendorong terbentuknya pemasaran baru bagi bahan mentah serta barang setengah jadi, dan memberikan keuntungan bagi para produsen.

6. Proyek bagi Wilayah Pedesaan

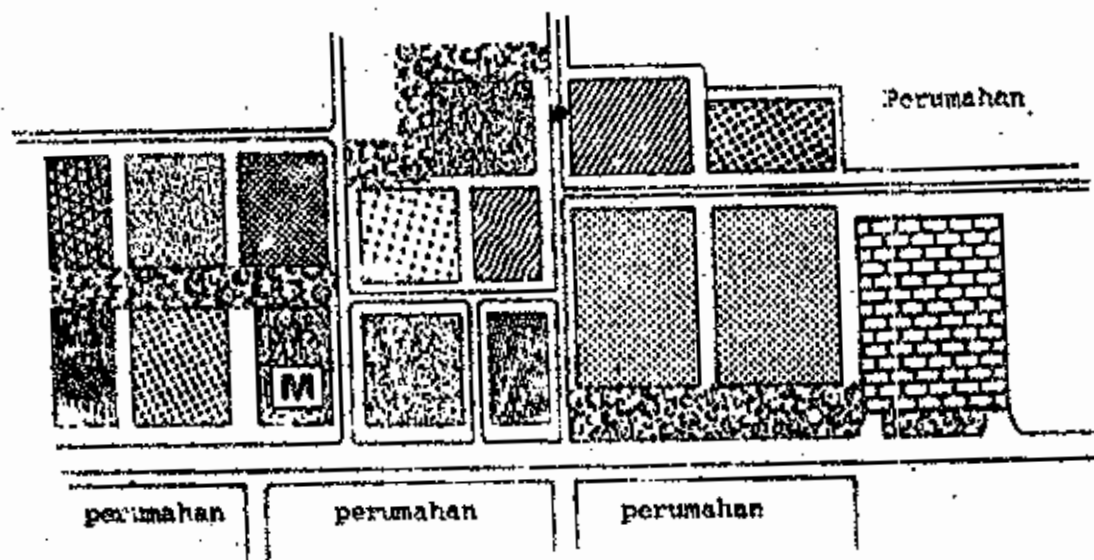
Pembangunan dalam wilayah pedesaan dapat dibagi menjadi dua kegiatan :

- a. Proyek produktif yang langsung dilaksanakan dalam pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri dan kepariwisataan.
- b. Proyek produktif dan sosial yang tidak langsung:
 1. Perumahan
 2. Pelayanan sosial dan ekonomi (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, rekreasi dan olah raga, penyediaan ruang terbuka (taman dan sebagainya), administrasi, pertahanan, pasar dan pertokoan, tempat penggudangan dan tempat pengolahan hasil.
 3. Pelayanan umum (utilitas): air minum, saluran air limbah, penyediaan energi, dan pengaturan pembuangan sampah.
 4. Pelayanan perhubungan: jalan raya, jalan kereta api, jalur lalu lintas sungai, jembatan, pengangkutan umum, radio, televisi dan telekomunikasi.

















Perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan itu dapat dilakukan dalam rencana wilayah terpadu atau dalam rencana kawasan terpadu. Rencana-rencana tersebut memformulasikan strategi pembangunan atau program-program bagi kawasan tertentu, berdasarkan prioritas daerah dan prioritas sektoral, sumberdaya yang tersedia (dana keuangan/tenaga kerja/ke-

c. DESA UTAMA (TEBUKOTA KECAMATAN)

1. Pusat Desa Utama di Tepi Jalan Raya.



Legenda :

 Balai remaja	 Keamanan
 Olah raga	 Alun-alun
 Sekolah	 Balai Desa
 Kantor pos	 Pasar
 Puskesmas	 KUD/Bank Desa
 Masjid	 Pergudangan
 Hiburan/rekreasi	 Terminal
 Pemerintahan	 Jalan Raya.

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Daerah 1979.

LINGKUP DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN INDONESIA

Urutan: kemiskinan di
 pengantar desa
 kapita/tahun/ha
 setara beras (beras)

		Perkiraan Sajogyo Januari-April 1970		Perkiraan Sajogyo Januari-April 1976		Perkiraan dengan menggunakan dis- tribusi per ka- pita dan harga beras pada Janu- ari-April 1976.		Perkiraan dengan menggunakan dis- tribusi per ka- pita dan harga 9 bahan pokok pa- da Januari-April 1976	
		% dari se- jumlahnya	Jumlah (juta)	% dari se- jumlahnya	Jumlah (juta)	% dari se- jumlahnya	Jumlah (juta)	% dari se- jumlahnya	Jumlah (juta)
Jawa : Perkotaan									
Hampir miskin	(400 kg)	55.90	7.13	42.50	6.89	45.99	6.81	35.85	5.31
Miskin	(360 kg)	43.70	5.37	28.49	4.62	27.68	4.10	14.68	2.18
Miskin sekali	(270 kg)	26.05	3.32	17.75	2.88	13.73	2.03	8.79	1.30
Jawa : Pedesaan									
Hampir miskin	(320 kg)	61.00	37.97	58.60	40.48	57.11	38.48	47.95	32.31
Miskin	(210 kg)	39.49	24.58	39.78	27.48	32.92	22.86	25.31	17.06
Miskin sekali	(180 kg)	20.93	13.03	24.95	17.24	17.14	11.55	13.06	8.80
Luas Jawa : Perkotaan									
Hampir miskin	(480 kg)	61.44	4.43	43.51	4.12	42.41	3.66	42.71	3.68
Miskin	(360 kg)	38.96	2.81	27.13	2.57	22.83	1.97	23.04	1.99
Miskin sekali	(270 kg)	20.78	1.50	14.55	1.38	10.18	88	10.27	89
Luas Jawa : Pedesaan									
Hampir miskin	(320 kg)	44.80	15.77	41.65	16.83	13.63	13.98	34.21	13.42
Miskin	(240 kg)	27.78	9.78	25.83	10.44	19.54	7.67	18.61	7.30
Miskin sekali	(180 kg)	15.01	5.28	14.44	5.83	9.32	3.66	8.97	3.52

Sumber : A World Country Study, 1980.

Proyek-proyek yang dapat dilakukan dengan berbagai program tersebut di atas adalah :

1. Proyek pengembangan tanah, yang meliputi juga reklamasi, pencegahan erosi, irigasi kecil dan saluran-saluran pengeringan, (mis.: subak).
2. Proyek teknik yang besar, seperti : bendungan, tanggul, irigasi besar dan pengeringan.
3. Proyek pembangunan jalan dan pemeliharaannya.
4. Proyek prasarana ekonomi, seperti : pasar, gudang dan prasarana pengolahan.
5. Proyek prasarana sosial yang meliputi : bangunan sekolah, pusat kesehatan, balai pertemuan, lapang olah raga, taman, dan sebagainya.

Proyek nomor 1 dan 2 adalah proyek produktif yang langsung, dan proyek no 3 dan 4 adalah proyek prasarana ekonomi. Di Asia Tenggara pembentukan proyek prasarana ekonomi itu, yang sangat sesuai bagi program padat karya, meliputi 60% dari program padat karya, proyek produktif meliputi 25%, dan proyek untuk prasarana sosial meliputi 15%.

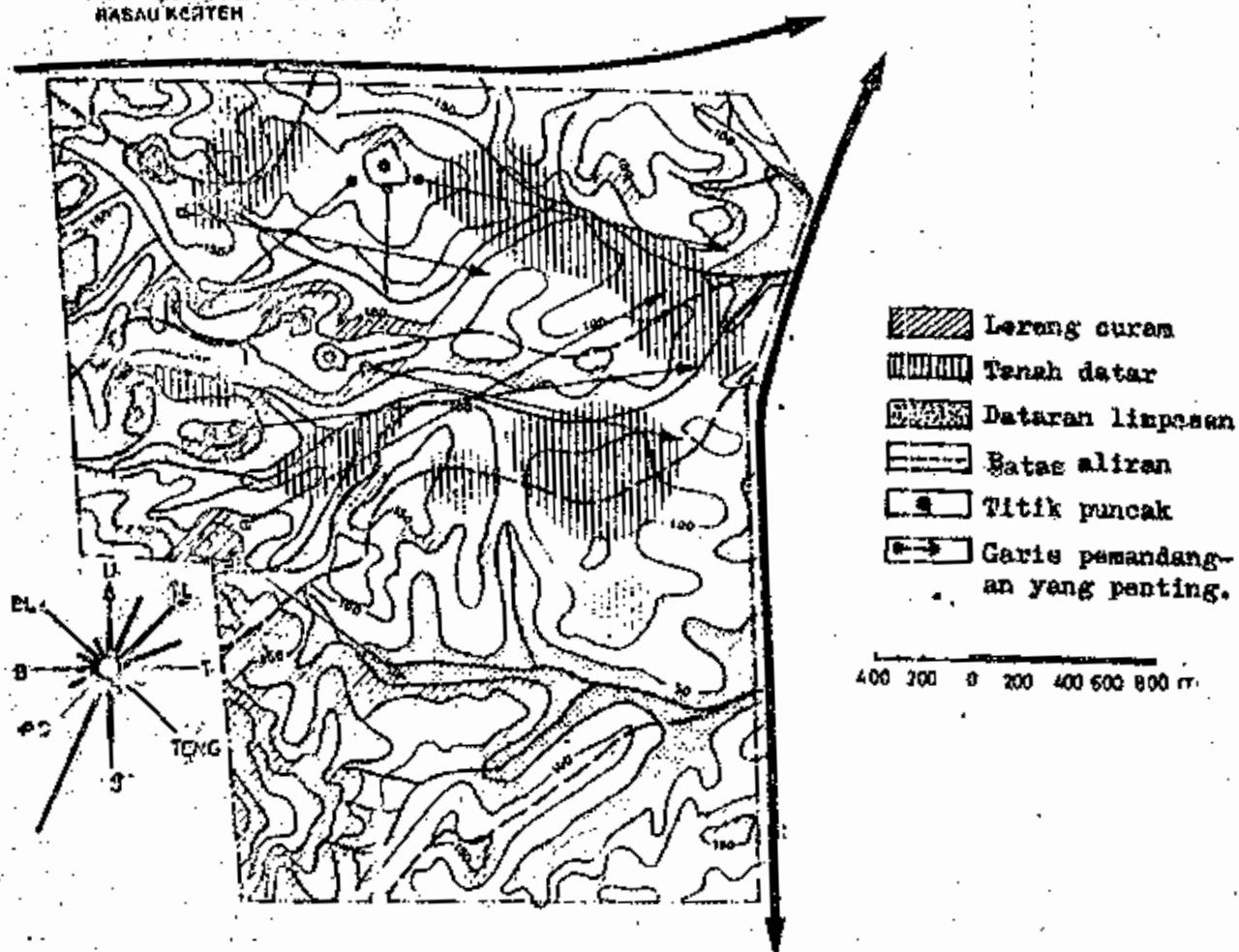
b. Perencanaan fisik dalam pusat wilayah pedesaan

Perencanaan fisik dalam wilayah pedesaan bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan di wilayah pedesaan melalui pembuatan macam-macam jaringan dalam ruang yang berupa pola perhubungan (jaringan jalan) dan pola lokasi untuk memudahkan kegiatan sosial ekonomi bagi penduduk. Perencanaan fisik itu memberi perhatian pada penggunaan yang optimal bagi tanah, air, serta sumberdaya alam lainnya, dan sumberdaya manusia. Untuk keperluan perencanaan itu digunakan macam-macam standar. Pembentukan "rural centres" lebih mudah direncanakan dalam pembuatan pemukiman baru, seperti : pemukiman transmigrasi, pemukiman kembali dan pemukiman untuk perkebunan.

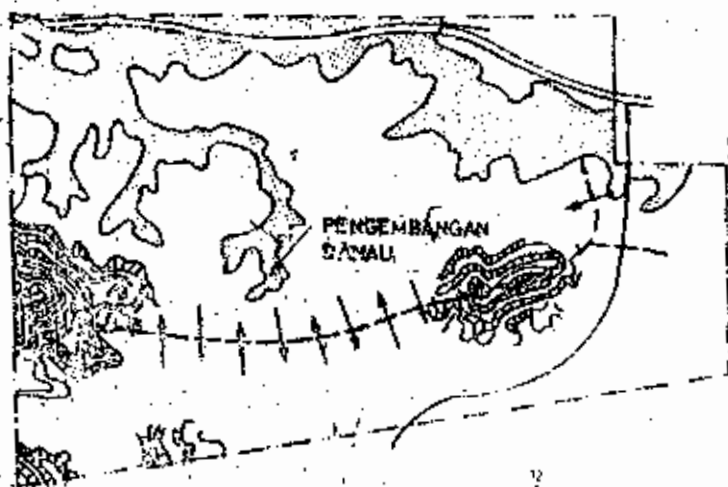
1. Tata guna tanah dan kemampuan tanah

Kemampuan tanah dan tata guna tanah, disertai standar-standar perencanaan dan kebijaksanaan pengembangan tanah serta kebijaksanaan penyebaran penduduk, menentukan dayadukung ("carrying capacity") suatu kawasan, yaitu jumlah optimal penduduk yang dapat hidup di kawasan baru atau jumlah maksimal penduduk yang dapat hidup di kawasan yang telah berkembang. Suatu perkiraan dayadukung dapat dibuat pada peta

GAMBAR NO. 12

ANALISIS LINGKUNGAN
BASAU KEUTEH

8 DURIAN MAS



kemampuan tanah yang berskala 1 : 200.000. Untuk penggunaan yang lebih mendetail dapat diambil peta tata guna tanah atau peta kemampuan tanah berskala 1 : 25.000. Dalam gambar 12 tampak cara analisis Adagkungan dari suatu kawasan, dan pada tabel no. 13 dicantumkan pembaturan tanah untuk pemukiman (Lihat pula gambar 13).

TABEL NO. 15a

HIRARKHI PEMUKIMAN DAN PUSAT PENDUDUK, DI GOA, INDIA

No.	Macam pemukiman	Pusat penduduk (jiwa)
1.	Kampung	tak tersedia keterangan
2.	Kampung pelayanan	< 5.000
3.	Kota pelayanan	5.000 - 11.000
4.	Kota pasar	11.000 - 17.700
5.	Titik pertumbuhan	19.500 - 48.750
6.	Pusat pertumbuhan II	65.000 - 190.000
7.	Pusat pertumbuhan	tak tersedia keterangan

ESCAP, 1979.

TABEL NO. 15b

HIRARKHI PEMUKIMAN DI MALAYSIA
(PAHANG TENGGARA DAN TRENGGANU TENGAH)

No.	Macam pemukiman	Jumlah penduduk	Status
1.	Pemukiman dengan sumberdaya	< 5.000	pedesaan
2.	Pengolahan dan pelayanan masyarakat	5.000 - 15.000	perkotaan
3.	Kota Pelayanan dan penyediaan	15.000 - 30.000	perkotaan
4.	Kota distrik, pusat administrasi, pelayanan dan penyediaan	30.000 - 50.000	metropolitan
5.	Pusat pertumbuhan regional dan pusat administrasi	> 50.000	metropolitan

ESCAP, 1979.

2. Pemukiman

a. Pola Pemukiman

Pemukiman/perkampungan di pedesaan terjadi dari tiga macam pola :
1. tersebar, 2. pola pita yang memanjang dan 3. terpusat atau mengelompok.

Dalam pola tersebar, petani tinggal pada atau di dekat tanah pertaniannya. Jarak antara rumah petani dengan tanah pertaniannya dekat sekali, tetapi jarak antara rumahnya dengan rumah tetangganya berjauhan. Dalam pola pita, rumah-rumah itu berjajar dalam satu baris atau dua tiga baris biasanya sepanjang sungai atau pantai. Dalam pola terpusat atau mengelompok rumah-rumah petani itu berdiri mengelompok berdekatan, tetapi petani-petani itu bertinggal jauh dari tanah pertaniannya (gambar no. 6). Pola terpusat atau mengelompok itu mempunyai beberapa keuntungan dalam penyediaan prasarana untuk orang banyak.

Untuk beberapa kampung dapat disediakan prasarana sosial ekonomi, misalnya : sekolah, balai pengobatan, dan seterusnya di pusat desa (gambar no. 11) dan kampung-kampung besar dapat dihubungkan dengan jalan-jalan yang menuju ke kota.

b. Sistem pusat pedesaan

Standar yang umum dipakai untuk pusat desa dihubungkan dengan berbagai tingkat dari sistem hirarki prasarana penduduk. Hirarki prasarana itu meliputi pusat perkotaan dan pusat wilayah pedesaan (Mungkin suatu kota merupakan suatu pusat pedesaan). Contoh urutan hirarki permukiman tercantum pada tabel no. 15. Hierarki pemukiman itu dapat dihubungkan dengan hirarki prasarana penduduk, (gambar no. III).

Untuk perencanaan di Indonesia dapat digunakan beberapa standar dari Bab III no. 10. dan Lampiran L.3.

sing dapat diperkirakan secara terpisah (Tabel no. 16).

Penyediaan air itu dapat diambil dari air permukaan (danau, sungai, dan sebagainya) dan dapat juga dari air tanah. Supaya ekonomis dan menguntungkan teknologi (misalnya: memompakan, menjernihkan air dan sebagainya) seringkali adalah lebih baik untuk membuat persediaan air yang besar bagi gabungan beberapa kampung atau desa, daripada membuat persediaan air yang kecil bagi masing-masing kampung atau desa.

19

Harus diperhatikan, bahwa untuk melindungi air harus dibuat ~~peraturan~~ seperti yang telah dilakukan di Jerman Barat: pada Jalur I, tempat di mana peralatan penyediaan air ditempatkan, tanahnya tidak boleh digunakan untuk apapun, selain dari penyediaan air. Agak jauh pun (Jalur II, sejauh air tanah mengalir selama 50 hari ke tempat penyediaan air) beberapa kegiatan tertentu harus dilarang, seperti: pertanian, pertambangan, instalasi lalu lintas, pengudangan gasolin, dan sebagainya. Pada tempat yang lebih jauh (Jalur III), dilarang ada industri, penggunaan pestisida, dan peresapan air limbah. Dalam tabel no. 18 tampak penyediaan air dan sanitasi di negara berkembang.

TABEL NO. 16

PENGARUH PRASARANA SOSIO-TEKNIK TERHADAP PERMINTAAN PER KAPITA

No.	Tipe pengaturan air dan sistim sanitasi	Konsumsi maksimal per hari (1/kapita)	Konsumsi rata ² per hari (1/kapita)	Koefisien variasi per jam
1.	Sumur bor di luar, tanpa sanitasi	20 - 40	10 - 25	2,0 - 2,5
2.	Keran dalam rumah, tanpa sanitasi	45 -	30 - 45	1,8 - 2,0
3.	Keran dalam rumah, dengan sanitasi	90 - 125	60 - 95	1,5 - 1,8
4.	Keran dalam rumah, sanitasi dan kamar mandi	140 - 180	100 - 140	1,4 - 1,7
5.	Keran dalam rumah, sanitasi dan kamar mandi dengan peralatan air panas	180 - 200	140 - 180	1,3 - 1,5

Natural Resources and Development, 1983.

Kecepatan bergerak air tanah, menurut Meinzer ialah antara < 1 meter - 140 meter/hari, bergantung kepada lereng, jenis tubuh tanah, iklim dan vegetasi.

TABEL NO. 18

PRESENTASE PENDUDUK YANG MENDAPAT PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(RATA RATA MENURUT WILAYAH) ANTARA TAHUN 1973-1977

Wilayah	Penyediaan air		Penyediaan air	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
Afrika)Sub-Sahara	66.3	10.4	70.3	14.2
Afrika Utara & Eropa Selatan	74.3	64.4	94.0	93.0
Asia Selatan	66.3	17.2	66.9	2.5
Asia Timur & Pasifik	58.3	9.8	66.6	14,8
Amerika Latin & Karibia	78.0	34.9	80.3	25.4

Sumber : Misra, R.P., 1981.

TABEL NO. 19

JUMLAH PENDUDUK BAGI TIAP RANJANG DI RUMAHSAKIT, TAHUN 1970-1977

Negara	Perkotaan	Pedesaan
Nigeria	400	18.450
Ethiopia	350	15.370
Zaire	100	1.000
Mesir	250	2.090
Libya	70	10.010
Pakistan	560	12.300
Malaysia	110	980
Thailand	290	1.140
Bolivia	200	2.400
Haiti	290	5.270
Meksiko	780	1.310
P e r u	340	1.300

Sumber : Misra, R.P., 1981.

TABEL NO. 21
PELAYANAN KESEHATAN MENURUT STANDAR, DI MALAYSIA

No Urut	Toko Obat	Balai pengobatan	Rumahsakit desa	Rumahsakit distrik
1. Penduduk yang dilayani	4.000	10.000	15.000	50.000
2. Jumlah ranjang	-	-	30	100
3. Radius pengaruh	1-7 km	1-16 km	>16 km	>16 km
4. Dokter Umum	-	1	4	8
5. Pegawai kesehatan lain	-	7	18	40
6. Pegawai tambahan	2	8	16	43
7. Lain-lain	-	13	40	113

Sumber : ESCAP, 1979.

Di Indonesia pun telah diadakan bermacam-macam standar dalam pelayanan kesehatan, misalnya : satu pusat kesehatan masyarakat bagi tiap kecamatan; 1 dokter bagi tiap 50.000 penduduk, dan lain sebagainya.

5. Pendidikan

Dalam pendidikan hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan adalah standar jarak letak sekolah, luas sekolah dan halaman, jumlah murid bagi tiap kelas, jumlah guru dan pegawai lainnya. Sebagai contoh untuk mengetahui berapa jumlah ruang yang dibutuhkan, dapat dihitung seperti di bawah ini.²⁰⁾

$$K = \frac{P \times R \text{ u d } \times R \text{ d d}}{M \times G}, \text{ dengan keterangan :}$$

P = jumlah penduduk dalam jangkauan pencapaian

Rud = Presentase anak yang berumur sekolah dasar terhadap jumlah penduduk

Rdd = Presentase anak-anak yang berumur sekolah dasar, yang terdaftar sebagai murid, dalam setahun ditargetkan 100%, <100%, >100%

M = Jumlah murid per kelas

G = Jumlah kelompok murid bagi tiap ruang (giliran pagi & siang).

K = Jumlah ruang.

Di bawah ini dicantumkan tabel standar sekolah di beberapa negara di Asia (Tabel no. 22).

CONTOH DIAGRAM PELAYANAN EKONOMI DALAM PERSAWAHAN

TAB. 10

Masa dan Kredit Pemukiman	Distribusi Masukan			Berbagai Pelayanan Pertanian			Barang Konsumsi dan Pelayanati		
	Kantor pusat distribusi busi pupuk	Kantor pusat busi bibit	Kantor pusat busi bibit	Gudang pendirian dan lapangan	Terminal truk dan bengkel	Kantor pusat pembangan pelangan	Kantor pusat pembangan pelangan	Bengkel umum dg. pelangan	Kantor pusat pembangan pelangan
Bank dan Kredit	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Pusat per-tumbuhan dg. 50.000 jiwa atau lebih	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Titik per-tumbuhan dg. 20.000 - 50.000 jiwa	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Kota pasar 20.000 - 50.000 jiwa	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Kotapala yaman 6.000 - 10.000 jiwa	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Kampung pakayaman (atama) 10.000 - 5.000 jiwa	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						
Kampung Pacar (kecil) 1.000 - 1.200 jiwa	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian	Bank untuk pengembangan tanah dan badan2 keuangan bagi pertanian						

TABEL NO. 24
TATA GUNA TANAH PERKOTAAN DI BEBERAPA NEGARA, DI ASIA

No Urut	Tataguna Tanah	India (kota di negara bagian)			Malaysia (proyek)
		Punjab (%)	Madya Pradesh (%)	FELDA (%)	Trengganu Tengah (%)
1.	Perumahan	60	42	53	50
2.	Perdagangan	11	1	9	8
3.	Industri	17	-	6	6
4.	Jalan	7	24	10	10
5.	Pendidikan	-	-	7	8
6.	Rekreasi	-	3	4	-
7.	Fasilitas umum dan keindahan	5	19	12	2
8.	Lain - lain	-	-	1	6
9.	Tanah perse- dian	-	11	8	10
Jumlah %		100	100	100	100
Jumlah hektar		2.200	-	272	-
Jumlah orang		350.000	-	7.200	15.000

Sumber : ESCAP, Guidelines for Rural Planning United Nations
New York, 1979.

Di kota yang lebih besar tanah yang digunakan untuk perdagangan / industri dan pelayanan umum harus relatif lebih besar.

Umumnya penggunaan tanah perkotaan adalah 50% untuk perumahan, 10% perdagangan/industri, dan 7% - 24% untuk jalan.

Pada gambar 13 tercantum rencana struktur ~~suat~~ kawasan pertanian, dan pada gambar 14 tampak suatu tataletak ("lay out") suatu kampung dan tanah pertaniannya.

TABEL NO. 26
 PUSAT DESA DI SULAWESI TENGGARA
 KEPERLUAN AKAN TANAH DAN BANGUNAN

No Urut	Tataguna tanah	Tipe bangunan	Luas (m ²)	Luas seluruhnya	
				m ²	%
1.	Administrasi pertanian	Kantor proyek	73	4.500	8,5
		Kantor koperasi dan BRI	73		
		Gudang koperasi	120		
		Lumbung padi	48		
		Lantai pengeringan	36		
		Pusat pengeringan	16		
2.	Perumahan pegawai	Tipe D (4)	50	18.000	33
		Tipe E (1)	36		
		Tipe T ₁ (1)	63		
		Tipe T ₂ (2)	40		
3.	Pendidikan	Sekolah dasar	270	7.000	13
		Sekolah menengah pertama	270		
4.	Agama	Mesjid	55,5	3.000	5,5
5.	Balai pertemuan umum	Balai desa	112	5.000	9,5
6.	Kesehatan	Pusat kesehatan Masyarakat Bantuan	54	500	1
		Pusat kesehatan Masyarakat	64		
7.	Pasar/warung/toko	Lantai tembok	200	10.000	18,5
8.	Rekreasi/kawasan perluasan	-	-	6.000	11

Sumber : ESCAP, 1979.

BAB V

TINJAUAN KEMBALI DAN HARAPAN BAGI DESA

1. Tinjauan kembali mengenai wilayah pedesaan

Dalam bab-bab yang lalu, diusahakan untuk dapat memahami keadaan wilayah pedesaan dan mengetahui permasalahannya, baik sosial-ekonomi maupun fisik. Setelah mengetahui permasalahannya serta menganalisa data yang tersedia, baru dapat dicari cara perencanaan untuk perbaikan baik secara sosial ekonomi, maupun fisik, dengan tekanan pada perbaikan tataruang.

Menurut pembicaraan yang lalu penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani kecil yang tinggal di pedesaan. Penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata, dan ± 65% dari seluruh penduduk tinggal di Jawa yang luasnya hanya 6 $\frac{1}{2}$ %. Sebagian besar penduduk masih miskin, dan 70% dari penduduk yang miskin itu bertempat tinggal di Jawa. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian (termasuk transmigrasi), diversifikasi pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya. Dengan ekstensifikasi tanah pertanian bagi petani, luas tanah pertanian dalam 10 tahun (1963-1973) telah meningkat dari 14,5 juta hektar menjadi 16,3 hektar, dan luas sawah dari 4 juta hektar menjadi 4,7 juta hektar. Karena permilikan tanah kecil, menurut suatu survei pada 1976¹⁾ jumlah waktu kerja petani dalam musim sibuk (musim panen dan musim tanam) adalah 35-59 jam per minggu, tetapi pada musim tenang (antara musim sibuk itu) hanya 10 - 34 jam per minggu. Umumnya pertanian bahan makanan dikerjakan 70 - 75% oleh anggota keluarga, hanya dalam musim sibuk digunakan buruh yang diupah.

Juga peningkatan kesempatan kerja pada industri, dan jasa (termasuk perdagangan) telah naik, sehingga penduduk yang bermata pencaharian bertani menurut persentasenya dalam 15 tahun (1961-1976), yaitu dari 73% menjadi 62%. Tetapi karena industri Indonesia belum cukup berkembang, maka penduduk yang bermata-pencaharian industri di Indonesia masih sedikit, kurang dari 10% dari keseluruhan.

Dalam Repelita IV perindustrian itu ditingkatkan pengembangannya, yang dilakukan untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

bahan, selain dari pertumbuhan ekonomi. Jika tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, disangka akan terjadi malapetaka. Pertumbuhan ekonomi berarti dalam hal ini adalah kenaikan pendapatan per kapita dengan mengembangkan industri di kota-kota.

Karena pada dewasa ini sumber tenaga dari bahan bakar menjadi mahal harganya, ~~hidup~~ hidup di kawasan kota besar yang rapat penduduknya menurut Warren akan menjadi tidak ekonomis. Hal itu disebabkan karena ongkos pengangkutan barang untuk kebutuhan orang banyak di kota dan pengangkutan manusia untuk keperluan sehari-hari akan naik berlipat ganda sehingga menjadi mahal, dan akibatnya semua hasil pertanian dan barang industri pun akan menjadi mahal berlipat ganda.

Pandangan dulu, bahwa pembangunan dilakukan di kota, berubah menjadi: pembangunan dilakukan di desa.

Hal itu terjadi karena untuk mengurangi penggunaan mesin dan sumber tenaga dari bahan bakar, harus dikerjakan lebih banyak manusia di pedesaan dalam produksi bahan makanan. Untuk itu penduduk dari kota-kota di negara-negara industri harus pindah ke pedesaan. Orang akan sadar bahwa harapan hari kemudian akan terletak di pedesaan. Dalam pembangunan desa tersebut menurut Warren³⁾ dapat dilakukan dua cara; Pertama: Mengembangkan kampung-kampung tertentu di pedesaan menjadi kota baru, tetapi akan terdapat berbagai masalah yang telah dialami oleh kota-kota pada umumnya. Kedua, yang mungkin lebih baik adalah: Mengembangkan wilayah pedesaan dengan memperluas kampung-kampung di pedesaan, sehingga mempunyai pusatnya sendiri serta dapat mempunyai ekonomi sendiri dan tradisi sendiri.

Hal ini tidak berarti bahwa ada gerakan yang menuju kembali ke jaman lampau, tetapi gerakan tetap menuju ke depan: suatu langkah maju dari pertumbuhan sebagai hasil Revolusi Industri ke fasa berikutnya yaitu masyarakat yang kokoh dan seimbang dari jaman pasca industri.

Di Indonesia halnya tidak seperti di negara industri yang pedesaannya berpenduduk sedikit, karena penduduk pedesaan Indonesia adalah besar jumlahnya dan telah banyak kampung yang luas-luas dengan penduduk yang jumlahnya besar ~~di pedesaan itu~~. Penduduk yang bekerja dalam produksi pertanian besar juga jumlahnya, bahkan ada kampung-kampung di pedesaan yang mempunyai kelebihan tenaga kerja. Gagasan tentang pemukiman seperti di atas itu dapat segera diciptakan dengan pengembangan desa secara sosial-ekonomi, walaupun tanpa penambahan penduduk dari luar desa.

yang meliputi antara lain perkembangan dalam :⁷⁾ komunikasi, informasi, industri ruang angkasa, ilmu samudra, teknik ekologi, pertanian berdasarkan ekosistem, energi alternatif, dan sebagainya. Permilikan yang penting dalam masyarakat pasca industri, bukan tanah seperti halnya pada masyarakat pertanian, atau mesin dan pabrik seperti halnya dalam masyarakat industri, tetapi informasi, jadi hal yang tidak ber-sifat kebendaan. Berhubung dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam kebudayaan pasca industri, pendidikan dan ilmu adalah penting sekali. Denison⁸⁾ bahkan berkesimpulan, bahwa di Amerika Serikat sebanyak duapertiga dari pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan pendidikan bagi angkatan kerja, dan ilmu yang banyak didapat oleh tenaga kerja itu.

Naisbitt mengemukakan bahwa dalam masyarakat pasca industri itu, para tenaga kerja berusaha untuk berdiri sendiri dan membebaskan diri dari perusahaan-perusahaan besar yang ketat peraturannya, serta mencari alternatif lain seperti berusaha sendiri, berwira-swasta atau bekerja dalam perusahaan kecil. Di Amerika Serikat misalnya, sejak 1979 jumlah perusahaan kecil meningkat, sehingga 98% dari seluruh perusahaan di negara itu merupakan perusahaan kecil.⁹⁾ Dapat dikatakan bahwa masyarakat Amerika Serikat dalam perekonomian pasca industri itu bergeser dari masyarakat pengelola menjadi masyarakat wira-wasta.

Berlainan dengan dalam perekonomian industri yang berprinsip sentralisasi, dalam perekonomian pasca industri berkembang gejala desentralisasi dalam berbagai aspek. Di Amerika Serikat misalnya, setelah Perang Dunia II perekonomiannya tumbuh melonjak¹⁰⁾ pada 1950-1960 maka gejala sentralisasi mulai melemah dan gejala desentralisasi kemudian berkembang makin kuat serta mengubah kebijaksanaan politik, dunia per-

⁷⁾ Toffler, Ibid, hln. 18.

⁸⁾ Naisbitt, J., Megatrend, Ten New Directions Transforming Our Lives, A. Warner Communication Company, New York, 1984, hln. 8.

⁹⁾ Naisbitt, Ibid, hln. 161.

¹⁰⁾ Naisbitt, Ibid, hln, 105.

dinya hampir kosong, sekarang dihuni oleh penduduk yang jumlahnya lebih besar. Hal tersebut memerlukan pembangunan/pengembangan wilayah pedesaan dengan lebih baik dan teratur, sehingga negara maju yang dulu dapat dikatakan hanya memusatkan perhatian kepada kota-kota saja (karena sebagian besar penduduknya tinggal di kota), sekarang harus mulai memberi perhatian yang lebih besar kepada wilayah pedesaan itu.

Di Indonesia yang merupakan negara agraris, gejala desentralisasi itu tampak dalam berbagai hal, begitu juga dalam kependudukan: penduduk tinggal di kampung-kampung yang terdapat tersebar di wilayah pedesaan (83%), dan yang tinggal di kota-kota hanya sedikit saja (17%). Mungkin pola ini dapat lama bertahan karena perkembangan industri yang bersifat sentralisasi, yang di Indonesia baru pada taraf perkembangan permulaan, sudah disusul pula oleh perkembangan pasca industri yang bersifat desentralisasi, sehingga ketiga kebudayaan tersebut di atas - yaitu kebudayaan pertanian, industri dan pasca industri - terdapat bersama-sama di Indonesia, walaupun perkembangannya tidak sama kuat.

Berhubung sebagian besar dari penduduk Indonesia tersebar di pedesaan itu, maka dapat difahami bahwa pembangunan pedesaan - secara fisik, sosial dan ekonomi - adalah sangat penting. Dengan pembangunan pedesaan itu diharapkan supaya penduduk pedesaan dapat ditingkatkan kehidupannya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jika pendapatan penduduk di pedesaan cukup, misalnya mungkin urbanisasi fisik dari desa ke kota - yang menimbulkan berbagai masalah di kota - dapat berkurang, dan urbanisasi itu tidak terjadi secara fisik melainkan dalam arti bahwa penduduk desa itu cara hidupnya meningkat sesuai dengan kehidupan penduduk di kota.

Mulai pertengahan 1980, Sadler melihat bahwa beberapa negara industri ekonominya turun, tetapi beberapa negara (NIC : Newly Industrializing Countries) mengalami pertumbuhan yang cepat (Sadler 1992, hal 2-3). Hal itu seakan-akan mengisyaratkan suatu fajar dari jaman yang baru.

NIC Asia (Singapore, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan) adalah kelompok pertama yang berkembang mulai 1960, karena akan terdapat kelompok NIC kedua, yang berkembang mulai 1980, misalnya Malaysia, Indonesia, Thailand, yang dapat disebut NIC baru (Tan, 1997, hal. 147).

Karena matapencaharian penduduk adalah pertanian, penggunaan tanah penting sekali.

Tata Guna Tanah merupakan strategi yang penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Misalnya dalam berbagai kegiatan yang memerlukan tanah harus dibuat keputusan yang tepat untuk kehidupan sosial ekonomi yang baik.

Dalam penggunaan tanah bagi pertanian di Indonesia misalnya, dapat dipilih tanaman atau ternak yang lebih menguntungkan (Jayadinara, 1992, h. 64-65). Produksi daging sapi misalnya dikatakan tidak efisien bagi pulau Jawa, karena sapi memerlukan bahan makanan yang harus ditanam pada tanah yang luas. Sejumlah kalori yang sama dari daging sapi memerlukan 41x seluas tanah untuk tebu, padahal tanah tersebut lebih baik ditanami bahan makanan bagi manusia.

Tanah untuk satuan usaha tani misalnya di negara yang sedang berkembang umumnya kecil, antara di bawah satu hektar (di Indonesia) dan lima hektar (di Thailand). Luas tanah pertanian yang kecil itu di Indonesia tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga petani (kira-kira 5 orang), sehingga petani kecil (*peasant*) itu harus mencari nafkah sampingan seperti menjadi buruh, pedagang, perajin/industri, pemandu wisata, dan sebagainya. Di Indonesia dilakukan juga usaha, agar luas tanah minimum untuk pertanian menjadi minimum 2 hektar per keluarga, di samping dikembangkan industri kecil di pedesaan itu untuk penciptaan kesempatan kerja.

Di Inggris, supaya penduduk negeri tidak terlalu bergantung kepada impor bahan makanan (yang dapat berbahaya jika terjadi peperangan), maka diusahakan oleh pemerintahnya supaya para petani dan buruh tani tetap senang tinggal di wilayah pedesaan sebagai petani. Dengan macam-macam subsidi dari pemerintah bagi pertanian dan peternakan diusahakan supaya pendapatan pada sektor pertanian dan sektor industri itu sama (misalnya juga dengan penentuan upah minimum yang sama di semua sektor perekonomian). Subsidi dari pemerintah itu datang dari hasil perpajakan bertingkat (*progresif*) yang sebagian besar datang dari sektor industri dan hasil dari pengaturan warisan, dimana warisan dari orang kaya (yang kekayaannya di atas jumlah tertentu) yang meninggal, sebagian tertentu harus diserahkan kepada pemerintah di samping dibagikan kepada ahli warisnya. Subsidi untuk pertanian semacam itu dilakukan pula di Jepang.

b. Masa Krisis Moneter dan Krisis Ekonomi

Pada permulaan 1998 berbagai negara di Asia mengalami krisis moneter, yaitu turunya kurs uang negara-negara tertentu terhadap nilai uang dollar Amerika. Di beberapa negara krisis moneter itu parah sekali sehingga mempengaruhi politik bahkan mengganti pemerintahan beberapa negara seperti di Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand. Di Indonesia pergantian pemerintah itu terjadi atas desakan gerakan Reformasi Damai, dari rakyat yang dipelopori oleh para mahasiswa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun diganti oleh pemerintahan transisi Reformasi.

Di Indonesia dalam krisis moneter itu nilai resmi dollar dari Rp. 2.500 per dollar naik menjadi Rp. 10.000 per dollar.

Hal ini terjadi a.l. karena modal asing untuk Indonesia banyak yang ditarik oleh penanam modal, karena hilang kepercayaan kepada kemampuan untuk mengembalikan/membayar hutang itu.

Karena harga barang impor menjadi mahal, maka banyak perusahaan industri yang gulung tikar, dan para pegawai perusahaan di Indonesia puluhan juta orang yang diberhentikan, sehingga terjadi krisis ekonomi.

Pada masa sebelum tahun 1998 banyak modal asing yang masuk sehingga sektor industri tumbuh sampai 20 %, tetapi mulai Krisis Moneter sektor industri jatuh lagi.

Pedesaan juga terpengaruh oleh krisis moneter itu, karena beberapa bahan dan alat pertanian seperti pestisida, pupuk, dan mesin kecil harus diimpor. Namun ada juga bagian sektor pertanian yang bahkan mendapat keuntungan, seperti : perikanan udang, perkebunan buah-buahan dan sebagainya, yang harga eksportnya menjadi lebih tinggi. Sekarang mulai ekonomi rakyat dikembangkan secara lebih serius. Karena sebagian rakyat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan (sebanyak 70 %), maka wilayah ekonomi rakyat adalah pedesaan.

Suasana pada masa sebelum 1998 yang sepertinya Indonesia akan mampu bersaing di pasaran bebas (globalisasi) mulai mereda dan suasana sekarang menjadi lebih hati-hati, dan dipikirkan apakah ada alternatif lain misalnya dengan menetapkan nilai uang wilayah tertentu (pendapat Malaysia ; misalnya penetapan uang ; ringgit atau yuan atau yen, di Asia Tenggara atau Asia), dan membatasi lalulintas devisa atau cara lain, dari pada keikut - sertaan pada globalisasi itu untuk perdagangan. Mungkin gejala ini terjadi pula di beberapa negara lain.

11. Firman, Tommy, Dr, 1997, *The restructuring of Jakarta metropolitan areas : A phenomenon of global city in a mega-city of Asia*, Fourth International Congress of Asian Planning School Association (APSA), Bandung Institute of Technology, Bandung.
12. Glikson, A. 1955, *Regional Planning and Development*, A.W Sijthoff's Uitgevers Maatschappij N.V., Leiden.
13. Jain, R.K. Ph. D., Urban, L.V. Ph.L., Stacey, G.S. Ph.D., 1981, *Environmental Impact Analysis*, Van Nostrand Reinhold Company, New York-Cincinnati-Atlanta-Dallas-San Francisco-Toronto-Melbourne.
14. Jacobs, M., and Stern, B.J., 1974, *An Outline of General Anthropology*, Barnes and Noble Inc., York.
15. Kannegieter, Ir. A & H. Huizing, 1987, *Aspects of Agriculture, Rural and Land Ecology Surveys*, ITC - Enschede, The Netherlands
16. Kannegieter, Ir. A. dan H. Huizing, 1987, *Aspects of Agriculture*, hl. 6, *Rural and land ecology surveys*, ITC-Enschede, The Netherlands.
17. Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.
18. Misra, R.P., 1981, *Rural Development : National Policies and Experiences*, Maruzen Asia, Nagoya-Japan.
19. Mosher, M.J., Harman, R.G., Coles, O.B., and Spencer, M.B., 1997, *Rural Transport and Accessibility*, Volume 1 Main Report, Centre of East Anglian Studies, University of East Anglia, Norwich, U.K.
20. Mosher, A.T., 1969, *Creating a Progressive Rural Structure : To Serve a Modern Agriculture*, Agricultural Development Council, Inc., New York.
21. Myrdal, G., 1971, *The Challenge of World Poverty : A World Anti Poverty Program in Outline*, A Penguin International Edition, Harmondsworth, Middlesex, England.
22. Naisbitt, J., 1984, *Megatrends : Ten new directions transforming our lives*, A Warner Communities, Company, New York.
23. *Natural Resources and Development*, 1983, Vol.18, Hahn, H.H. : *Clear Water for small communities*, hln. 22-37, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen.
24. Padmo Wahjono, Prof. S.H., 1983, *Ketetapan-Ketetapan M.P.R.S.*, Ghalia Indonesia.
25. Palm, Ir. C.H.M., *Sejarah Anthropologi Budaya*, Balai Pendidikan Guru, Bandung.

26. Planologi ITB bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 1977-1978, Pola Tata Desa Jilid II : Hankantibmas, Kepemimpinan dan Management, dan Pemerintahan Desa
27. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Penelitian Planologi, ITB., 1977-1978, Pengembangan Test Plant Tata Desa, Buku II, Badan Penelitian dan Pengembangan D.N., dengan Departemen Planologi, ITB.
28. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Penelitian Planologi ITB, 1976-1977, Pola Tata Desa : Aspek Tata Ruang, Badan Penelitian dan Pengembangan D.N. dengan Departemen Planologi, ITB.
29. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri dengan Desa Administration Research Group IIP., dan Departemen Ilmu Sosial-ekonomi, IPB., dan Lembaga Penelitian Planologi, ITB, 1978-1979, Pola Tata Desa : Laporan Akhir Pemantapan Test Plant, Departemen Dalam Negeri, IIP-IPB.
30. Robinson, W.O., 1975, Population and Development Planning, The Population Council.
31. Royen, Van W., and Bengtson, N.S., 1971, Fundamentals of Economic Geography, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.
32. Saddler, David, 1992, The global region, Pergamon Press, Oxford-Tokyo.
33. Short, J.R., 1984, An Introduction to urban geography, Routledge and Kegan Paul, London-Boston, Melbourne.
34. Suriaatmadja, Dr. R.E., 1985; Metoda dan Teknik Analisis Dampak Lingkungan, Kursus Dasar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan ke-4, Bandung.
35. Taft, D.R. and Robbins, R., 1955, International Migration, The Ronalds Press Company, New York.
36. Tan, Gerald, 1992, The newly industrializing countries of Asia, Times Academic Press, Singapore.
37. Thomas, W.L. Jr., 1962, Man's Role in Changing the Face of the Earth ; Ordway, S.H. Jr. : Possible Limits of Raw Material Consumption, The University of Chicago Press, Chicago-Illinois.
38. Toffler, A., 1984, Previews and premises, Pan Books Ltd, London - Sidney
39. Town and Country Planning, June 1980, Vol. 49 no. 6,
 - a. Viewpoint : The Rural Voice.
 - b. Warren, D., : The Countryside of Tomorrow, hln. 182-184.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Anonim. *Dir Jen Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis Tata Desa, 1975, Departemen Dalam Negeri.*
2. *A World Bank Country Study, Indonesia : Employment and Income Distribution Indonesia, 1980, World Bank.*
3. *Badan Penelitian dan Pembangunan Departemen Dalam Negeri, 1979, Pola Tata Desa, laporan Akhir Pemantapan Test Plant 1978/1979 : Pedoman Pengarahan Perencanaan Pola Tata Ruang Fisik Desa di dalam Pembangunan Desa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Badan Penelitian Departemen Dalam Negeri, bekerja sama dengan Desa Administration Group Institute Ilmu Pemerintahan, dan Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor, dan Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung.*
4. Bahaudin, Amir Fauzi, 1997, *Restructuring for the Asian Renaissance : The Primacy of Malaysian land use planning, Fourth International Congress of APSA, ITB – Bandung.*
5. Bertrand, A.L., "Rural Sociology, An Analysis of Contemporary Rural Life", 1958, Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London.
6. Bourne, L.S, and Simmons, J.W., 1978, : *Systems of Cities, Oxford University Press, New York.*
7. *Dir Jen Pembangunan Desa, 1976, Perencanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Fisik, Departemen Dalam Negeri-Planologi ITB, Bandung.*
8. Djojohadikoesoemo Soemitro, 1975, *Indonesia dalam Perkembangan dunia kini dan masa datang, LP3 E5, Jakarta.*
9. *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 1979, Guidelines for Rural Centre Planning, United Nations, New York.*
10. F.A.O., 1982, *Ideas and Action, Bulletin no. 145, 1982/1-2 ; Cross P. and Aderson N., Sanitation and Rural Development, hln. 14-20 Action for Development, United Nations, Rome – Italy.*
Id 1981, *Ideas and Action no. 139, 1981/1, Not Seeing the Wood for Treas in Nepal, hln. 6-11, Rome-Italy.*
Id 1982, *Ideas and Action no. 149, 1982/6, Hettne B., Development Theories and Models, Rome – Italy.*
Id *Ideas and Action no. 142, 1981/4, Kurien : The Role of the Elite,*

Dengan pertumbuhan kota di negara maju setelah Perang Dunia II, akibat pengembangan industri yang dilakukan secara terpusat di kota-kota, baik jumlah penduduknya maupun jumlah modal dan kekayaannya makin bertambah besar di kota itu, sedangkan jumlah penduduk dan jumlah modal kekayaan di pedesaan makin berkurang. Di Amerika Serikat misalnya, penduduk petani hanya kira-kira 3-4% saja sehingga tiap usaha tani luasnya besar sekali, dapat seluas puluhan ribu hektar. Berhubung dengan kurangnya tenaga kerja bagi pertanian, pekerjaan dilakukan dengan mesin secara besar-besaran. Hasilnya berlebih (surplus) sehingga dapat diekspor. Mulai 1960 di wilayah pedesaan Amerika Serikat dilakukan juga pembangunan untuk memajukan wilayah pedesaan.

Menurut Naisbit penduduk Amerika Serikat dalam waktu akhir ini berpindah dalam jumlah besar ($\frac{1}{3}$ nya) dari beberapa kota besar yang mundur industrinya ke kota kecil dan wilayah pedesaan (Jayadinata, 1992, hal. 136). Sejak 1990 an orang-orang yang tinggal di pedesaan Amerika Serikat tidak mendugdag (*commuting*) untuk bekerja di kota, tetapi bekerja di rumah masing-masing dan dihubungkan dengan alat telekomunikasi yang canggih (misalnya : internet), dan hal itu disebut : *telecommuting*

Walaupun sektor pertanian hanya menyumbangkan sebagian yang kecil dalam produksi ekonomi dunia (menurut Laporan Pembangunan Dunia 1992, pertanian hanya menghasilkan 30% GNP di negara berkembang dan 5% di negara industri), implikasi dari globalisasi mengenai tanah pertanian adalah penting (Lam, 1997, h.1), karena : 1. Luas tanah yang digunakan untuk produksi pertanian adalah 70% dari luas tanah di dunia, 2. Pertanian adalah sektor ekonomi yang paling dilindungi, dan akan ditargetkan untuk restrukturisasi. Sering terjadi pengalihgunaan tanah pertanian dalam proses pengembangan kota atau industrialisasi.

Di Indonesia sebesar $\pm 66\%$ dari pendapatan penduduk (imbalan dalam kegiatan ekonomi), digunakan untuk makan. Hal seperti itu adalah umum bagi negara berkembang, yang umumnya menggunakan 60 - 80 % dari pendapatan bagi keperluan bahan makanan, sehingga keperluan kehidupan sosial hanya dibiayai secara terbatas saja. Di Amerika Serikat hanya sekitar 20 % dari pendapatan/penduduk yang digunakan bagi bahan makanan itu, sisanya yang besar itu digunakan untuk keperluan kehidupan sosial.

3. Keadaan pedesaan pada waktu sekarang

a. Pedesaan dengan globalisasi

Pada dewasa ini kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh globalisasi. Menurut Dicken (Firman, 1997, h.1), globalisasi adalah proses meluasnya dan mendalamnya pasar dunia untuk barang dan barang dagangan, jasa dan keuangan, yang khususnya berkembang akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi dan kemudian akibat liberalisasi perdagangan yang telah memberikan tenaga kepada berbagai bagian di dunia yang berintegrasi dengan cepat, untuk masuk ke dalam sistem keuangan dunia dan umumnya ke dalam ekonomi dunia.

Negara maju umumnya adalah negara industri yang kegiatan ekonominya berpusat di kota, sedangkan negara berkembang adalah negara agraris yang kegiatan ekonominya pertanian sehingga sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan.

Pada 1953 misalnya luas wilayah pedesaan di Amerika Serikat ada 98,7% dan luas wilayah perkotaan 1,3%, jumlah penduduk di pedesaan ada 36% dan di perkotaan 64%, serta jumlah nilai kekayaan di pedesaan ada 15% dan di wilayah perkotaan 85%.

Dengan demikian tingkat kemakmuran penduduk wilayah perkotaan dan penduduk di wilayah pedesaan tidak banyak bedanya dan dapat dikatakan merata.

Di negara yang sedang berkembang yang umumnya merupakan negara agraris tidak terdapat banyak kota sehingga sebagian besar penduduk (di Indonesia $\pm 70\%$ pada 1990) bertempat tinggal di wilayah pedesaan, dan hanya sebagian kecil tinggal di wilayah perkotaan (Indonesia : $\pm 30\%$).

Sebagian besar modal dan kekayaan di negara sedang berkembang pun ada terkumpul di wilayah perkotaan yang penduduknya sedikit itu, sehingga terdapat perbedaan tingkat kemakmuran penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan. Secara umum kekayaan negara berkembang yang terdapat di pedesaan : 15-20 %, di perkotaan : 80-85 %.

Dalam pembangunan di Indonesia, dan juga di beberapa negara sedang berkembang lainnya, keadaan yang timpang seperti itu diusahakan penanggulangannya dengan memberikan investasi yang lebih besar dalam pembangunan, kepada wilayah pedesaan, yakni bagi sektor pertanian, sistem pengangkutan dan prasarannya, dan untuk prasarana sosial ekonomi desa, dan sebagainya, di samping bagi kesehatan dan pendidikan penduduk desa.

Di Malaysia, dulu pengarahannya untuk pembangunan itu ditentukan oleh ekonomi, tetapi pada dewasa ini (Bahaudin, 1997, h.8) timbul realisasi bahwa pembangunan ekonomi tanpa disertai pengembangan kebudayaan, akan menyebabkan pengaruh yang merugikan bahkan membahayakan masyarakat. Berhubung dengan itu, Malaysia yang membayangkan menjadi negara maju pada \pm tahun 2020, menganggap penting untuk mencantumkan agenda ekonomi tersebut dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas dengan sasaran "*Pencerahan Asia*" (*Asian Renaissance*) dengan tujuan menghidupkan kembali seni dan ilmu berdasarkan akhlak dan agama yang kuat, perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi dengan nyata oleh berkembangnya seni dan sastra, arsitektur dan musik.

usaha, dan seluruh kebudayaan. Desentralisasi itu tampak jelas pada sektor kependudukan.

Menurut Naisbitt¹¹⁾ pada cacah jiwa Amerika Serikat 1980, ternyata bahwa kota-kota besar karena industrinya mundur, kehilangan penduduknya dalam jumlah besar (kira-kira sepertiganya !), karena penduduk itu pindah ke kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Herbers¹²⁾ mengemukakan bahwa yang menyebabkan mengalirnya penduduk yang pindah dari kota besar ke wilayah pedesaan adalah : 1. Desentralisasi perusahaan yang menyebabkan perusahaan besar menempatkan cabang-cabangnya di wilayah pedesaan, dan 2. Sistem jalan raya, yang memungkinkan pekerja dapat tinggal di wilayah pedesaan yang segar, karena dapat mendugdag atau melajon ("to commute") ke tempat kerjanya di kota dengan cepat dan lancar.

Selain dari hal-hal tersebut di atas kegiatan ekonomi pasca industri, terutama kegiatan dalam informasi tidak terikat pada kota besar (lain halnya dengan kegiatan ekonomi industri yang mempunyai besi yang berat sebagai bahan dasar, yang karena hal-hal tertentu sering terikat kepada kota besar), sehingga kegiatan tersebut dapat berlokasi di mana saja seperti di kota kecil atau di wilayah pedesaan.

Short¹³⁾ mengemukakan, bahwa migrasi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi; pada masa industrialisasi permulaan, orang berpindah dari desa ke kota ("rural-urban"); pada masa industrialisasi telah dewasa, orang berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain ("inter urban"); dan pada masa pasca industrialisasi, orang berpindah dari kota ke desa ("urban-rural").

Menurut uraian di atas, ternyata bahwa di negara-negara maju terdapat kecenderungan bahwa pada dewasa ini penduduk berpindah dari kota-kota besar ke wilayah pedesaan, sehingga wilayah pedesaan yang ta-

11) Naisbitt, Ibid, hln. 136.

12) Naisbitt, Ibid, hln. 139

13) Short, J., An Introduction to Urban Geography, Routledge and Kegan, London - Boston - Melbourne and Henley, 1984, hln. 65.

Tentang pembangunan yang pada dewasa ini umumnya bergeser dari kota ke desa itu dikemukakan juga oleh beberapa ahli tertentu. Toffler⁴⁾ mengemukakan bahwa pada dewasa ini - sejak dua dasawarsa - di negara-negara maju mulai berkembang kebudayaan pasca industri, setelah mundurnya perkembangan kebudayaan industri. Perkembangan kebudayaan industri dimulai kira-kira sejak tigaratus tahun yang lalu, yang mengubah perkembangan kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan pertanian yang telah berkembang sejak beberapa ribu tahun (5.000 sampai 10000 tahun) yang lalu. Kebudayaan pertanian telah berkembang di seluruh dunia, sedangkan kebudayaan industri, yang ekonominya didukung oleh bahan bakar fosil dan yang dicirikan oleh produksi massal, konsumsi massal, media massal, pendidikan massal, komunikasi massal, hiburan massal, dan sebagainya, berkembang terutama hanya pada seperempat bagian dari dunia (di beberapa negara maju). Baik di negara kapitalis maupun di negara sosialis, yang menurut Toffler⁵⁾ kedua bentuk masyarakat itu adalah hasil Revolusi Industri, terdapat kota-kota besar, dan kedua bentuk masyarakat itu mempunyai dasar yang sama, yaitu : standardisasi, sinkronisasi, sentralisasi, maksimisasi, dan sebagainya. Masyarakat industri, yang berkembang mulai kira-kira tigaratus tahun yang lalu itu, dan yang setelah mendapat kemajuan⁶⁾ lalu melakukan penjajahan sehingga dapat memperoleh bahan makanan yang murah, bahan bakar yang murah dan bahan mentah yang murah untuk pengembangan perekonomiannya, pada dewasa ini telah mundur. Perkembangan industri berpindah ke negara-negara yang mempunyai upah buruh yang masih murah, yaitu ke negara-negara sedang berkembang.

Setelah kemunduran ekonomi industri di negara maju itu, maka terjadi pergeseran dari kebudayaan industri ke kebudayaan pasca industri,

⁴⁾ Toffler, A., *Previews and Premises*, Pan Book Ltd., London, Sidney, 1981, hln. 11.

⁵⁾ Toffler, *Ibid*, hln. 91.

⁶⁾ Toffler, *Ibid*, hln. 141.

Dalam perbaikan tataruang berhubung dengan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi itu telah dibangun pemukiman berencana seperti dalam program-program: transmigrasi, pemukiman kembali, pemukiman di perkebunan dan perbaikan kampung serta pemugaran rumah, dan sebagainya. Semua hal yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut adalah hasil kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta khususnya dan umumnya adalah hasil seluruh penduduk di Indonesia, sehingga oleh pemerintah diusahakan pula pemerataan dalam menikmati hasil pembangunan itu.

2. Harapan bagi Wilayah pedesaan.

Dalam pembangunan pada dewasa ini, bukan saja negara agraris seperti Indonesia yang menujukan perhatiannya kepada pembangunan desa, tetapi juga negara-negara industri. Hal ini terjadi mungkin berhubungan dengan perkembangan-perkembangan tertentu yang terjadi pada waktu-waktu akhir ini, jadi sebagai tuntutan jaman.

Warren²⁾ menceriterakan, bahwa pada dua abad yang lalu telah mulai suatu proses yang mengubah samasekali tata ruang wilayah (di Eropa dan Amerika) dan mengubah kehidupan manusianya dalam cara hidup bukan dalam cara berpikir, dan proses yang menyebabkan semua itu adalah Revolusi Industri.

Pada pelaksanaan kehidupan ekonomi, adalah sebagai berikut: industri pada umumnya dipusatkan di kota-kota, dan sebagai akibatnya penduduk pedesaan dapat memiliki: hidup di pedesaan sebagai petani, hidup di perkotaan sebagai buruh industri. Baik sebagai petani maupun sebagai buruh industri, mereka tetap ada dalam golongan miskin, tetapi kehidupan di kota adalah lebih baik. Hal itu terjadi demikian karena teraga buruh baik dalam pertanian maupun dalam industri, dapat diganti dengan mesin yang menggunakan sumber tenaga dari bahan bakar yang murah. Penduduk pedesaan yang berbakat pindah ke kota, dan karena itu pedesaan mengalami kemunduran. Kota-kota bermunculan dan berkembang, dan sebagian besar penduduk di Eropa dan Amerika itu bertempat tinggal di kota-kota tersebut dengan bermata pencaharian sebagai buruh industri.

Setelah perubahan tersebut di atas berlaku dalam dua abad, baik cita ekonomi maupun cita etika dan kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh Revolusi Industri itu. Orang-orang menyangka bahwa tak ada jalan lain untuk peru-

BAB IV

1. ESCAP, Guidelines for Rural Centre Planning, United Nations, New York, 1979, hln, 23.
2. Ibid, hln, 24.
3. Ibid, hln, 25.
4. Ibid, hln, 26.
5. Ibid, hln, 27.
6. Ibid, hln, 28.
7. Ibid, hln, 29.
8. Myrdal, G., 1971, The Challenge of world poverty : A World anti - poverty program in outline, A Penguin International Edition, Harmondsworth, Middle Essex, England, hl. 68
9. Misra, R.P., 1981, Rural Development Asia, Nagoya - Japan, hl. 28
10. Glikson, A., Regional Planning and Development, Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, NV., Leiden, 1955, hln.
11. ESCAP, op cit, hln. 71.
12. ESCAP, op cit, hln. 87.
13. Bourne, L.S., and Simmons, J.W., Systems of Cities, Oxford University, New York, 1978, hln. 171.
14. ESCAP, op cit, hln. 49.
15. ESCAP, op cit, hln. 98.
16. FAO, Ideas and Action, Bulletin no. 145, 1982/1-2, Rural Health; Cross, P., and Anderson, N.: Sanitation and Rural Development, hln. 15.
17. ESCAP, op.cit, hln. 273.
18. ESCAP, op.cit, hln. 324.
19. Natural Resources and Development; Hahn, H.H. : Clear Water for Small Communities, Institute for Scientific Cooperation, hln. 23, Tubingen, 1983
20. ESCAP, op.cit, hln. 325.

TABEL NO. 25
TATAHUNA TANAH DAN PRASARANA DI PUSAT PEDESAAN, DI
MALAYSIA, TRENGGANU TENGAH

No Urut	Macam-pelayanan	Luas per unit (ha)	Jarak/lokasi	Melayani penduduk
1.	Toko		lokal $\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$ km	85
2.	Warung		lokal $\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$ km	170
3.	Bioskop	0,40	$\frac{3}{4}$ - $4\frac{1}{2}$ km	17.000
4.	Pasar	0,120	$\frac{3}{4}$ - $4\frac{1}{2}$ km	25.000 - 35.000
5.	Pompa bensin	0,01	pusat kota	8.000 - 9.000
6.	Kantor pos	0,40	$\frac{3}{4}$ - $4\frac{1}{2}$ km	17.000
7.	Pemadam kebakaran	1,60	terpusatkan	25.000 - 35.000
8.	Pos polisi	2,	pusat kota	25.000 - 35.000
9.	Komplek kantor pemerintah	2	terpusatkan	25.000 - 35.000
10.	Terminal bus dan taksi	0,40	pusat kota	25.000 - 35.000
11.	Mesjid	1,20	terpusatkan	25.000 - 35.000
12.	Surau	0,01	$\frac{3}{8}$ km	25.000 - 35.000
13.	Rumahaakit	8	terpusatkan	25.000 - 35.000
14.	Klinik bayi	0,01	$\frac{3}{8}$ km	17.000
15.	Perpustakaan umum	0,4	$1\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ km	25.000 - 35.000
16.	Pusat kegiatan remaja	1,2	$\frac{3}{4}$ - $4\frac{1}{2}$ km	25.000 - 35.000
17.	Kantor telepon	0,4	terpusatkan	25.000 - 35.000
18.	Ruang serba guna	0,8	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$ km	17.000
19.	Komplek olahraga	10	mudah dijangkau kendaraan	25.000 - 35.000
20.	Kantor pos	-	$\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ km	17.000
21.	Klinik bersalin	0,2	$\frac{3}{8}$ km	25.000 - 35.000
22.	Tempat parkir mobil		di tempat	
23.	Bioskop terbuka	disatukan de-taman kota		
24.	Terminal bus	tergantung keadaan	$\frac{3}{8}$ km	
25.	Sekolah dasar	4,0	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$ km	5.262
26.	Sekolah menengah	8,0	$\frac{3}{4}$ - $4\frac{1}{2}$ km	17.000
27.	Kampus	8,0	tak penting	25.000 - 35.000
28.	Taman kanak-kanak	disatukan dgn. sekolah dasar	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$ km	25.000 - 35.000

6. Pelayanan ekonomi

Sebagai pedoman, penyebaran pelayanan ekonomi dapat dilakukan dengan penyebaran prasarana ekonomi menurut tingkatan hirarki. Seringkali macam prasarana tertentu dalam standar dihubungkan dengan jumlah orang yang dilayani oleh prasarana tersebut. Dalam hal ini harus diperhatikan prasarana untuk pelayanan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya, dan juga untuk pelayanan kredit, pemasaran dan penyaluran masukan yang harus ada di tingkat hirarki terendah dari pusat pedesaan.

Untuk menjelaskan prasarana ekonomi dan sosial, di bawah ini diberikan suatu tabel tentang tataguna tanah di pusat pedesaan (Tabel no. 23 dan 24-25).

Tataguna tanah untuk prasarana di pusat pedesaan dicantumkan pada tabel 26.

Prasarana sosial ekonomi yang diatur supaya ada dalam jangkauan penduduk itu, terdapat pula pada konsep Agropolitan yang dikemukakan oleh J. Friedmann pada 1975. Konsep ini mengikutsertakan sebagian besar penduduk pedesaan dalam pembangunan, dan mengusahakan desa supaya lebih terbuka dengan mengembangkan industri dan rekreasi dan lain-lain di samping pertanian. Dengan peningkatan kegiatan tersebut dalam distrik agropolitan yang mempunyai organisasi fungsional, diusahakan tumbuhnya suatu kota di wilayah pedesaan ("Agropolis"). Hubungan distrik agropolitan dengan pemerintahan adalah: Pemerintahan Pusat → Pemerintahan Daerah (dengan 0,5 - 5 juta penduduk) → Distrik Agropolitan sebagai organisasi yang fungsional dengan ± 50.000 penduduk, yang di dalamnya mempunyai musyawarah Desa (dengan ± 2.000 penduduk) dan Rapat Lingkungan (meliputi ± 500 penduduk). Dengan adanya suatu kota di wilayah pedesaan ("agropolitan"), maka prasarana sosial ekonomi ada dalam jangkauan penduduk.

TABEL NO.22

PANDAR SEKOLAH DI MALAYSIA, THAILAND, INDIA

No Urut	Beberapa data	Malaysia			Thailand		India			
		Pahang Tenggara	Malaysia Tenggara	Selangor Teknik	Trengganu	Mekong Bawah	Madhye Pradesh	Sekolah menengah pertama	Sekolah menengah atas	
1.	Jumlah murid per kelas	40	35	35	40	40	38	50	40	40
2.	Jumlah murid per guru	31	27	27	-	-	-	34	24	35
3.	Jumlah tingkatan per sekolah	6	7	4	-	-	-	5	3	3
4.	Jumlah ruang kelas per sekolah	34	34	-	12	-	-	10	9	9
5.	Luas bangunan sekolah per murid (m ²)	-	-	-	-	-	1,5	195	25	44

Sumber : ESCAP, 1979.

4. Kesehatan

Perencanaan pelayanan kesehatan untuk pedesaan di beberapa negara ESCAP umumnya bergantung kepada sumberdaya yang tersedia.

Dalam pelayanan kesehatan itu dalam memperbesar dayaguna diberikan beberapa standar, yaitu mengenai : jarak maksimum suatu fasilitas, luas bangunan, macam peralatan, dan jumlah perawat, bidan serta dokter bagi tiap-macam fasilitas. Misalnya dalam penentuan jumlah ranjang bagi suatu pusat kesehatan masyarakat digunakan penghitungan seperti di bawah ini :¹⁹⁾

$$\text{Jumlah ranjang yang diperlukan} = \frac{(Pk \times Opk + Pl \times Opl) \times HR}{365 \times R}$$

dengan keterangan :

Pk = Penduduk kawasan

Pl = Penduduk luar kawasan

Opk = Opname penduduk kawasan per tahun

Opl = Opname penduduk luar kawasan per tahun.

HR = Rata-rata lama opname (Hari menggunakan ranjang)

R = Rata-rata jumlah yang diopname per tahun.

Di beberapa negara sedang berkembang terdapat standar jumlah ranjang seperti tercantum pada tabel no. 19 dan.20.

Beberapa negara di Asia dan Pasifik mempunyai standar untuk pegawai kesehatan yang berbeda-beda. Hal itu bergantung dengan keadaan negara itu masing-masing (Tabel no. 21)

Tabel No : 20

STANDAR JUMLAH RANJANG

No Urut	Negara/Wilayah	Perbandingan ranjang
1.	Malaysia	2 ranjang per 1.000 penduduk
2.	Thailand Selatan	1 ranjang per 1.000 penduduk (pada 1981)
3.	Goa (India)	1 ranjang per 700 penduduk (rencana pada 1991)
3.	Goa (India)	2 ranjang per 1.000 penduduk

Sumber : ESCAP, 1979.

TABEL NO.17
KONSUMSI AIR DARI SUMUR DAN LEDING

No Urut	Macam pelayanan air	Konsumsi (liter/hari)	Rata-rata (liter/hari)
1.	Sumur timba/mata air/kolam/sungai	15	5 - 25
2.	Sumur bor/sumur pompa	30	10 - 50
3.	Saluran pipa air (air leding) :		
	satu keran	50	10 - 100
	banyak keran	150	50 - 300

Sumber : ESCAP, 1979.

Dari tabel tersebut tampak, bahwa konsumsi air dari mataair / sumur timba adalah paling kecil, karena pengambilan air memerlukan tenaga manusia, sehingga air itu harus dihemat.

c. Listrik desa

Dalam perencanaan pelistrikan pedesaan diperlukan suatu standar, yang utama adalah standar per orang atau standar per keluarga untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri kecil dan keperluan umum (penerangan jalan, pompa air, dan sebagainya). Keperluan akan listrik itu akan berbeda bagi tiap pusat pedesaan. Di India²⁰⁾ misalnya suatu kampung dengan 100 rumah (500 jiwa) memerlukan 105 kWj, yang terbagi : 75 kWj/hari untuk macam-macam pompa irigasi, 20 kWj/hari untuk industri kecil dan 10 kWj/hari untuk penerangan (rumah, toko, jalan).

Kebutuhan sebetulnya adalah lebih besar, yaitu: 6,5 kWj/orang/hari untuk rumah tangga (masak, penerangan) dan mata pencaharian. Di bawah ini diberikan suatu tabel sebagai pedoman bagi Asia Tenggara, (Lampiran-Tabel no. L.2).

3. Beberapa prasarana bagi pusat pedesaan

a. Pengangkutan/lalu-lintas

Supaya lalu lintas di pedesaan dapat berjalan lancar diperlukan jalan-jalan yang memenuhi syarat. Di Thailand Utara¹⁸⁾ bagi pedesaan itu diberikan jalan lokal dengan lebar total 20 meter (dengan 6 m dikeraskan) sebagai jalan penghubung kampung-kampung dengan jalan raya (dengan standar yang sama), dan jalan lingkungan dengan lebar 15 meter (dengan 4 m dikeraskan). Tanah pertanian dihubungkan dengan jalan setapak.

Di Malaysia (di perkebunan PIR karet/kelapa sawit LDA) dibuat sistem jalan sebagai berikut :

1. Jalan lingkungan (yang menghubungkan kebun-kebun pribadi dengan jalan lain) dengan lebar kurang dari 12 meter.
2. Jalan lokal, yang menghubungkan jalan lingkungan dengan jalan distrik, dengan lebar total 15 meter.
3. Jalan distrik, yang menghubungkan berbagai distrik, dengan lebar total 20 meter.
4. Jalan wilayah, dengan lebar total 40 meter.

Untuk pedoman di wilayah pedesaan diberikan suatu tabel dengan 3 kelas jalan desa. (Lampiran A: Tabel No. I.1).

b. Air minum bagi wilayah pedesaan

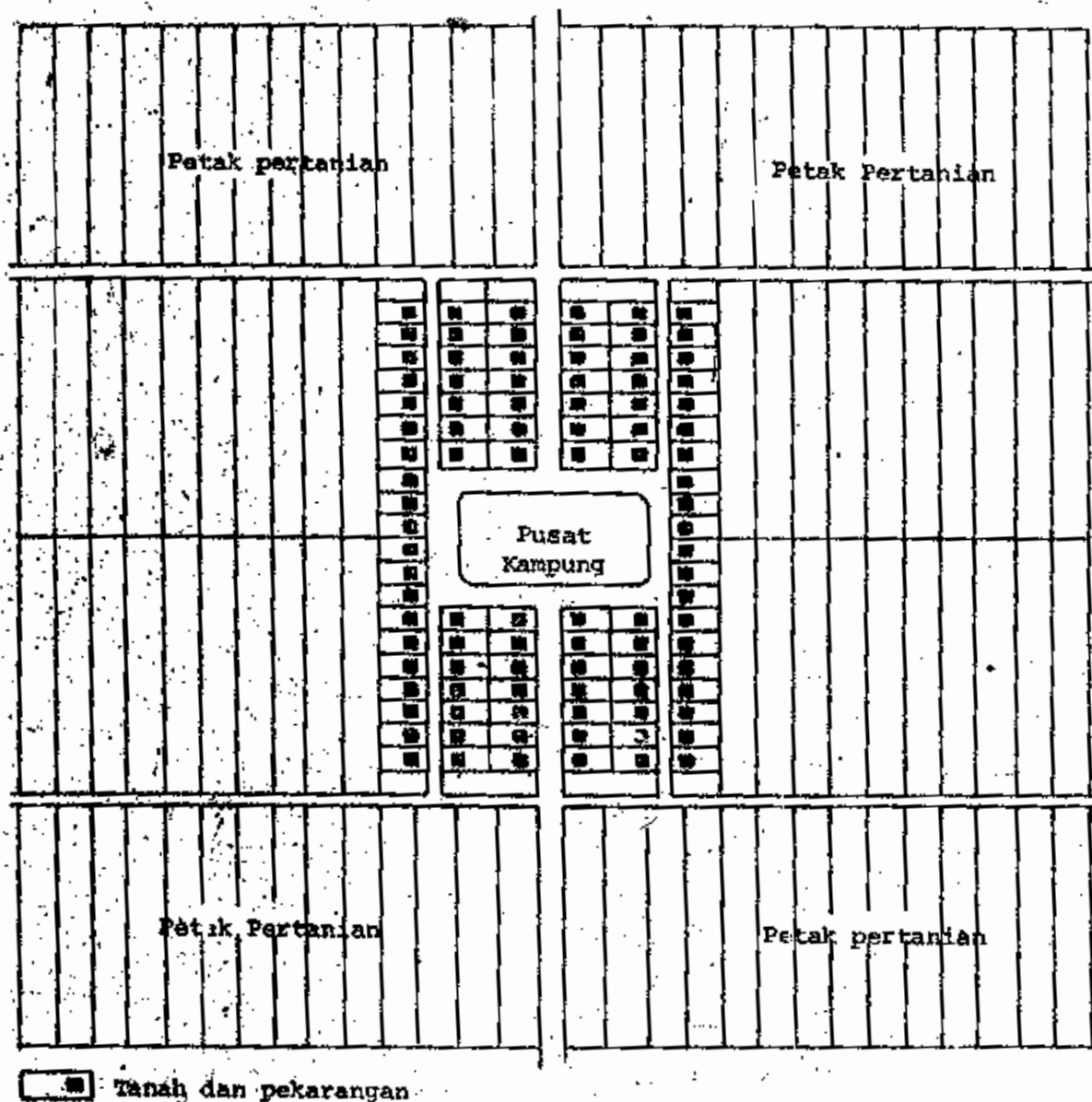
Air merupakan hal yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Di wilayah pedesaan kadang-kadang air untuk rumah tangga harus diambil dari tempat yang agak jauh dari rumah.

Jarak 500 meter dari rumah adalah cukup, untuk mengambil air bagi rumah tangga. Kampung yang besar dapat menyediakan sumur bor atau air leding. Untuk keperluan air di wilayah pedesaan, di bawah ini dicantumkan tabel konsumsi air, (Tabel no. 17).

Penyediaan sistem air di negara berkembang umumnya direncanakan untuk 50-100 tahun, dan dalam hal ini terdapat kesukaran untuk memperkirakan persediaan air bagi penduduk yang jarang di pedesaan.

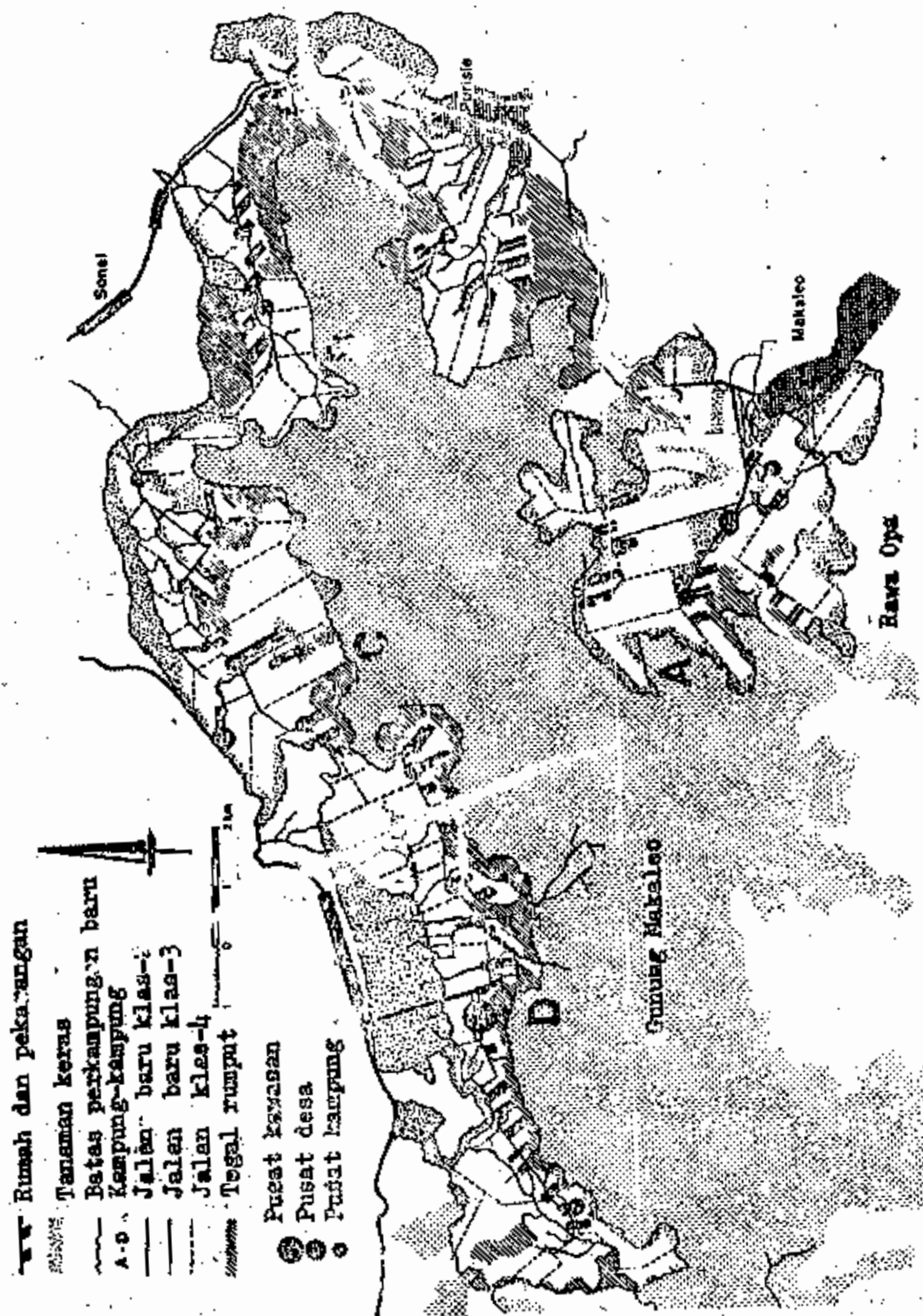
Keperluan akan air ditentukan oleh 2 faktor : 1. permintaan per kapita, 2. jumlah penduduk yang memerlukan air, yang masing-ma-

Gambar No. 14. TATA LETAK SUATU PEMUKIMAN KEMBALI DI SATU KAMPUNG
DI TAILAND



Sumber : ESCAP, 1979

RENCANA STRUKTUR PROYEK MAKALEO DI INDONESIA



TABEL NO. 14

PEMBAGIAN PENGATURAN TANAH PERTANIAN DI MAKALEO, INDONESIA

Kampung	Pengembangan tanah pada latosol menurut klas fisiografi				Tambahannya tanah untuk pengembangan balaan	Tanah yg. diusahakan untuk perluasan penggunaan, oleh penduduk setempat	Jumlah kepala keluarga pendatang, yang dapat dimasukkan ke kawanan
	B	B/F	D	Jumlah			
A	1436 (1436)	205 (256)	27 (53)	1668 (1745)	44	234	489 kk
B	1243 (1243)	95 (44)	120 (614)	1398 (1901)	290	80	482 kk
C	531 (531)	486 (607)	-	1017 (1138)	338	tak ada ket.	387 kk
D	917 (917)	277 (346)	123 (245)	1317 (1508)	388	442	487 kk
Jumlah	4127 (4127)	1003 (1253)	270 (912)	5400 (6292)	1060	756	1845 kk

Klas fisiografi B : Tanah datar, dengan potensi untuk rumah/pekarangan dan tanaman keras.

Klas fisiografi B/F : Tanah melandai dengan potensi campuran tanaman musiman dan tahunan serta tegal rumput dan tanah sisa.

Klas fisiografi D : Lereng landai pada bukit rendah, dengan potensi untuk tanaman (jerast) (jika tubuhtanah cukup dalam).

Angka dalam kurung ialah tanah bruto, hanya sebagian yang mungkin dikembangkan.

Sumber : ESCAP, 1979.

berbahaya. Misalnya, di salah satu kota di Afrika Selatan, karena perbedaan pelayanan sosial bagi penduduk, sejumlah 99% anak berkulit berwarna ketularan infeksi parasitis sedangkan anak-anak berkulit putih yang ketularan itu hanya 6%.

Mengingat pentingnya air minum dan sanitasi itu dalam kehidupan sosial, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menentukan dasawarsa 1981-1990 sebagai "Dasawarsa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Internasional".

9. Pembangunan Desa dan Perencanaan Fisik

a. Pembangunan desa dan aspek padatkarya.

Pembangunan desa ("community development") mula-mula dilakukan di India pada 1947 untuk membantu pengungsi Pakistan Barat dalam perkampungan pengungsian yang besar di Kurusetra (dekat New Delhi). Dalam perkampungan itu dilaksanakan program pemukiman yang terpadu yang meliputi pertanian, industri dan perdagangan.

Pengalaman dalam hal itu digunakan oleh India sebagai dasar dalam pembangunan desa di India pada tahun limapuluhan.

Pembangunan desa itu menitik-beratkan kepada partisipasi demokratis dari penduduk dalam bentuk berdikari, dan partisipasi itu dilaksanakan dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan, dalam pemanfaatan keuntungan, dan dalam evaluasi.

Dalam pembangunan/pengembangan desa banyak program pembangunan yang padat karya dilakukan dengan gotong royong: pembangunan sekolah, balai pengobatan, balai pertemuan, rumah dan jalan. Dalam pengembangan desa itu dapat diusahakan untuk menggabungkan pembangunan pusat pedesaan dengan kesempatan kerja. Dalam pekerjaan yang padat karya itu dapat dibuat berbagai program, seperti :¹⁷⁾

1. Program padat karya, untuk menciptakan kesempatan kerja, dalam keadaan gawat.
2. Program jangka panjang dalam penciptaan kesempatan kerja, untuk memecahkan masalah pengangguran struktural.
3. Program dalam penciptaan pendapatan, dalam pembentukan "asset" dan penciptaan kesempatan kerja.
4. Program pembentukan prasarana murah yang di Indonesia dilakukan bersama program padatkarya.

lembagaan/kepemimpinan, kekhususan dari potensi yang homogen dan hierarki yang tepat untuk pembentukan pusat wilayah pedesaan. Kekhususan wilayah yang homogen dapat ternyata dalam :

1. Kekhususan tataguna tanah (tipe penggunaan, tanaman pokok atau kombinasi tanaman, luas usahatani, tingkat teknologi, pengaturan penggarapan/sewa tanah).
2. Kekhususan demografis (penyebaran dan rapat penduduk, tingkat kelahiran, penambahan penduduk, pola migrasi).
3. Kekhususan transportasi (jaringan dan sistem).
4. Kekhususan dalam pelayanan sosial dan utilitas (air minum, pemerataan dan kondisi kesehatan, tingkat dan kondisi pendidikan, penyediaan aliran listrik).
5. Kekhususan dalam struktur sosial ekonomi (kelompok sosial-ekonomi, pola distribusi pendapatan, lembaga pengambil keputusan, kesempatan kerja dalam tiap sektor, masalah pengangguran).

Pembangunan pusat wilayah pedesaan adalah penting dalam usaha mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Fada umumnya di negara-negara berkembang terdapat perbedaan yang nyata dalam kemakmuran di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan, (Tabel no. 12). Dalam pembangunan di wilayah pedesaan yang dapat dilakukan secara terpadu, ialah perencanaan nasional (sektoral) dan perencanaan daerah serta perencanaan lokal dapat dikoordinasi, menurut urutan prioritas daerah dan prioritas sektoral, dalam : penyediaan air minum dan sanitasi, listrik pedesaan, pengangkutan dan komunikasi, kesehatan dan gizi, pendidikan, fasilitas ekonomi bagi pertanian dan industrialisasi pedesaan.

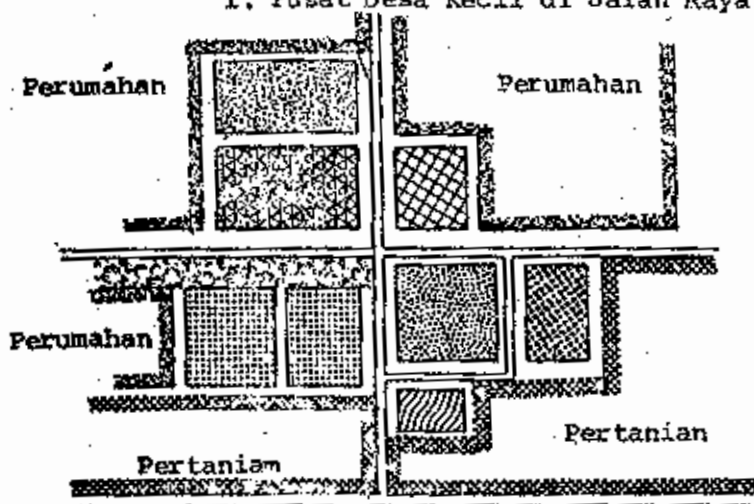
Salah satu fasilitas sosial yang penting di atas, adalah penyediaan air minum dan sanitasi (cara untuk membuang kotoran secara aman). Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organization - W.H.O.),¹⁶⁾ mengirakan bahwa, 80% dari penyakit di dunia mempunyai hubungan dengan penyediaan air minum yang kurang cukup dan kurang baik serta sanitasi yang buruk. Di beberapa negara berkembang penyakit perut dan penyakit lambung lainnya, yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor, merupakan penyebab utama dari kematian anak balita.

Sanitasi yang buruk biasanya berbarengan dengan kekurangan gizi dan keterbelakangan dalam pendidikan, yang semuanya disebabkan oleh kemiskinan.

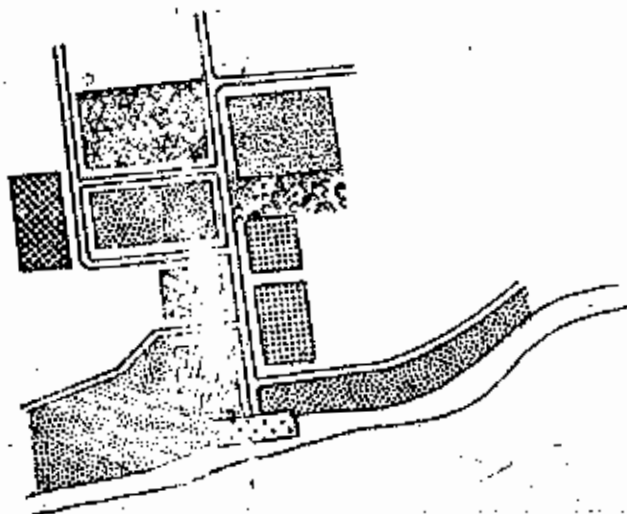
Pelayanan sosial yang kurang layak (meliputi air minum dan sanitasi) dapat

Gambar No.11. A. PUSAT DESA KECIL

























1. Pusat Desa Kecil di Jalan Raya



2. Pusat/Desa Kecil di Tepi Sungai/Danau

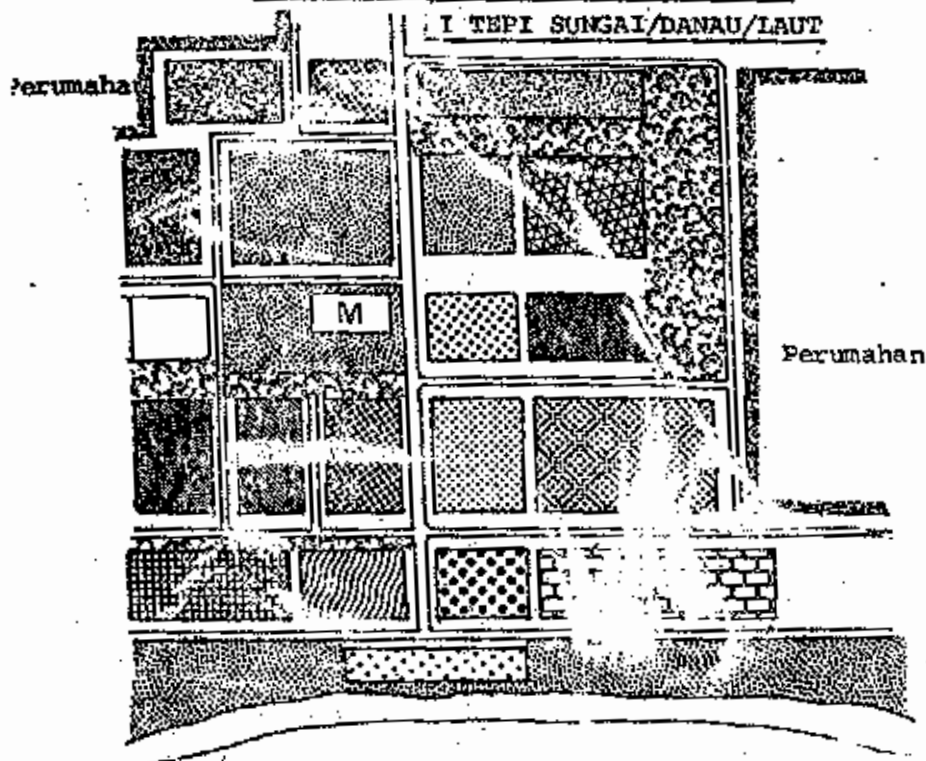


LEGENDA :

-  Kantor Desa/balai desa
-  Pertokoan
-  KUD Bank Desa
-  Pergudangan
-  Sekolah
-  Balai Remaja
-  Perumahan
-  Hiburan
-  Pemerintahan
-  Puskesmas
-  Kantor Pos
-  BUD
-  Pasar/warung
-  Surau
-  Dermaga
-  Keamanan
-  Lapangan Olah Raga
-  Alun-alun/Ruang terbuka
-  Pertanian
-  Perkembangan pergudangan
-  Masjid
-  Jalan
-  Sungai
-  Terminal darat

B. PUSAT DESA UTAMA (IBUKOTA KECAMATAN)

1. TEPI SUNGAI/DANAU/LAUT



TABEL 12.
PERBEDAAN KEADAAN DI KOTA DAN DI DESA, DI ASIA

	India	Thailand	Filipina	Malaysia Barat	Indonesia	Korea
Perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk kota terhadap keseluruhan (1960 - 1970)	1.58	1.68	1.74	2.00	2.26	2.55
% penduduk kota (1970)	20	15	32	17	18	56
% penambahan penduduk 1960-1970 yang mendapatkan kehidupan di pedesaan	75	76	55	62	70	30
Perbandingan upah di desa terhadap di kota	0,57	0,43	0,40	0,40	0,75	0,88

Sumber : ESCAP, 1979.

Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berimbang antara desa dan kota, banyak negara menunjukkan perhatiannya kepada pembangunan desa. Dalam pengembangan desa, cara yang penting adalah penyebaran (desentralisasi) kegiatan ekonomi, terutama industri, dan penyebaran pelayanan sosial dan ekonomi.

Keuntungan dari penyebaran kegiatan ekonomi itu dapat merupakan :

1. Biaya yang lebih murah untuk bangunan rumah, prasarana dan fasilitas lain.
2. Peningkatan pembangunan desa umumnya dan peningkatan hasil pertanian khususnya, yang merupakan syarat bagi pertumbuhan.
3. Berkurangnya gangguan dalam kehidupan sosial dan budaya.
4. Pembagian pendapatan (dan keuntungan lain) yang lebih merata.

Di negara-negara ESCAP perencanaan wilayah itu umumnya dilakukan dalam daerah administrasi.

Cara pengembangan pusat pedesaan adalah dengan pengembangan sistim hierarki tempat menusat ("central place"), yaitu dengan memusatkan beberapa fungsi yang dibutuhkan, sehingga terdapat dalam jangkauan penduduk pedesaan. Tiap jenis fungsi atau fasilitas harus dapat didukung/digunakan oleh sejumlah orang tertentu, dan jumlah minimal dari penduduk yang diperlukan untuk mendukung bertahannya suatu fungsi, disebut ambang ("threshold"). Menurut Richardson,¹³⁾ barang dan jasa (prasarana, pelayanan) dapat diurutkan menurut tingkatan lebih tinggi dan tingkatnya lebih rendah berhubung dengan permintaan ambang dari tiap benda/jasa itu.

Pemusatan kegiatan sosial dan ekonomi itu harus terdapat di suatu tempat yang letaknya menguntungkan bagi sebagian besar dari penduduk.

Dengan demikian beberapa kampung diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan, yang membentuk suatu hierarki: pusat terendah, pusat menengah, pusat tertinggi. Pusat terendah harus meliputi fasilitas : pendidikan, kesehatan, pemasaran dan industri pertanian.

Todaro berpendapat, bahwa perbedaan tinggi upah di kota dan di desa menyebabkan adanya arus migrasi dari desa ke kota. Ia mengemukakan,¹⁴⁾ bahwa jika upah di kota 100% lebih tinggi dari upah di desa maka perpindahan dari desa ke kota akan merupakan suatu pilihan yang rasional bagi orang desa, sampai suatu batas di mana kemudian pengangguran di kota naik mencapai 50%.

3. penyediaan fasilitas untuk pengolahan hasil pertanian bagi konsumsi sendiri dan untuk dijual.

4. penyediaan fasilitas untuk kehidupan sosial.

Di sebuah pusat wilayah perkotaan orientasi umumnya adalah lebih kepada penyebaran untuk konsumen. Jadi hanya kota lokal yang dapat dianggap pusat wilayah pedesaan.

Yang dimaksud dengan kota berdasarkan keadaan di India adalah : kota regional dalam pembicaraan ini adalah kota yang mempunyai rata-rata 50.000 - 100.000 penduduk dan melayani wilayah 7.500 - 30.000 kilometer persegi (kira-kira melayani 200.000 - 800.000 penduduk); kota distrik mempunyai rata-rata 5.000 - 25.000 orang penduduk dan melayani 700 - 7.500 kilometer persegi atau wilayah dengan radius 15 - 50 km (melayani 20.000 - 200.000 orang penduduk); kota lokal mempunyai 500 - 2.500 orang penduduk dan melayani wilayah 200 - 700 kilometer persegi atau wilayah dengan radius 7,5 - 15 km (melayani 5.000 - 20.000 jiwa).

Di Indonesia kota lokal : dapat juga ibukota yang menyediakan untuk keperluan sehari-hari, kota distrik : ibukota kabupaten, untuk pemsaran/pengangkutan, pelayanan pendidikan/keselamatan/sosial/budaya/administrasi, kota regional/ibukota propinsi, yang tidak merupakan wilayah pedesaan, melainkan merupakan penghubung dengan ekonomi nasional.

b. Koordinasi dalam "top-down approach"

Di kebanyakan negara ESCAP perencanaan pembangunan itu sifatnya dari atas ke bawah ("top-down approach") diputuskan oleh pemerintahan pusat, sehingga perencanaan daerah kurang diperhatikan dalam perencanaan nasional. Dalam perencanaan daerah diperlukan koordinasi bermacam-macam departemen dan jawatan. Koordinasi semacam itu sangat diperlukan dalam perencanaan wilayah pedesaan yang terpadu. Misalnya dalam perencanaan suatu kampung di Sri Lanka yang diikutsertakan adalah pemerintahan setempat, kegiatan perumahan nasional, jawatan perencanaan wilayah dan kota, jawatan bangunan, jawatan survei umum, jawatan kesehatan, jawatan binamarga, jawatan irigasi, jawatan industri kecil, jawatan pertanian, jawatan pendidikan, jawatan penerangan, perusahaan teknik negara, perusahaan kayu negara, perusahaan listrik Sri Lanka, UNICEF, koperasi serbaguna, suatu badan pemerintah dan seorang koordinator.

untuk peningkatan pertanian sebaiknya dibuat sistem transpor yang lebih baik, industri yang diperlukan, dan lain-lain, dengan cara-cara yang memungkinkan.

Dalam tahapan Makro ini dapat digunakan : Tahapan Sektoral (menurut saluran kementerian), tahapan Antar Daerah (program yang disebarkan ke daerah-daerah dengan keputusan nasional, seperti irigasi dan sebagainya) dan tahapan Daerah (yang menangani perencanaan daerah sesuai dengan alokasi dan proyeksi dalam tahapan Antar Daerah).

2. Tahapan Mikro, berperan dalam menangani perencanaan proyek-proyek khusus. Dalam hal ini yang penting pula adalah penentuan prioritas antara berbagai proyek, supaya mendapat keuntungan yang maksimal.
- b. Desentralisasi dalam Perencanaan

Menurut Glikson¹⁰⁾ sentralisasi adalah kesenderungan untuk memisahkan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dari suatu wilayah dalam tempat yang memusat. Dalam hubungan dengan itu desentralisasi dapat dikatakan kecenderungan untuk membagi-bagikan kekuasaan politik dan ekonomi dari suatu wilayah yang luas kepada tempat-tempat tertentu, supaya segala hal dapat berfungsi secara tepatguna.

Dalam desentralisasi perencanaan terdapat beberapa bagian, yaitu :

- Kebijakan umum diputuskan oleh pemerintahan pusat, yakni mengenai kegiatan nasional dan internasional: keuangan, perpajakan, dan sebagainya.
- Kebijakan daerah oleh pemerintah daerah yakni mengenai kegiatan daerah, perencanaan wilayah pedesaan, dan sebagainya.
- Kebijakan lokal (di Indonesia misalnya: kabupaten: perencanaan lokal, mengenai antara lain : perencanaan fisik dari pusat wilayah pedesaan tertentu).

Menurut Lasswell¹¹⁾ untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan :

1. Fungsi inteligensi, yaitu dengan pengumpulan informasi yang relevan.
2. Rekomendasi dari beberapa alternatif kebijakan yang mungkin diambil.
3. Rekomendasi dan pemilihan salah satu alternatif.
4. Keputusan untuk alternatif yang terpilih.

tiap ekosistem dapat mengalami perubahan dan mencapai batas kemampuan ("point of no return"). dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga akibatnya adalah : erosi, perusakan tanah, penggundulan hutan, dan sebagainya.

Harus diingatkan pula bahwa di negara industri maju, suatu pertumbuhan ekonomi berarti pula peningkatan pencemaran (polusi).

Dalam hubungan dengan hal itu negara-negara berkembang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar itu dengan produksi yang padat karya dan produksi yang sederhana seperti industri kecil, dan sebagainya, dan tidak terlalu mengusahakan industri besar yang padat modal (di mana hasilnya belum tentu dapat menyaingi produksi dari negara maju), dan menimbulkan polusi.

Untuk dapat memajukan harus diperhatikan dua hal :

- Perencanaan yang teliti dalam : penentuan industri yang sesuai bagi kawasan tertentu, pengumpulan data, pembuatan program, pelaksanaan dan tindakan lanjut.
- Mempersatukan rencana industrialisasi itu dengan perencanaan pusat wilayah pedesaan.

4. Pembangunan desa terpadu

Pada jaman dahulu, pedesaan di Asia bukan hanya menghasilkan hasil pertanian saja melainkan juga hasil industri (hasil kerajinan tangan), sehingga di desa itu fungsi pertanian dan fungsi industri ada dalam keadaan seimbang. Setelah terjadi Revolusi Industri di Eropa, maka hasil kerajinan tangan itu kalah bersaing dengan hasil industri b́atara: mesin dari Eropa, dan wilayah pedesaan ekonominya mundur.

Untuk memperbaiki keadaan, maka pada dewasa ini dapat dikembangkan kembali industri pedesaan. Salah satu metoda yang mengembangkan industri pedesaan adalah Pembangunan Desa Terpadu.

Menurut Waterson⁹⁾ dalam Pembangunan Desa Terpadu itu dapat dimasukkkan 6 hal yang penting :

1. Pengembangan pertanian yang padakarya
2. Pekerjaan Umum kecil yang menciptakan kesempatan kerja

(Robah nilai harga tiap satuan, disesuaikan dengan harga sekarang di kabupaten atau propinsi Sdr. 1)

TABEL NO. 11

HARGA 9 BAHAN POKOK DAERAH BARAT

104

Barang	Harga
1. Beras 100 kg a' Rp. 120,-	Rp. 12.000,-
2. Ikan Asin 15 kg a' Rp. 380,-	Rp. 5.700,-
3. Gula Pasir 6 kg a' Rp. 200,-	Rp. 1.200,-
4. Tekstil Kasar 4 mt a' Rp. 260,-	Rp. 1.040,-
5. Minyak Goreng 6 kg a' Rp. 340,-	Rp. 2.040,-
6. Minyak Tanah 60 lt a' Rp. 28,-	Rp. 11.680,-
7. Garam 9 kg a' Rp. 45,-	Rp. 405,-
8. Sabun 20 bt a' Rp. 135,-	Rp. 22.700,-
9. Kain Batik Pasar 2 pr a' Rp. 840,-	Rp. 1.600,-
Jumlah	Rp. 28.445,-

Keterangan :

Dengan menggunakan harga setempat, maka dihitung nilai rupiah dari kebutuhan hidup minimum per kapita akan keperluan 9 (sembilan) bahan pokok.

Besarnya standar kebutuhan hidup minimum per kapita tersebut dijadikan sebagai "garis kemiskinan".

Tambahan :

Klasifikasi Daerah Miskin

Dengan adanya angka taksiran pendapatan per kapita (dalam rupiah) dan nilai rupiah dari kebutuhan hidup minimum per kapita akan keperluan 9 (sembilan) bahan pokok ("garis kemiskinan"), maka kecamatan-kecamatan di tiap kabupaten di Propinsi Jawa Barat dapat diklasifikasikan.

Dengan anggapan bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup sekunder adalah 2 kali kebutuhan hidup minimum (+100%), maka daerah-daerah kecamatan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelas, yaitu :

Linat lanjutannya.

oleh kekurang-mungkinan untuk bersaing secara bebas dalam berbagai kegiatan, sedangkan ketidak-rataan ekonomi artinya lebih sederhana, yaitu perbedaan dalam kemakmuran dan pendapatan. Antara ketidak - rataan sosial dan ketidak-rataan ekonomi terdapat hubungan yang erat, karena ketidak-rataan sosial merupakan penyebab utama dari ketidak-rataan ekonomi, dan ketidak-rataan ekonomi memperbesar ketidak-rataan sosial. Dengan demikian dalam penumpasan kemiskinan, pemerataan yang lebih baik itu merupakan syarat yang utama.

Menurut Myrdal itu yang menyebabkan bahwa pemerataan yang lebih baik, di negara berkembang hampir merupakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, adalah :

- a. Pendapat umum bahwa pendapatan yang tidak merata merupakan kondisi untuk menabung bagi negara berkembang kurang berlaku, karena di negara-negara berkembang itu tuan tanah dan orang kaya sering menggunakan pendapatannya untuk konsumsi yang sangat berlebihan, dan kadang-kadang modal dapat lari ke luar negeri.
- b. Karena rakyat kekurangan gizi dan perumahannya buruk, kesehatan dan pendidikannya kurang baik, sehingga produktivitasnya rendah. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan produktivitas.
- c. Ketidak-rataan sosial saling mempengaruhi dengan ketidak-rataan ekonomi, kedua-duanya dapat merupakan sebab dan akibat. Pemerataan ekonomi cenderung menyebabkan pemerataan sosial. Jika ketidak-rataan sosial berpengaruh buruk bagi pembangunan, pemerataan sosial yang lebih baik dapat menyebabkan produktivitas yang tinggi.
- d. Pemerataan merupakan keadilan sosial dan baik pengaruhnya bagi integrasi nasional.

Kemajuan dalam usaha mencapai pemerataan harus dengan menitikberatkan perhatian kepada sebagian besar dari penduduk, yaitu penduduk yang miskin. Penduduk miskin umumnya pasif, apatis dan tidak dapat mengusahakan sendiri perbaikan itu, sehingga pemerataan tersebut harus direncanakan dalam pembangunan itu.

⁸ Myrdal, G., *The Challenge of World Poverty: A World Anti - Poverty Program in Outline*, A Penguin International Edition, Harmondsworth, Middlesex, England, 1971, hln. 68.

Misalnya penjalaran perkembangan dari kota yang sedang tumbuh menyebabkan meningkatnya produksi pertanian; dan proses penarikan dari kota menyebabkan pindahnya modal dari kawasan yang tidak maju ke kawasan yang maju.

Kedua teori dari Hirschman dan Myrdall itu, mengandung unsur pemikiran Perroux yang disebut "pertumbuhan kutub".

Rondinelli dan Rudle⁵⁾ mengemukakan tentang teori itu : pendapat Hirschman yang optimis mengenai penyesuaian perkembangan kepada wilayah yang terbelakang pada kenyataannya adalah tak beralasan, dan dalam hal tersebut Myrdall berpendapat bahwa penarikan sering lebih kuat daripada penjalaran. Berhubung tenaga pemusatan itu sering lebih kuat, maka penjalaran itu harus diperkuat dengan pengaturan pemerintah, dan hal ini memerlukan kegiatan perencanaan regional.

- b. Perroux (1951) mengemukakan konsep Pertumbuhan Kutub ("Growth Pole") yang berisi pengertian bahwa kutub pertumbuhan, yakni yang merupakan kegiatan industri (pabrik-pabrik), mempunyai potensi pertumbuhan yang kuat. Pendapatnya adalah bahwa suatu industri dasar yang berkembang mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Perroux berpendapat bahwa dalam hal itu akan terjadi pemusatan teritorial dari bermacam-macam industri yang saling berhubungan, tetapi ia tidak mengemukakan, bahwa hal yang sebaliknya yaitu bahwa penempatan macam-macam industri yang dipusatkan pada lokasi tertentu akan menyebabkan percepatan pertumbuhan.⁶⁾ Berhubung dengan itu penggunaan teori Pusat Pertumbuhan harus dilakukan secara hati-hati.

Konsep Perroux itu hanya mengandung dasar yang lemah bagi kebijaksanaan menurut ruang ("spatial"). Karena kekeliruan yang berhubungan dengan hal tersebut, sering terjadi bahwa suatu industri besar didirikan di kota sebagai obat mujarab bagi pertumbuhan regional, dan ternyata kemudian bahwa hasilnya tak memuaskan.

- c. Hubungan pusat-pinggiran ("centre-periphery").

Dalam pengembangan regional, Friedmann mengemukakan pendapat mengenai kaitan antara pusat pertumbuhan dalam wilayah dan interaksi serta teori dalam modernisasi.

Ia berpendapat bahwa suatu negara mempunyai dua bagian tertentu, yang disebut inti ("core") dan pinggiran ("periphery").

pada sektor pertanian dengan peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri, sehingga berkesimpulan : perkembangan hanya terwujud dengan proses akumulasi (pemusatan) modal pada sektor modern (di kota !) dan penyerapan tenaga buruh dari sektor pertanian ke dalam sektor industri. Teori ini adalah berdasarkan perkembangan ekonomi di negara maju setelah Perang Dunia ke-II, jadi pada tahun limapuluhan. Untuk kehidupan sosial banyak ahli sosiologi tertarik oleh teori Boeke dan berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang dapat mengubah kehidupan tradisional menjadi kehidupan yang lebih maju teknologinya. Menurut Rogers,³⁾ modernisasi adalah suatu proses dalam tingkatan perorangan, di mana orang berubah dari cara hidup yang tradisional kepada cara hidup yang lebih kompleks, yang meliputi perubahan-perubahan yang cepat serta peningkatan teknologi. Maka Diusahakan supaya masyarakat mendapat : pendidikan, komunikasi dan jalan-jalan, dan sebagainya, karena hal itu dapat menjalarkan perkembangan, yang sesuai dengan aliran Difusi. Tetapi dalam hal itu terdapat kendala dari petani tradisional yang sukar menyesuaikan diri dalam proses produksi secara modern. Hal ini disebabkan bukan karena petani itu tidak rasional, tetapi berhubung dengan kondisi tertentu, misalnya bahwa mereka tidak mau menanggung risiko yang besar.

Yang menjadi penyebab kurangnya penyesuaian para petani itu dalam banyak hal adalah kemiskinan dan kekhawatiran akan kelaparan serta kurangnya penerangan di samping tradisi tertentu. Bagi penduduk wilayah pedesaan yang miskin, segala kegiatan yang memberi hasil yang cepat sehingga mereka dapat terhindar dari perasaan lapar, akan mendapat sambutan baik. Dengan demikian segala program untuk perubahan yang menuju perbaikan itu harus pula mengandung usaha penanggulangan dalam kekurangan makanan pada tahap permulaan dari program itu.

- b.2. Pada pertengahan tahun enam puluhan terdapat suatu teori yang disebut teori Ketergantungan Sepihak ("Dependency theory") yang memusatkan perhatiannya kepada : ketergantungan ekspor, substitusi impor, nilai tukar, campurtangan pemerintah, integrasi wilayah dan sebagainya. Stagnasi ekonomi serta kemiskinan negara yang sedang berkembang dihubungkan dengan hal-hal tersebut di atas. Ekonomi yang bergantung

d. Perencanaan pusat wilayah pedesaan tersebut dimulai dari tingkat nasional, dan kemudian akan dilanjutkan oleh tingkat daerah.

Dalam pembangunan terdapat dua hal : 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya. Kedua teori tersebut digabungkan menjadi suatu model, yaitu model Redistribusi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi dipusatkan di tempat-tempat kecil, dalam perusahaan-perusahaan kecil dengan partisipasi penduduk lokal secara maksimal. Dalam menyebar proyek kecil yang banyak itu, pemerintah mengusahakan koordinasi berbagai departemen supaya terdapat bekerjasama, sehingga hasilnya baik. Perencanaan pusat wilayah pedesaan adalah suatu model yang harus melibatkan tiga model lainnya yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang maksimum,
- b. Pembagian yang adil dari kesejahteraan,
- c. Memperkecil pengaruh perusakan lingkungan alam.

Ketiga hal tersebut dalam melakukan perencanaan pusat wilayah pedesaan harus diperhatikan, supaya wilayah pedesaan mendapat peranan penting dalam ekonomi nasional. Yang menjadi kendala adalah kurangnya modal dan kurangnya angkatan kerja yang terlatih, sehingga penanganan pengembangan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang agak panjang.

2. Kesejahteraan yang Belum Merata

Pada jangka waktu 1950 - 1960 kebanyakan negara ESCAP melakukan strategi percepatan industrialisasi dan pengembangan perkotaan. Karena wilayah pedesaan kurang mendapat perhatian, perbedaan kemakmuran di wilayah perkotaan dan pedesaan makin menjadi besar, penduduk banyak yang bergerak pindah ke kota-kota sehingga timbul masalah perkotaan.

Di beberapa negara berkembang telah berlangsung pertumbuhan ekonomi tetapi tidak disertai dengan perkembangan, sehingga kenaikan GNP yang cepat pada duapuluh tahun tahun terakhir ini kurang disertai dengan hilangnya atau berkurangnya : pengangguran, bahaya kelaparan, kekurangan gizi, yang merupakan tanda-tanda kemiskinan.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang mendapat keuntungan adalah orang-orang yang mendapat hubungan dengan alat produksi, yaitu : tanah, modal dan keterampilan. Untuk mendapatkan pembagian yang adil dari keuntungan, memu-

22. Thomas, W.L. Jr., Man's Role in Changing the Face of the Earth; Ordway, S.H. Jr.: Possible limits of raw material consumption, The University of Chicago, Illinois, 1962, hln. 107.
23. Jain, R.K., Urban, L.V., Stacey, G.S., Environmental Impact Analysis, Van Nostrand Reinhold Company, New York - Cincinnati - Atlanta - Dallas - San Francisco - London - Toronto - Melbourne, 1981, hln. 2.
24. Suriaatmadja, Dr. R.E., Metoda dan Teknik Analisis Dampak Lingkungan, Kursus Dasar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan ke-4, Bandung, 1983, hln. 14-17.
25. Koyen, Van W., and Bengtson, N.A., Fundamentals of Economic Geography, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1971, hln. 559.
26. Mosely, M.J., Harman, R.G., Coles, O.B., and Spencer, M.B., Rural Transport and Accessibility, Volume 1 Main Report, Centre of East Anglian Studies, University of East Anglia, Norwich, U.K., 1977, hln. 89.
27. Ibid.
28. Ibid, hln. 90.
29. Ibid, hln. 87.
30. Ibid, hln. 270.
31. Ibid, hln. 288-289.

16. "Block Level Planning" di India

Mulai 1970 India melakukan "block level planning" dalam pembangunan desanya.

Suatu "block" dapat dibandingkan dengan kecamatan di Indonesia. Di India seluruh negara dibagi menjadi negara-bagian ("state") dan negara-bagian dibagi menjadi distrik serta distrik dibagi menjadi "block". Suatu distrik adalah wilayah administrasi, tetapi suatu "block" bukan merupakan wilayah administrasi tetapi wilayah pembangunan yang berpenduduk kira-kira 125.000 jiwa. Sebuah "block" biasanya mempunyai satu atau dua kota. Di India terdapat 5000 "block" (dari 320 distrik).

Tiap "block" mempunyai beberapa desa ("panchayat") dengan kira-kira 15.000 jiwa penduduk, dan tiap panchayat mempunyai beberapa kampung ("gram").

Dalam "block level planning" itu diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dengan meningkatkan produksi. Metoda yang digunakan adalah gabungan pendekatan dengan kebutuhan pokok dan pendekatan dengan berdasarkan pendapatan.

Dalam pembangunan desa itu dipentingkan belajar bertindak bekerja untuk perbaikan ("action learning") dalam kegiatan pembangunan desa ("action for voluntary rural development") itu. Dibuatlah bermacam-macam proyek pedesaan: jalan-jalan yang menghubungkan kampung-kampung, sekolah, balai pengobatan dan sebagainya. Tenaga kerja yang dikerjakan adalah tenaga lokal yang menerima imbalan dengan bahan makanan dan sedikit uang (semacam proyek padatkarya). Tiap tahun kesempatan kerja meningkat dan investasi untuk hal itu tidak begitu besar. Salah satu hal yang penting adalah penciptaan kesempatan kerja.

"Block level planning" ini dimulai di negara-bagian Bihar, di India dengan bantuan beberapa organisasi internasional.

juga barang dari luar, hal itu semua memerlukan sistem pengangkutan. dan Prasarana yang diperlukan adalah jalan (sungai), terminal dan penyeberangan.

Belum terdapat suatu cara untuk meningkatkan dayacapai wilayah pedesaan yang dapat digunakan secara umum. Hal yang penting adalah menggabungkan sumberdaya manusia yang tersedia dan sumberdaya alam yang tersedia untuk mencapai tujuan itu.

Yang merupakan tantangan tidak terletak pada hal-hal teknis tetapi pada cara pengelolaan.

Dalam penyediaan pelayanan pengangkutan di pedesaan seringkali harus diperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. Kebutuhan orang yang miskin dan orang yang tua (dibandingkan dengan orang yang kaya dan orang muda).
2. Kampung yang kurang pelayanannya (dibanding dengan kampung yang telah terdapat berbagai pelayanan).
3. Jangkauan untuk balai pengobatan (dibanding dengan jangkauan untuk rekreasi atau perpustakaan.
4. Waktu yang dihabiskan di tempat tujuan untuk berbagai kegiatan (dibanding dengan waktu yang dihabiskan dalam perjalanan).

Sebagai contoh diambil cara pengangkutan di wilayah pedesaan Inggris yang terdiri atas : 1. kendaraan pribadi, 2. bus (yang konvensional ((dapat juga bus itu untuk mengangkut anak sekolah atau untuk perpustakaan keliling atau balai pengobatan keliling atau warung keliling atau untuk surat-surat dari kantor pos), 3. kereta api, 4. taksi panggilan, dan 5. cara pengangkutan yang tidak konvensional yang terdiri atas kendaraan-kendaraan bermotor yang kecil, atau cara pengangkutan yang digunakan untuk bantuan.

Di wilayah pedesaan Indonesia pada dewasa ini banyak digunakan alat pengangkutan yang kecil-kecil itu. Menurut Mosely dan rekan,³¹⁾ di wilayah pedesaan harus terdapat lebih banyak kesediaan untuk memecahkan masalah pelayanan pengangkutan itu dan kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan pengangkutan itu terdapat pada pengangkutan yang tidak konvensional itu ; karena alat angkutan konvensional itu umumnya mempunyai peranan penting dalam beberapa hal tertentu.

14. Pengangkutan di Pedesaan

Pergerakan manusia dan barang dari tempat tertentu ke tempat yang lain, memerlukan waktu dan tenaga untuk menjembatani jarak antara tempat-tempat itu. Pertukaran dari berbagai wilayah memerlukan pengangkutan. Menurut Van Royen dan Bengtson²⁵⁾ tenaga dan waktu yang digunakan dalam pengangkutan serta biaya alat angkutan, harus dibayar oleh sipemakai.

Perjalanan ke tempat bekerja adalah hal yang pertama harus diperhatikan. Umumnya di pedesaan orang dapat berjalan kaki ke tempat bekerja, dengan mudah sebanyak ± 20 menit atau $1-1\frac{1}{2}$ km, tetapi di perkebunan (misalnya dalam P.I.R) petani biasa berjalan kaki sampai ± 5 km.

Jarak yang lebih jauh lagi diusahakan dengan kendaraan.

Dalam pemilihan alat pengangkutan transportasi umumnya yang diperhatikan bukan biaya saja tetapi juga kecepatan dan kesenangan, serta hal-hal lain. Sistem pengangkutan di wilayah pedesaan adalah penting, karena dapat meningkatkan dayacapai atau aksesibilitas.

Mosely & Zaner²⁶⁾ mengemukakan bahwa aksesibilitas (dayacapai) secara fisik mengandung pengertian bahwa seseorang dapat menguasai pelayanan pengangkutan yang diperlukan, untuk mencapai tempat yang dimaksud dalam waktu yang layak.

Menurut Daily²⁷⁾ dayacapai fisik adalah : kemampuan orang untuk mencapai tempat tujuan di mana ia dapat melakukan kegiatan tertentu.

Dayacapai penting untuk daya gerak (mobilitas).²⁸⁾

Dayagerak atau mobilitas menurut Moseley dan Temon adalah kemampuan orang untuk mengadakan pergerakan, yang bergantung kepada keadaan fisik orang tertentu, keuangannya, penyediaan alat transport dan prasarananya. Mobilitas penduduk (misalnya : perpindahan, dan sebagainya) dapat mengubah kehidupan sosial-ekonomi penduduk dan susunan demografi penduduk.

Perubahan pola jalan atau perubahan penyediaan alat angkutan akan mengakibatkan perubahan aksesibilitas yang merupakan potensi bagi peningkatan kehidupan sosial ekonomi dan perubahan secara demografis.

Tataguna tanah sangat ditentukan oleh keadaan seluruh penduduk, oleh jumlah penduduk, sifat penduduk, penyebaran penduduk dan tingkat teknologi serta ekonomi penduduk.

Dalam penggunaan tanah misalnya untuk kegiatan sosial-ekonomi, harus diusahakan supaya lingkungan tetap lestari. Yang dimaksud dengan lingkungan an²³⁾ di sini adalah lingkungan alam dan lingkungan binaan dan hubungan manusia dengan alam yang meliputi aspek-aspek estetik, sejarah, budaya, ekonomi dan sosial.

Tiap kegiatan ekonomi penduduk menyebabkan pengaruh tertentu terhadap lingkungan hidup, yang disebut dampak lingkungan.

Menurut Suriaatmaja²⁴⁾ daftar dari unsur-unsur lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh berbagai tindakan manusia telah disusun oleh "U.S. Geological Survey", seperti yang tercantum di bawah ini :

- A. a. Bumi : sumber mineral, bahan konstruksi, tubuh tanah, bentuk daratan, medan gaya dan radiasi latar, bentuk fisis bumi yang baik.
- b. Air : air permukaan, air laut, air tanah, kualitas air, suhu air, tambahan (kembali) air,
- c. Atmosfera : kualitas udara (kandungan gas, partikel), iklim (mikro dan makro), suhu.
- d. Proses : banjir, longsor, endapan (sedimentasi, curahan), larutan, pertukaran ion, perpadatan, penstabilan, gempa bumi, pertukaran udara

B. Kondisi Biologi :

- a. Flora : pohon, perdu/semak, rumput/herba, tanaman pertanian, mikroflora, tumbuhan akuatik, jenis (tumbuhan) langka.
- b. Fauna : burung, hewan darat, termasuk reptilia, ikan dan siput, organisme hidup di dasar sungai atau dasar danau (bentik), serangga, mikrofauna, jenis (hewan) langka.

C. Faktor Budaya

- a. Tataguna Tanah ; kawasan terbuka, kawasan rawa/genangan, hutan, kawasan penggembalaan, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan tambang dan galian.
- b. Rekreasi : kawasan perburuan, kawasan perikanan/tempat umuioing, tempat berlayar/mendayung, kawasan wisata/tempat piknik, tempat istirahat/daerah peristirahatan.

- m. Perbedaan jasmaniah kurang mendorong akulturasi.
- n. Tradisi dan keadaan yang demokratis mungkin dapat mendorong asimilasi.
- o. Fleksibilitas dari suatu kebudayaan dapat membantu perubahan kebudayaan.
- p. Kesadaran akan adanya bahaya bagi umum dari luar, mendorong loyalitas untuk sementara dan membantu asimilasi.
- q. Ancaman terhadap wilayah asal, sering menghidupkan kembali hubungan migran dengan wilayah asal itu.

Umumnya yang sangat mendorong dalam akulturasi adalah kesempatan ekonomi, keadaan yang demokratis, nilai-nilai kebudayaan yang sama, dan sebagainya.

Taft dan Robbins mengidentifikasi hal-hal tersebut di atas berhubungan dengan migrasi internasional; dan hal itu dicantumkan di sini karena ada beberapa yang berlaku bagi para transmigran.

Untuk mendorong kerjasama dan akulturasi/asimilasi dan untuk menanggulangi persaingan dan perselisihan di wilayah penerima dapat diadakan usaha-usaha tertentu.

Dalam lingkungan pemukiman prasarana sosial-ekonomi harus mudah dicapai, di samping itu orang-orang harus bertempat tinggal dekat dengan tetangga dan juga berdekatan dengan tempat bekerja.

Penggunaan prasarana sosial ekonomi dalam lingkungan pemukiman itu mungkin dapat merupakan salah satu alat dalam akulturasi, misalnya dalam masyarakat transmigran yang mempunyai mesjid atau balai desa yang merupakan pengikat dalam lingkungannya, prasarana itu dapat disediakan untuk digunakan bersama oleh masyarakat pendatang dan masyarakat penerima. Selain itu prasarana pengikat itu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang sesuai bagi prasarana itu, sehingga frekuensi penggunaan bersama dapat lebih tinggi. Mungkin juga lembaga koperasi dan lembaga sosial desa atau lembaga lainnya, dapat memberi bimbingan dan pengarahan dalam kerjasama itu, sehingga kehidupan di wilayah pedesaan transmigrasi dapat berlangsung dengan baik.

Interaksi sosial antara penduduk asal dan penduduk pendatang berlangsung sebagai akibat dari kegiatan yang berlaku antara kedua kelompok

TABEL NO. 9

KAWASAN PERTANIAN 1963-1973 (DALAM RIBUAN HEKTAR)

	1963	1973	Perubahan dalam luas	Perubahan dalam %
Pertanian rakyat	<u>12,884</u>	<u>14,168</u>	+ 1,284	10,0
Jawa	5,647	5,505	- 142	-2,5
Luar Jawa	7,237	8,663	+ 1,426	19,7
Perkebunan besar	<u>1,591</u>	<u>2,226</u>	+ 635	39,9
Jawa	524	678	+ 154	29,4
Luar Jawa	1.066	1.548	+ 482	45,2
Jumlah	<u>14,475</u>	<u>16,394</u>	+ 1,919	13,3
Jawa	6.171	6.183	12	0,2
Luar Jawa	8.303	10,211	+ 1,908	23,0

Sumber : A World Bank Country Study, 1980

TABEL NO. 10

KEADAAN PERUBAHAN SAWAH DI INDONESIA MENURUT PULAU¹⁾
(DALAM RIBUAN HEKTAR)

	1963	1973	Perubahan (hektar)	Perubahan (%)
Jawa	2,528	2,618	90	3,6
Sumatra	779	1,037	258	33,1
Kalimantan	278	437	156	56,1
Sulawesi	247	445	198	80,2
Bali	73	81	8	11,0
Nusa Tenggara	170	210	40	23,5
<u>Indonesia²⁾</u>	4,075	4,825	750	18,4

Sumber : A World Bank Country Study, 1980.

- 1). Tanah pertanian yang kurang dari 0,1 hektar tidak dihitung.
- 2). Maluku dan Irian Jaya tidak dihitung.

Hal itu disebabkan karena modal terkumpul di kota-kota akibat sistim ekonomi ruang yang menyebabkan struktur dualistik : perkotaan yang bertumpu pada kegiatan industri merupakan pusat, dan pedesaan yang bertumpu pada pertanian menjadi pinggiran.

Menurut Peet²⁰⁾ ada 5 hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan wilayah untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan itu :

1. Pemilikan alat produksi, misalnya tanah oleh pengusaha/penggarap (atau juga secara koperasi).
2. Sifat pengembangan ekonomi harus dipilih, supaya penduduk dapat memperoleh pendapatan yang cukup, dengan modal dari bantuan pemerintah pada tahap pertama.
3. Diusahakan desentralisasi industri ke pedesaan yang berguna juga dalam melestarikan unsur-unsur sosial-budaya lokal (tidak berurbanisasi).
4. Pengembangan dilakukan dengan perencanaan sosial-ekonomi komprehensif dan dinamis.
5. Mengikutsertakan partisipasi dan pengalaman penduduk dalam pelaksanaan rencana.

Pada dewasa ini untuk mengurangi/menghilangkan perbedaan kemakmuran di perkotaan dan pedesaan sering dilakukan desentralisasi industri, yaitu menyebar industri ke pedesaan.

Beberapa negara telah menyebarkan industrinya ke kampung-kampung di pedesaan.

Hongaria²¹⁾ telah menggunakan perencanaan perkotaan dan pedesaan sebagai alat politik dalam distribusi sumberdaya bagi penduduk dari berbagai kawasan. Sebagai hasilnya struktur matapencaharian penduduk: dalam 1970^{21a)} sejumlah 50% dari penduduk Hongaria yang bertatapencarian di pertanian, sedangkan dalam 1978 hal itu hanya 30%.

Dalam pembangunan di Indonesia, dalam Pelita I : : telah dipertahankan untuk peningkatan pendapatan nasional (G.N.P.). Sesudah pendapatan nasional naik, sejak Pelita III kebijaksanaan dalam pembangunan adalah: penciptaan kesempatan kerja dan pembagian pendapatan yang merata.

Dalam pemukiman hal itu dilakukan dengan mendorong kegotong-royongan, menyediakan pelayanan umum seperti air minum dan sumber tenaga, dan memberikan pinjaman bagi pembangunan/pemugaran perumahan. Dalam Repelita IV

Pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi seluruh rakyat. Hasil pembangunan dapat diukur dari segi ekonomi yaitu dengan kenaikan Gross National Product (GNP) per kapita. Tetapi hal itu tidak menjelaskan penyebaran/distribusi dari hasil pembangunan itu, sebab ada kemungkinan GNP naik tetapi kesejahteraan penduduk tidak tampak naik karena peningkatan hanya terjadi pada lapisan atas yang kecil saja. Karena itu diperlukan juga pengukuran dari segi sosial. Pengukuran kesejahteraan sosial dapat secara subyektif (misalnya: senang, aman, bahagia) dan dapat juga secara obyektif, yaitu mengukur hal-hal yang nyata dapat diukur.

Pembangunan di Indonesia sebagai hasil Pelita I dan II dilihat dari kenaikan GNP per kapita, hasilnya telah baik, tetapi tampak bahwa kesejahteraan belum merata. Maka sejak Pelita III diadakan usaha untuk pemerataan hasil pembangunan yang dituangkan dalam Delapan Jalur Pemerataan.

Dalam pengukuran kesejahteraan sosial yang mengandung

unsur-unsur sosial ekonomis, dapat digunakan cara tertentu, misalnya dengan metoda "Physical Quality of Life Index" (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup secara Fisik), yang dikemukakan oleh Morris.

Yang menggunakan tiga indikator: 1. angka kematian bayi, 2. harapan hidup bagi penduduk, dan 3. angka melek huruf.

Di Indonesia dalam pengukuran sosial dari hasil pembangunan itu DAPFENAS digunakan berbagai aspek sebagai indikator : 1. Kependudukan (termasuk keluarga berencana dan transmigrasi), 2. Kesehatan (termasuk gizi), 3. Tenaga kerja, 4. Pendidikan dan kebudayaan, 5. Kesejahteraan sosial (suku terasing, orang jompo, Yayasan anak yatim piatu, dsb.). 6. Perumahan, 7. Keamanan dan ketertiban masyarakat. 8. Agama., 9. Umum (hal-hal lain yang mempunyai arti cukup penting).

Dalam tiap indikator tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang dapat diukur. Dari hasil pengukuran unsur-unsur tersebut mungkin dapat ternyata pola penyebaran hasil pembangunan itu, sehingga dapat diambil tindakan selanjutnya dalam rencana pembangunan untuk pemerataan itu, baik dalam pengembangan pedesaan maupun dalam pengembangan perkotaan.

TABEL NO. 8
 TERDAPATNYA KEMISKINAN DAN PENYEBARANNYA, 1976 (DALAM %)

Wilayah	Perkotaan		Pedesaan	
	Terdapat di masing-wilayah	Penyebaran dari keseluruhan	Terdapat di masing-wilayah	Penyebaran dari keseluruhan
I. Sumatra	13.5	14.1	28.5	10.1
II. Jawa	20.7	70.2	58.7	73.8
Jakarta	(7.5)	(9.1)	-	-
Jawa Barat	(24.8)	(26.1)	(40.7)	(15.7)
Jawa Tengah	(33.4)	(19.1)	(67.8)	(26.7)
Jogjakarta	(21.5)	(2.1)	(60.5)	(2.5)
Jawa Timur	(28.0)	(23.9)	(66.3)	(29.0)
III. Bali dan Nusa Tenggara	27.4	3.7	49.5	6.1
IV. Kalimantan	13.9	4.8	17.3	1.4
V. Sulawesi	15.7	6.1	45.0	6.4
VI. Maluku	31.2	1.2	51.9	2.2
Indonesia	18.7	100.0	50.2	100.0

Sumber : A World Bank Country Study, 1980.

Keterangan : Bagian penduduk dengan pengeluaran untuk konsumsi kurang dari Rp. 33.000 per bulan per orang.

3. untuk 25.000 - 50.000 jiwa; satu poliklinik atau satu rumah sakit pembantu.
4. untuk 50.000 jiwa ke atas: satu rumah sakit umum (RSU).
5. tiap kecamatan: satu klinik gigi dan satu balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) yang mungkin tergabung dalam Puskesmas.
6. untuk kota berpenduduk 25.000 - 50.000 ke atas, diperlukan satu apotik.
7. satu tempat tidur di rumah sakit (RS) untuk tiap 1.000 jiwa penduduk.
8. satu dokter umum untuk 50 tempat tidur di rumah sakit.

d. Perdagangan

Diperkirakan bahwa tiap 200 orang di Indonesia memerlukan satu warung/toko, sehingga suatu desa yang berpenduduk 5.000 - 10.000 jiwa memerlukan 25 - 50 warung/toko.

Mungkin suatu desa memerlukan suatu pasar. Mosher¹⁶⁾ mengemukakan, bahwa jarak pasar dari sebuah kampung sebaiknya antara 3,4 - 6,1 km, supaya dapat dicapai dengan mudah. Dalam hal itu suatu pasar dapat melayani wilayah seluas kira-kira 30 - 110 km².

11. Kebijaksanaan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa - LKMD (dulu Lembaga Sosial Desa)

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau dahulu disebut Lembaga Sosial Desa adalah suatu alat yang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kepala Desa merupakan koordinator, dinamisator, dan menciptakan pembaharuan, dan kepala desa itu menjadi ketua umum LKMD.

a. Landasan Azas dan Tujuan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai :

1. Landasan Ideal - Pancasila
 2. Landasan Konstitusional = Undang-undang Dasar 1945.
- b. Fungsi LKMD adalah koordinasi perencanaan pembangunan dalam segala bidang yang berasal dari masyarakat.
- c. Bidang Tugas
- Sebagai wadah dari semua usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, LKMD itu menampung dan melaksanakan aspirasi dan inisi-

kimia; hutan-hutan berubah menjadi tanah pertanian yang memberi makan penduduk. Keuntungan tersebut di atas hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, sebab makin lanjut manusia mengubah alam, lama-lama akan terjadi hal-hal yang merugikan penduduk, jika cara-cara penggunaan tanah kurang baik. Setelah jangka waktu yang agak lama, akibat penggunaan tanah yang salah, hasil pertanian akan menurun, akibat permukaan air yang menurun sehingga terjadi kekeringan; lapisan humus makin menjadi tipis; kesuburan tubuhan tanah berkurang; erosi tanah mulai bekerja akibat pengundulan hutan. Ternyata bahwa akibat penggunaan tanah yang salah itu hanya dapat diperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang pendek saja dengan di samping itu merugikan generasi-generasi selanjutnya.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, dalam pembangunan desa itu harus dipilih metoda yang baik. Metoda yang digunakan adalah : desa terpadu, pengembangan lingkungan dan sebagainya. Dengan berbagai cara penduduk pedesaan yang miskin diikutsertakan dalam bermacam-macam program: pembangunan sosial yang meningkatkan pendidikan dan jaminan sosial serta meningkatkan kehidupan sosial lainnya, kebijaksanaan pembangunan perumahan untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk dan memperbanyak jumlah rumah, kebijaksanaan pembangunan desa terpadu yang menyebarkan industri di wilayah pedesaan dan menciptakan kesempatan kerja.

Dapat diusahakan supaya industri pedesaan itu mempunyai usaha pengait di hulu atau "backward linkage" seperti pengumpulan bahan mentah dari hasil pertanian, pengangkutan barang mentah dan sebagainya, dan usaha pengait di hilir atau "forward linkage" seperti pengepakan, penggudangan, penyaluran, dan sebagainya.

Sebagian ...

Dalam pembangunan desa itu yang membangun adalah penduduk desa, dibimbing oleh para pemimpin, yaitu pemimpin formal yang terjadi dari kepala pemerintahan dan para pembantunya, dan juga oleh pemimpin informal, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan penduduk, seperti ulama, guru, usahawan, dan sebagainya.

Para pemimpin informal itu dapat dikatakan lapisan elite di desa. Menurut Kurien³³⁾ lapisan elite itu adalah orang-orang Banyak yang tinggal di kota), yang telah menerima pendidikan yang cukup tinggi, atau yang telah menjabat pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau spesialisasi, atau yang telah mempunyai jabatan dalam kekuasaan. Lapisan elite itu dapat dibagi menjadi lima bagian: 1. Pejabat pemerintah (birokrat), 2. Ahli politik (politikus), 3. Sarjana (akademisi), 4. Pengusaha, 5. Teknokrat dan ahli pengelola.

Para elite itu harus menyadari peranannya dalam masyarakat, karena me-

nah dan air yang keliru dan sebagainya. Jalan misalnya merupakan prasarana yang penting, sebab memudahkan hubungan bagi penduduk karena penduduk dapat terangsang sehingga menjadi lebih banyak bergerak/berjalan, lebih-lebih jika sarana angkutan tersedia.

Harus diperhatikan pula cara mengatasi masalah jarak yang jauh (atau yang terpenjil karena rintangan alam) dari pusat-pusat fasilitas; menunjang usaha-usaha penyebaran penduduk supaya merata; menunjang kegiatan-kegiatan perekonomian desa; melancarkan kegiatan di bidang pemerintahan; mengaktifkan kegiatan-kegiatan di bidang sosial; memenuhi kebutuhan air (untuk rumah tangga, industri dan pembangunan); menanggulangi/mencegah bencana alam; menanggulangi/mencegah ketandusan tanah; melancarkan saluran-saluran pembuangan; memelihara keseimbangan hidrologi; menyusun tataruang desa, sehingga tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya dan memberikan kenyamanan dan rasa keindahan.

Usaha-usaha yang dijalankan ialah : pemetaan desa, administrasi pertanahan, penetapan tataguna tanah; penetapan tataguna air; pembangunan prasarana desa; pengelolaan prasarana desa secara ekonomis; pemeliharaan hutan dan pengtjauan; pengembangan sumber-sumber air; pembuatan sarana-sarana pencegah/pengulangi bencana alam.

d. Bidang Pemerintahan

a. Fungsi pemerintahan

Dalam negara demokratis seperti Republik Indonesia, pemerintah adalah alat dan bukan tujuan pembangunan. Dalam pembangunan desa, pemerintah yang bersangkutan langsung ialah pemerintah daerah tingkat-II, pemerintah kecamatan dan instansi setingkat, dan Pemerintah Desa.

Yang termasuk obyek pembangunan pemerintahan ialah: 1. tugas pokok dan atau fungsi-fungsi pemerintah yang bersangkutan, 2. kedudukan ketatanegaraan, 3. standar-standar, 4. struktur organisasi, 5. jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran instansi pemerintah, 6. tatakerja, 7. personalia, 8. administrasi, 9. pembiayaan, 10. kepemimpinan, 11. lembaga dan organisasi sosial.

duduk; membina kondisi kehidupan yang nyaman, tertib dan sejahtera; mengendalikan urbanisasi yang menimbulkan akibat yang negatif; menumbuhkan dan membina kesadaran bernusantara dan kesadaran bermasyarakat.

Usaha-usaha yang perlu ditempuh adalah antara lain : membina dan menerapkan administrasi kependudukan yang efektif; menyelenggarakan transmigrasi; mengeluarkan aturan-aturan tertib kependudukan; membina masyarakat terencana, atau "planned community" (keluarga berencana, pemukiman terencana); memasyarakatkan atau membudayakan suku-suku terasing atau masyarakat - pedesaan; mencari dan membina tempat pemukiman baru; meningkatkan kondisi pemukiman yang telah ada; menciptakan kondisi-kondisi kehidupan yang baik di wilayah pedesaan, yang meliputi unsur-unsur : wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna.

2. Sektor manusiawi (aspek penduduk atau masyarakat sebagai manusia), dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan membangun/mengembangkan manusia (masyarakat) supaya siap, mampu dan mau membangun; manusia Pancasila (berpribadi, sadar akan ketuhanan, sadar bermasyarakat, mampu membudayakan alam sekitar): manusia yang menyadari bahwa realitas yang menjadi dasar (dari segala realitas yang ada), yaitu Tuhan Yang Maha Esa; manusia yang dilengkapi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu, sesuai dengan bakat dan kemampuan bekerja dari kehidupan dalam masyarakat; manusia patriotik dan dewasa, yang sadar bahwa ia mampu memanfaatkan alam sekitar guna kesejahteraan: manusia sebagai suatu pribadi yang utuh, kritis, kreatif, otonom, bertanggung jawab dan sadar akan harga diri; manusia yang bertanggung jawab sosial dan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama mahluk; manusia yang sehat dan mempunyai gairah hidup yang tinggi; kondisi mental dan kondisi sosial supaya masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan memegang peranan tertentu di dalam setiap situasi; prasarana dan sarana sosial.
- Sektor-sektor yang dibangun ialah: Agama, kepercayaan, mental, spiritual; pendidikan; kesehatan; kesejahteraan sosial; kesenian; pemuda; pramuka; dan olah raga; pemukiman; rekreasi dan hiburan.

a. Pembangunan dalam bidang ekonomi yang dikembangkan ialah dalam kegiatan-kegiatan produksi primer, sekunder dan tersier.

Dalam produksi primer harus diusahakan pertumbuhan sektor pertanian dengan memajukan/modernisasi pertanian. Mosher¹¹) mengemukakan enam hal yang merupakan syarat dalam memajukan/modernisasi pertanian itu, (yang penting lagi Indonesia negara agraris, tabel 7.), yakni :

1. Menciptakan susunan/struktur wilayah pedesaan yang progresif.
2. Mengadakan penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian.
3. Mengadakan industri alat-alat pertanian dan keperluan lainnya (dapat juga mengimpor).
4. Mempertahankan insentif (a.l. harga) hasil pertanian yang layak bagi petani, untuk meningkatkan produksi.
5. Meningkatkan kualitas tanah pertanian.
6. Mengadakan pendidikan dan penyuluhan petugas-petugas untuk menjalankan berbagai pekerjaan itu.

Keenam hal tersebut adalah saling berhubungan, tetapi masing-masing hal dapat direncanakan dan diselenggarakan tersendiri.

Untuk memajukan kehidupan ekonomi di atas harus diusahakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan supaya kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan lancar, seperti :

1. Unsur-unsur dasar usahatani : sikap mental petani yang siap untuk menerapkan teknologi baru, fasilitas bahan produksi, peralatan, fasilitas perhubungan, fasilitas pemasaran.
2. Syarat-syarat penggerak : penyuluhan, latihan keterampilan, perkreditan yang efektif, intensifikasi dan ekstensifikasi, usaha gotong royong yang dinamis dan fungsional, perencanaan dan pengarahannya dari pemerintah.
3. Syarat-syarat penunjang : pasar, jaringan jalan, pusat-pusat penyuluhan dan kebun bibit, pelayanan perkreditan, investasi dan organisasi-organisasi usaha tani seperti : BUUD/KUD, Bimas, organisasi pemakai air, dan sebagainya.

Salah satu hal yang diusahakan di desa-desa wilayah pertanian di Indonesia adalah Panca Usaha, yang membimbing petani dalam : 1. Penggunaan bibit unggul, 2. Pengolahan tanah yang baik, 3. Pengairan yang terakhir, 4. Pemupukan tanah, 5. Penumpasan hama

ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota/Kepala Daerah Tingkat II.

2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa.
3. Melaksanakan latihan-latihan ketrampilan masyarakat desa.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga desa.
5. Menyenggarakan perlombaan desa.
6. Melaksanakan pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa.
7. Menyenggarakan administrasi pelaksanaan bantuan pemerintahan kepada desa.
8. Menyenggarakan administrasi pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah daerah dan dari masyarakat.
9. Melakukan usaha dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat.
10. Melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pemukiman (re - settlement desa).
11. Mengkoordinasikan segala kegiatan-pembangunan desa.

Pembangunan desa dalam UDKP diberi pembiayaan dari : Bantuan Desa, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pembiayaan Instansi Sektoral yaitu dari Departemen-Departemen lain

7. Desa sebagai Unit Daerah Administrasi Pembangunan (UDAP), dan Peranan Kepala Desa

- a. Tiap desa dijadikan satuan wilayah administrasi pembangunan desa, atau Unit Daerah Administrasi Pembangunan Desa (UDAPD) dengan pertimbangan-pertimbangan :¹⁰⁾
 1. Kepala desa bertanggung jawab terhadap kelancaran pembangunan dalam daerahnya, baik selaku pejabat negara (~~diangkat~~ berdasarkan Undang-undang), maupun selaku pimpinan masyarakat di desa (Kepala desa dipilih oleh masyarakat).
 2. Tiap-tiap desa masih memiliki otonomi efektif, sepanjang menyangkut rumah tangga desa masing-masing, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga desanya.
 3. Di desa, semua fungsi baik regional maupun sektoral, yang di eselon kecamatan masih ada di tangan beberapa instansi, baik menjadi satu (manunggal) di tangan kepala desa.

3. Daerah Tk. II dipandang sebagai ekosistem optimal guna pengembangan desa.
4. Daerah Tk. II dapat mengarahkan pembangunan desa yang dilakukan masyarakat desa (berdasarkan bantuan pemerintah maupun inisiatif sendiri) ke dalam rencana-rencana tertentu.
5. Pemerintah Tk. II memiliki wewenang formal di dalam perencanaan dan koordinasi di daerah menurut undang-undang.
6. Aparat Pemerintah Daerah Tk. II dianggap memiliki kemampuan, penerapan, dan pemindahan teknologi ke desa.
7. Dan sebagainya.

6. Kecamatan sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)

- a. Wilayah kecamatan dijadikan satuan wilayah pelaksanaan pembangunan desa, yang disebut Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Wilayah kecamatan dijadikan wilayah UDKP, karena wilayah kecamatan pada umumnya tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit, namun dipandang mengandung potensi-potensi yang memberi kemungkinan bagi peningkatan kemajuan yang menyangkut kepentingan lebih dari satu desa, dan ibukota kecamatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kecamatan yang dijadikan UDKP ialah :⁹⁾

1. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan sektoral yang bersangkutan dengan pembangunan desa.
2. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa untuk mampu berfungsi sebagai subyek pembangunan.
3. Melakukan pengarah, pengawasan dan perangsangan daya-daya di dalam masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa, berdasarkan inisiatif dan otoaktivitas masyarakat melalui kepemimpinan camat.
4. Menyalurkan dan mengaktifkan bantuan pemerintah untuk pembangunan desa.
5. Berdasarkan wewenang camat di bidang pertanahan (agraria), dapat diefektifkan usaha-usaha pengaturan tata ruang, peruntukan dan penggunaan tanah.

Dalam pembangunan desa prioritas diberikan kepada desa-desa yang tergolong :

- a. Desa minus
- b. Desa kritis (tanah)
- c. Desa pantai
- d. Desa perbatasan
- e. Pradesa
- f. Desa genangan bencana banjir, desa yang dilanda bencana letusan gunung berapi, dan sebagainya.

Usahatani bukan hanya merupakan satu-satunya kegiatan di pedesaan. Di samping pertanian, kegiatan-kegiatan yang lain juga penting dalam usaha membangun pedesaan seperti industri rumah, pembangunan jalan desa, jembatan dan sebagainya.

Masyarakat desa merupakan :

- a. Obyek pembangunan manusia seluruhnya, supaya mampu membangun.
- b. Subyek pembangunan yang memegang peranan sepanjang proses pembangunan desa.

Tiap tahun diadakan penilaian, dan tingkat perkembangan desa itu dicatat (Tabel no. 6). Indikator dalam penilaian itu adalah hal-hal yang tercantum pada nomor 2, yang telah dibicarakan.

4. Strategi dan Arah Pembangunan Desa di Indonesia

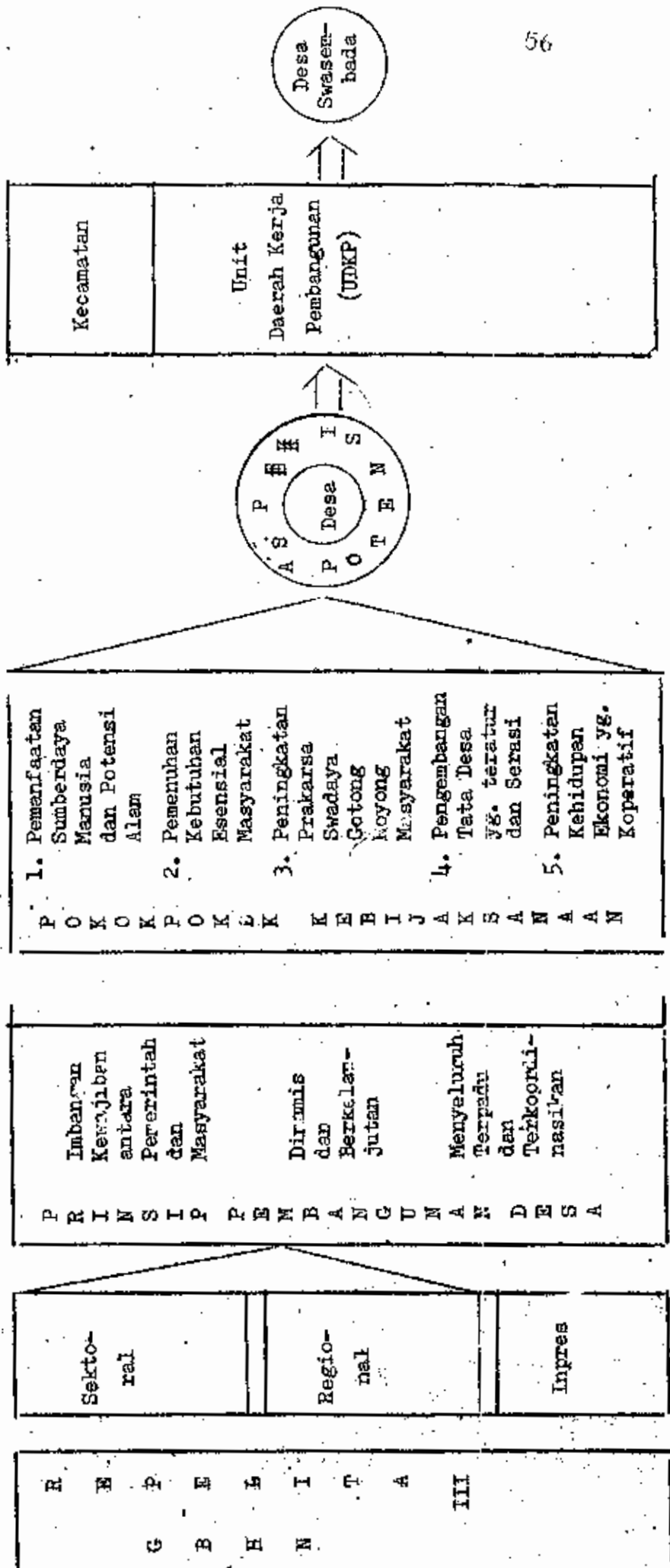
Dapat diterangkan bahwa strategi pembangunan desa itu adalah :

- a. Sesuai dengan strategi pembangunan nasional.
- b. Dilakukan secara bertahap.
- c. Tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
- d. Di dalam pelaksanaannya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis harus dapat terbina dan terpelihara.
- e. Mampu merubah struktur perekonomian desa.
- f. Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat.
- g. Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk.

TABEL NO. 2
TINGKAT PEMBANGUNAN DESA

Tahapan Perkembangan	P e n g e r t i a n	Norma-norma	Pembangunan Desa
Desa Swadaya (Tradisional)	Desa swadaya adalah desa yang masih tradisional, adat istiadat tinggi-kat, hubungan individu sangat erat, mata-pencacaharian bersifat sejati di sektor pertanian dan hanya memenuhi kebutuhan sendiri, teknologi masih sederhana, tingkat produktivitas rendah disertai keadaan prasarana yang masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mata-pencacaharian penduduk 55% di sektor primer (F_1). b. Out-put/Produksi desa rendah ($< Rp. 50 \text{ juta/Th } Y_1$). c. Lembaga-lembaga desa dan pemerintahan desa masih sederhana tugas dan fungsinya (L_1). d. Adat istiadat dan sikap masyarakat yang mengikat (A_1). e. Tingkat pendidikan masih rendah $< 30\%$ penduduk lulus SD keatas (P_1). f. Swadaya dan gotong royong masyarakat latent (G_1). g. Prasarana dan sarana di desa masih kurang (P_1). 	<ul style="list-style-type: none"> TH. 1973/1974 : TH. 1974/1975 : TH. 1975/1976 : TH. 1976/1977 : TH. 1977/1978 :
Desa Swakarya (Transisi)	Setingkat lebih maju dari desa swadaya, adat istiadat mengalami perubahan, pengaruh luar mulai masuk, perubahan berfilar dan berkenangannya lapangan pekerjaan, nutrencia-harian berkembang ke sektor sekunder, produktivitas meningkat dibarengi pemanfaatan teknologi yang tepat, keadaan prasarana lebih baik dan memenuhi kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mata-pencacaharian penduduk berge-rak ke sektor sekunder (F_2). b. Out-put/produksi desa meningkat ($Rp. 50 - Rp. 100 \text{ juta/Th } Y_2$). c. Adat istiadat dan sikap masyarakat transisi (A_2). d. Lembaga-lembaga desa dan pemerintahan desa sudah jelas tugas dan fungsinya (L_2). e. Tingkat pendidikan meningkat ($30\% - 60\%$ penduduk lulus SD ke atas (P_2)). f. Swadaya gotong royong masyarakat transisi (G_2). g. Prasarana dan sarana telah meningkat (P_2). 	<ul style="list-style-type: none"> TH. 1973/1974 : TH. 1974/1975 : TH. 1975/1976 : TH. 1976/1977 : TH. 1977/1978 :

TABEL NO. 5
 POKOK POKOK KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA



Sumber : Widyakarya Nasional Teknologi Pedesaan, 1979.

katan Bangsa-Bangsa. "Community Development" tersebut terdiri atas dua unsur, yaitu : Pembinaan prakarsa penduduk untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri, dan bantuan dari Pemerintah untuk lebih merangsang prakarsa-prakarsa tersebut. Dalam pembangunan desa, menurut Mosher,⁴⁾ yang menjadi tujuan utama bukan pertumbuhan pertanian, tetapi peningkatan kwalita hidup para petani, yang sebagian bergantung kepada pendapatan keluarga dan sebagian lagi bergantung kepada hal-hal lain. Sebagian besar dari pendapatan bergantung kepada hasil pertanian, sehingga dapat ditingkatkan dengan pertumbuhan pertanian.

Menurut Direktorat Pembangunan Desa,⁵⁾ Departemen Dalam Negeri, "Pembangunan Desa" ialah metoda untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum, relatif merata, dan meningkat, yang di dalam prosesnya masyarakat setempat berkedudukan sebagai subyek pembangunan, dan pemerintah memberi pengarahannya, koordinasi, pengendalian, pengusahaan dan penggairahan. Friedman mengemukakan, bahwa maksud pembangunan/pengembangan desa adalah⁶⁾ :

1. Mengusahakan kemungkinan bertahan hidupnya secara ekonomi dan politik suatu masyarakat desa, berdasarkan prinsip berdikari.
2. Meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dalam bidang ekstraktif dan pengolahan di wilayah pedesaan, terutama bagi pemuda dan wanita.
3. Meningkatkan dan memperbaiki lingkungan alam di pedesaan.
4. Mengusahakan penyediaan bahan pokok yang sesuai bagi penduduk, sebagai suatu prioritas yang penting.
5. Mengusahakan tercapainya perkembangan kota dan desa yang seimbang.

Pada dewasa ini Direktorat Pembangunan Desa mengusahakan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dengan peningkatan desa swadaya (tradisional) melalui desa swakarya (transisi) dengan menuju desa swasembada (maju dan modern).

Kegiatan pembangunan meliputi bidang-bidang :

- a. Ekonomi
- b. Sosial
- c. Fisik dan prasarana
- d. Pemerintahan

BAB II

1. Dit Jen Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa: Perencanaan Fisik; Dra. Djohara T. Djajadinata, M.Sc. : Kondisi Fisik bagi Pertanian, Dep. Dalam Negeri - Planologi, ITB, Bandung, 1976, hln. 1.
2. Dit Jen Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa: Perencanaan Fisik; Dra. Djohara T. Djajadinata, M.Sc. : Keadaan Alam Secara Umum, Dep. Dalam Negeri - Planologi, ITB, Bandung, 1976, hln. 1.
3. Dit Jen Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa: Perencanaan Fisik; Dra. Djohara T. Djajadinata, M.Sc. : Existing Land Use, Dep. Dalam Negeri - Planologi, ITB, Bandung, 1976, hln. 10.
4. Ibid, hln 7.
5. Bourne, L.S, and Simmons, J.W., Systems of Cities; Friedmann, J.: ' The Urban Field as Human Habitat, Oxford University Press, New York, 1978 , hln. 42.
6. Town and Country Planning, June 1980, Vol. 49, no. 6, Viewpoint : The Rural Voice, hln. 177.
7. Kannegieter, Ir. A. dan H. Huizing, 1987, Aspects of Agriculture, hf. 6, Rural and land ecology surveys, ITC-Enschede, The Netherlands
8. Kannegieter, 1987, hf. 5

e. Sistem Panca Wilayah ("Five division system").

Untuk mengatur supaya perkampungan ("settlement") dengan tanah pertanian berintegrasi, sehingga tanah pertanian itu terdapat dalam jarak jangkauan petani-petani yang tinggal di kampung, terutama dalam macam-macam resettlement maka salah satu cara adalah dengan menggunakan sistem Pancawilayah, seperti dalam pengembangan perkebunan inti rakyat (PIR) dari Departemen Pertanian, di mana penulis ikut membantu. Dengan anggapan bahwa penduduk dapat berjalan maksimal 6 km belak-balik sehari misalnya, maka diambil suatu wilayah seluas 2.800 ha. Jika wilayah seluas itu mempunyai bentuk segiempat (umumnya bentuk suatu wilayah tidak bulat), maka untuk mengatur jarak ke tanah-tanah pertanian wilayah itu dibagi menjadi 5 wilayah (sebetulnya; sub-wilayah, Gambar no. 10). Dalam hal ini dapat diatur supaya wilayah tengah itu lebih luas dari wilayah-wilayah lain; wilayah yang empat, luasnya dapat dibuat hampir sama.

Perkampungan dalam 5 wilayah itu dapat diatur sehingga tiap kampung mempunyai tanah untuk pertanian bahan makanan yang terletak dekat ke kampung (kira-kira 1 km), dan tanah untuk tanaman keras, yaitu bahan dagangan (~~kapas, kelapa sawit~~) yang letaknya agak jauh dari kampung (kira-kira 3 km). Dalam sistem Pancawilayah itu harus disediakan tanah untuk hutan, supaya alam tetap lestari.

Kampung induk yang terletak di pusat dan mempunyai penduduk terbanyak, dilengkapi dengan prasarana-prasarana sosial dan ekonomi bagi seluruh wilayah yang terdiri atas: sekolah dasar, mesjid besar, balai desa, kantor desa, kantor koperasi, lembaga sosial desa, Puskesmas bantuan, pasar, pos polisi, dan sebagainya.

Kampung-kampung yang lain (kampung-kampung satelit) harus terletak maksimal \pm 2 km dari kampung pusat itu. Dengan demikian, baik bagi anak-anak dari kampung-kampung satelit yang pergi ke sekolah maupun untuk orang-orang dewasa yang pergi ke salah satu kantor untuk urusan tertentu, jarak kampung induk itu dapat ditempuh dengan mudah. Selain itu kampung-kampung satelit (juga kampung induk) harus dilengkapi dengan prasarana sosial ekonomi yang khusus diperlukan seperti: sekolah taman kanak-kanak, mesjid kecil, balai pertemuan, madrasah, warung/toko, pos jaga/ronda/Hansip, tempat bermain, lapang

Di desa yang merupakan pusat wilayah kecamatan, misalnya terdapat macam prasarana sebagai berikut : kantor pemerintahan desa, balai desa, kantor pos, kantor polisi, Puskesmas / poliklinik, SD dan juga SMP, mesjid, pasar dan pertokoan, terminal angkutan umum, BUUD / KUD, gudang pupuk, lapangan olah raga, kantor P dan K, bank, kantor kecamatan. Di kampung-kampung tertentu di wilayah pedesaan terdapat juga beberapa prasarana sosial-ekonomi tersebut, tetapi tidak selengkap di kampung yang merupakan pusat daerah administrasi, melainkan hanya terdapat : surau atau langgar, beberapa warung, kantor desa.

Kadang-kadang untuk beberapa desa yang agak besar, kampung utamanya dilengkapi dengan: SD, poliklinik, balai desa, pasar, lapang olah raga. Tanah tempat kegiatan ekonomi yang merupakan : sawah, ladang, kebun, kolam, peternakan, hutan, sungai, laut, dan tempat pertambangan, umumnya terdapat di luar kampung atau di pinggir pemukiman.

Hanya kegiatan industri (macam-macam industri makanan, kerajinan tangan, dan sebagainya), dan beberapa kegiatan jasa (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi, dan sebagainya), terdapat di dalam kampung.

Di kawasan pemukiman yang terencana di Indonesia, seperti di perkampungan yang diselenggarakan pemerintah untuk pemukiman kembali, transmigrasi, perkebunan dan mungkin juga untuk kehutanan prasarana sosial ekonomi itu diatur supaya terdapat dalam jangkauan penduduk, baik di kampung terencana yang merupakan pusat desa maupun di kampung-kampung terencana yang kecil.

Kegiatan industri pedesaan umumnya dapat berdasarkan :

1. Bahan mentah lokal. Industri yang dapat dikembangkan adalah: pengolahan hasil pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan.
2. Kebutuhan lokal. Industri yang dapat dikembangkan ialah barang-barang yang diperlukan penduduk setempat, misalnya : cangkul, bajak, alat rumah tangga, alat dapur, pakaian, tikar, dan sebagainya (Pupuk dan pestisida biasanya dibuat di pabrik besar !). Pembuatan barang-barang tersebut mengurangi impor lokal.
3. Keterampilan khusus di tempat tertentu. Sering hal ini dihubungkan dengan seni tradisional dan kerajinan tangan, seperti : batik, sutra, pramedani, kulit, perak, keramik, dan sebagainya.

d. Keadaan Perkampungan di Pedesaan

Sebagian besar dari wilayah Indonesia merupakan pedesaan (kira-kira 98%). Seluruh wilayah Indonesia secara administratif terbagi habis menjadi desa-desa. Berhubung Indonesia merupakan negara kepulauan, maka terdapat desa di tengah pulau dan desa di tepi pantai, dan di samping itu terdapat desa yang meliputi pulau kecil.

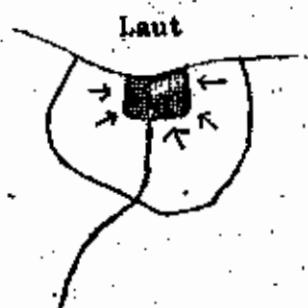
Berhubung bentuk daratan tidak sama dapat dibedakan pula: desa di dataran, desa di lembah, desa di perbukitan, dan desa di pegunungan.

Desa di tengah pulau (desa pedalaman) umumnya mempunyai pemukiman yang terpusat dikelilingi oleh tanah untuk kegiatan ekonomi, seperti: sawah, ladang, hutan, dan sebagainya (gambar no. 5 dan 6.).

Desa pantai merupakan pemukiman yang linier dengan tempat kegiatan ekonomi di laut (gambar no. 7 dan 8). Kampung di tepi sungai hampir sama keadaannya dengan kampung di tepi pantai. Kampung yang terletak di perbukitan sering mempunyai pola pemukiman tersebar (gambar no. 5), dan pemukiman yang mempunyai kegiatan pertambangan sering mempunyai pola semacam itu (gambar no. 5). Jadi terdapat desa pedalaman, desa pantai, dan desa sungai, dan berdasarkan orientasi perkembangan dan topografi terdapat pemukiman konsentrik, atau memusat, memanjang atau linier dan tersebar ("dispersed").

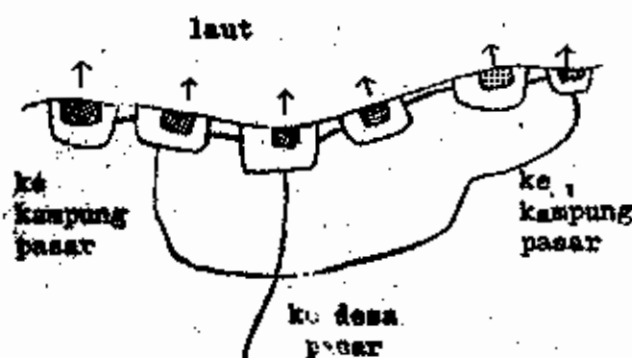
Di samping kegiatan sosial-ekonomi yang bersifat agraris, desa-desa itu mempunyai fungsi tertentu. Desa yang merupakan pusat kecamatan mempunyai fungsi pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, dan ada pula desa tertentu yang mempunyai fungsi industri, atau fungsi pertambangan dsb. Berhubung dengan fungsi desa tersebut, di dalam kampung yang merupakan pusat seluruh daerah administrasi desa, terdapat berbagai fasilitas sosial-ekonomi beserta prasarananya. Fasilitas sosial-ekonomi itu meliputi: 1. wisma (perumahan), 2. karya (lapangan pekerjaan), 3. marga (jalan dan komunikasi), 4. suka (rekreasi dan kesenian), 5. penyempurnaan (fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, kuburan, dan sebagainya). Perkembangan perkampungan sering menunjukkan kecenderungan perkembangan dan pertumbuhan permukiman di sepanjang jalan. Misalnya di tanah yang dulunya diperuntukan untuk sawah (gambar no. 9), dalam waktu 10 tahun sudah menjadi kawasan permukiman. Sebagai kawasan persawahan yang baru, penduduk menggunakan wilayah lain sepanjang sungai yang sebelumnya merupakan hutan.

Untuk pengentasan kemiskinan pada 1993 pemerintah mengadakan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yaitu dengan memberikan bantuan untuk pinjaman modal bagi pengusaha kecil di pedesaan, yang diberikan secara langsung kepada para pengusaha kecil itu



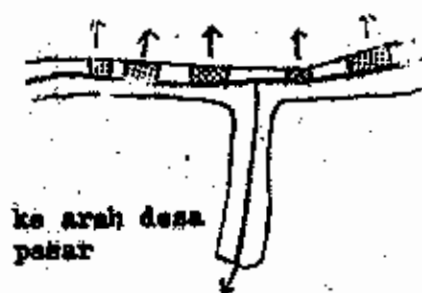
Kampung Memusat (konsentrik)

Penusatan terjadi karena adanya lokasi tunggal dari pusat-pusat kegiatan fungsional biasanya pelabuhan, pengolahan ikan, pasar.



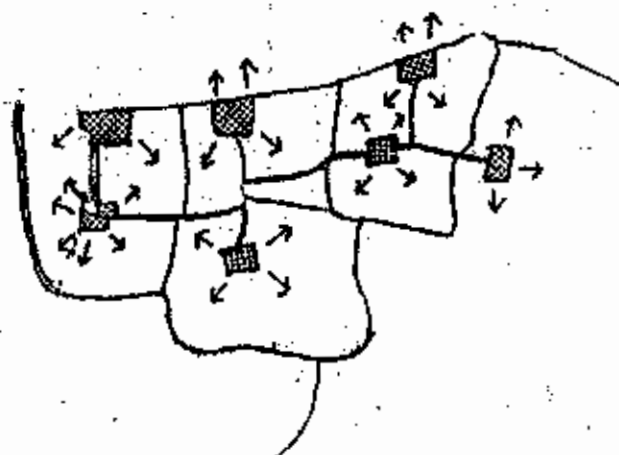
Kampung memanjang (linear)

Kampung dengan bentuk memanjang tampak pada kampung-kampung nelayan dimana laut merupakan sumber mata pencaharian.



Kampung Berbentuk Pita (ribbon)

Pada kampung-kampung pantai maka desa yang berbentuk pita disebabkan oleh adanya dominasi pasaran di kampung-kampung lainnya maupun adanya orientasi ke laut sebagai sumber mata pencaharian. Jadi di sini dominasi laut dan pasaran seimbang. Biasanya ini merupakan perkembangan dari kampung memanjang (linear).



Perkembangan Terpecah (dispersed)

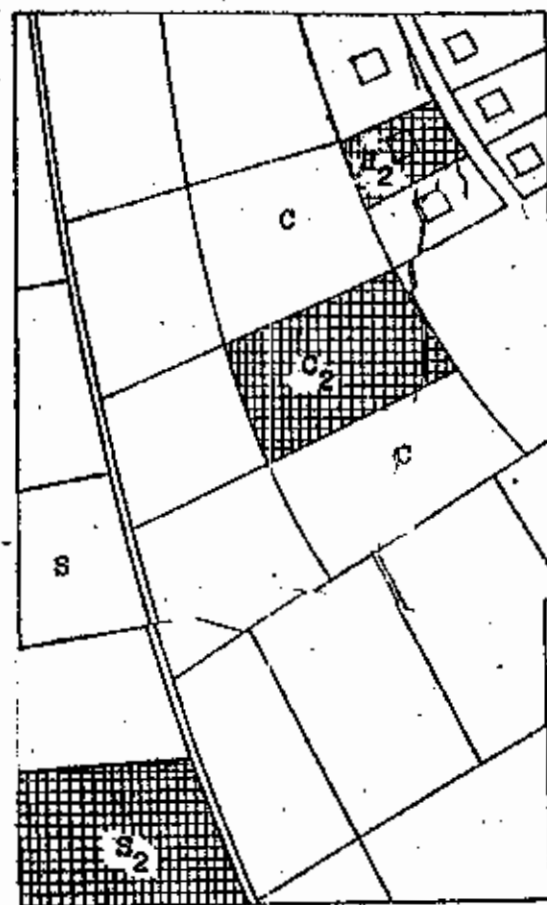
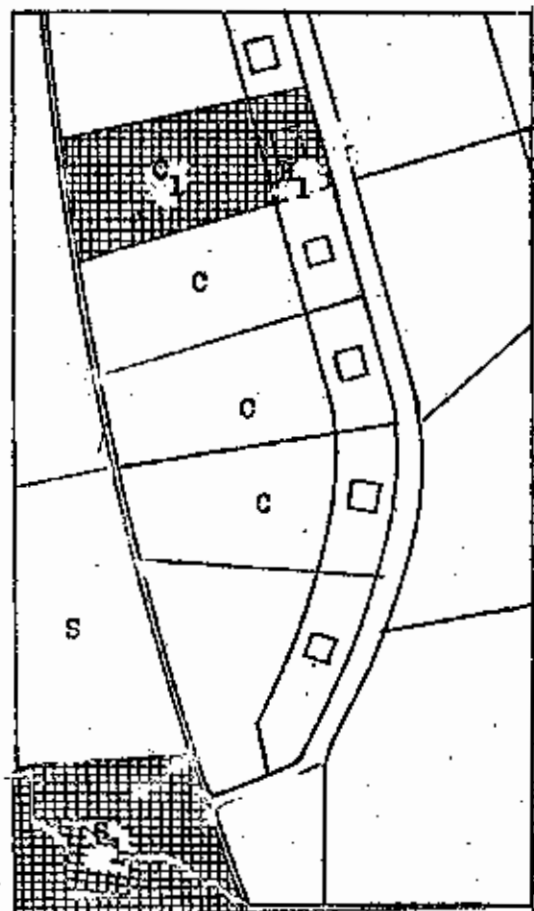
Adanya kombinasi kegiatan kerja penduduk di bidang perikanan dan pertanian menyebabkan terjadinya bentuk kampung pantai yang terpecah.

GAMBAR NO. 6

LOKASI RUMAH TERHADAP TANAH PERTANIAN

a. Perkampungan tersebar (scattered)

b. Perkampungan terpusat/mengelompok



Rumah dan halaman

Kebun campuran

Rawa

Sumber : ESCAP, 1979.

4. Hutan rekreasi:

- a. Hutan untuk berekreasi (untuk menghayati keindahan alam).
- b. Hutan perburuan (berburu untuk rekreasi).

Dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hutan itu sangat penting artinya, sehingga kelangsungan hidup hutan-hutan itu harus dijaga oleh seluruh masyarakat.

4. Pertambangan dan industri

a. Pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi :

- Pertambangan kecil yang "subsistence": penggalian - penggalian batu dan pasir, untuk bangunan; gamping untuk membuat kapur; tanah liat untuk membuat bata, genting dan barang-barang keramik; belerang untuk macam-macam keperluan, seperti obat-obatan, dan sebagainya; air untuk macam-macam keperluan rumah tangga, industri, dan lain sebagainya.
- Pertambangan besar yang komersial (bukan logam, logam dan bahan bakar).

b. Industri kecil yang "subsistence": pembuatan makanan dan minuman, pembakaran kapur, pembuatan genting, dan keramik, pembuatan alat-alat dan sebagainya diusahakan oleh penduduk, sehingga terdapat tersebar di pedesaan ("small scale industry").

Industri kecil yang komersial, yaitu industri ringan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal yang agak besar.

5. Perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa lain.

Perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa lain di wilayah pedesaan terdapat dalam skala kecil, misalnya : pedagang eceran, pengangkutan dengan tenaga hewan (grobak, dan sebagainya) atau tenaga manusia (beca, sepeda, dan sebagainya), koperasi simpan pinjam, dan sebagainya.

Di kota-kota hal tersebut di atas tampak dalam skala yang jauh lebih besar: pedagang besar, pengangkutan dengan truk atau kereta api, perbankan dan sebagainya.

Segala macam kegiatan yang berhubungan dengan tata guna tanah itu (no. 1 s/d no.5) memerlukan sumberdaya manusia seperti: pengetahuan, keterampilan, ilmu, modal dan peralatan, dan lain sebagainya.

lebih besar dan jaring yang lebih baik seperti :

("trawlers"). Karena pukat harimau itu sering merugikan nelayan-nelayan kecil, kegiatannya pada dewasa ini dilarang.

Perikanan di Indonesia, baik perikanan darat maupun perikanan laut, masih merupakan perikanan yang "subsistence", untuk konsumsi lokal, regional dan nasional. Di tempat perikanan di tepi pantai akan tampak tempat pelelangan ikan, tempat pengerihgan ikan, dan sebagainya.

Peternakan pun di Indonesia umumnya masih peternakan yang "subsistence". Ternak besar, dipelihara di Indonesia untuk diambil hasilnya (daging, susu, kulit, dan sebagainya) atau diambil tenaganya (penghela bendi/dokar, bajak, dan sebagainya).

Karena penduduk P. Jawa rapat, maka yang dipelihara di pulau itu terutama hanya ternak kecil (biri-biri, kambing, babi dan ayam). Desa-desa di Pulau Jawa umumnya mempunyai tanah komunal untuk penggembalaan.

Di Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur karena kondisinya baik, banyak dipelihara ternak besar, kecil, terutama ternak potong dan ternak hela. Tegalan-tegalan rumput di sana berfungsi sebagai penggembalaan.

3. Kehutanan

a. Hutan alam

Kedaaan hutan di Indonesia tidak sama luasnya. Indonesia mempunyai hutan seluas 60% dari seluruh wilayahnya. Hutan di Jawa: 23% padahal seharusnya luas hutan itu minimal 30%.

Hutan-hutan alam itu menghasilkan: bahan pelup, rotan, terpentin, getah perca. Jumlah jenis pohon-pohonannya besar sekali ± 3.700 "species". Kayu-kayu yang umum adalah kayu dari pohon Shorea yang keras, dan kayu dari pohon Pinus merkusii yang lunak.

Kayu keras digunakan untuk bangunan, bantal rel kereta api, mebel, dan sebagainya; kayu lunak untuk peti, kertas, rayon, dan sebagainya.

Di Sumatra, Kalimantan, dan sebagainya dewasa ini bagian-bagian tertentu dari hutan alam diusahakan oleh perusahaan-perusahaan kayu, yaitu ditebang pohon-pohonnya yang diperlukan. Kadang-kad

setelah sebidang hutan dibuka dan dibakar, serta ditanami dan menghasilkan beberapa kali, jika hasilnya telah berkurang tanah itu ditinggalkan, dan penduduk membuka lagi bagian hutan yang lain untuk ditanami.

Tanah yang ditinggalkan itu akan ditumbuhi hutan baru ("secondary forest") dan jika jangka waktu istirahatnya dapat mencapai 25-30 tahun, maka tanah itu akan pulih lagi kesuburannya karena dalam waktu yang lama itu cukup humus terbentuk oleh secondary forest itu. Tetapi jika periode istirahat dari tanah itu (misalnya karena penduduknya telah agak rapat) kurang dari 25-30 tahun misalnya 10-15 tahun, kesuburan tanah itu akan cepat mundur, bahkan jika jangka waktu istirahat itu lebih pendek lagi, tanah itu akan rusak sehingga tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh, selain alang-alang. Jadi jika dalam perladangan bakar itu syarat-syarat tersebut di atas tak terpenuhi, hutan yang menghiju itu tidak dapat diharapkan lagi. Sebagai gantinya akan terhamparlah suatu lautan alang-alang.

Pertanian primitif yang menetap, seperti yang dilakukan oleh penduduk Mentawai dalam berkebun pisang, dan oleh penduduk Palim di Irian dalam berkebun keladi.

b. Pertanian yang maju

Pertanian maju ("advanced agriculture") itu di Indonesia terjadi atas :

1. Pertanian bahan makanan, yang merupakan pertanian: sawah, tegalan, dan pekarangan. Hasil pertanian bahan makanan itu hanya untuk konsumsi sendiri, sehingga bersifat "subsistance"
2. Perkebunan, yang menanam berbagai tanaman keras untuk dijual (diekspor), sehingga pertanian bersifat komersial.

Dalam pertanian maju itu baik di sawah maupun di tegalan dan pekarangan, serta juga di kebun-kebun pekerjaan pertanian disertai dengan :

- penggunaan alat-alat (dari besi) yang lebih banyak: parang, cangkul, bajak, pompa air, mesin-mesin kecil, dst.

persegi (1 depa = \pm 1,7 m). Dengan demikian rumah-rumah keluarga terdapat dalam sebidang tanah yang luasnya 100 depa persegi (kira-kira 3 ha), sehingga rumah-rumah itu letaknya berjauhan, kira-kira 170m dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Walaupun penduduk itu tinggal dekat ke tanah pertaniannya. Dalam keadaan semacam itu masih terdapat beberapa kesukaran, misalnya mereka berjauhan dengan tetangga sehingga hubungan sosial kurang terjalin. Di samping itu anak-anak segan atau tidak mau pergi ke sekolah karena jarak ke sekolah, jauh. Orang-orang dewasa sering mendapat kesukaran dalam mengadakan hubungan sosial dan ekonomi, karena jarak prasarana sosial dan ekonomi seperti balai pengobatan, toko, mesjid, kantor desa, kantor koperasi dan sebagainya umumnya jauh dari rumahnya.

3. Keadaan Lingkungan Binaan

a. Tataguna Tanah secara Umum

Dalam berbagai kegiatan yang menggunakan tanah, terutama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, harus pula diperhatikan unsur-unsur alam lain seperti : bentuk daratan, air permukaan, air tanah, air laut, tubuh tanah (soil), mineral, vegetasi dan sebagainya di samping kegiatan penduduk demi berhasilnya kegiatan ekonomi itu.

Selain untuk tempat tinggal (perkampungan atau settlement), tataguna tanah itu, baik regional, maupun rural dan urban dipengaruhi oleh kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan sosial seperti berorganisasi, berekreasi dan sebagainya mempengaruhi tataguna tanah. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Tataguna tanah regional meliputi tataguna tanah pedesaan dan tataguna tanah perkotaan. Dapat disebutkan bahwa tataguna tanah pedesaan, di samping pemukiman, khususnya adalah penggunaan tanah bagi produksi primer, karena di wilayah pedesaan produksi sekunder dan tersier masih kurang, dan persentasenya kecil sekali.

Tataguna tanah perkotaan di samping penggunaan tanah bagi tempat tinggal ("residential areas"), khususnya adalah penggunaan tanah bagi produksi sekunder dan produksi tersier, karena produksi primer kecil persentasenya.

Derajat lereng	A 0 - 2°	B 2 - 5°	C 5 - 10°	D 10 - 20°	E 20 - 30°	F > 30°
	+	-	.	3	4	5
Kategori erosi	Pengen- dapan tak ada erosi	Erosi yang lemah	Erosi yg. agak ku- at	Erosi yg. kuat	Erosi yg. sangat kuat	Erosi yang kri- tis

Sumber : Dit. Jen. Pembangunan Desa, 1976.

Klasifikasi kapabilitas tanah di atas adalah sederhana sekali, hanya memperhatikan: macam tanah, derajat lereng dan kategori erosi. Di samping klasifikasi kelas kapabilitas tanah seperti tercantum pada tabel no. 4, terdapat juga klasifikasi yang lain yang mengikutsertakan pembatasan-pembatasan menurut tubuhtanah, iklim dan air tanah atau mungkin irigasi.

Berhubung dengan bentuk daratan dan tubuhtanah, dapat dikatakan bahwa, misalnya pohon karet tumbuhnya hanya pada ketinggian sampai kira-kira 350 m, sebab di wilayah yang lebih tinggi dari itu pohon karet itu mungkin diserang suatu hama tertentu. Umumnya pohon karet dapat tumbuh dalam tubuhtanah yang kesuburannya sedang, tetapi tanahnya harus mempunyai tata air yang baik.

Karet itu di sini diwantiatkan sebagai contoh karena Indonesia adalah pengeksport karet. Dunia memerlukan banyak karet, baik dalam musim damai maupun dalam musim perang, sehingga di samping karet alam dewasa ini digunakan juga karet sintetis. Penggunaan karet sintetis (karet buatan a.l. dari minyak tambang) di dunia diperkibakan 1/3 nya dari seluruh pemakai karet.

2. Iklim dan air

Iklim besar sekali pengaruhnya kepada tumbuh-tumbuhan, sehingga dalam wilayah yang mempunyai tipe iklim tertentu terdapat vegetasi yang tertentu pula. Unsur-unsur yang utama dalam iklim adalah:

suai jika ditanam di lereng yang melandai.

Tanah yang berlereng-lereng di pegunungan atau perbukitan, sangat berbahaya bagi erosi, jika dalam pertanian tidak dibatasi pemakaiannya.

Untuk melindungi tubuh tanah terhadap erosi, yang di wilayah pegunungan dapat berbahaya sekali, diadakan pembatasan dalam penanaman lereng-lereng:

TABEL NO. 3
HUBUNGAN LERENG DAN PENGGUNAAN TANAH

Kelas lereng	Besar lereng (dalam derajat)	Ketentuan penggunaan tanah
1	0 - 3	Tanaman musiman; tanpa pembatasan
2	3 - 6	Idem
3	6 - 12	Tanaman musiman; dengan pembatasan
4	12 - 18	Tanaman keras
5	18 - 25	Hutan
6	25 - 30	Hutan
7	> - 30	Hutan

Umumnya lereng 0 - 6° dapat digunakan bagi pertanian bahan makanan (tanaman musiman) tanpa pembatasan-pembatasan tertentu; lereng 12 - 18° hanya digunakan bagi tanaman keras; dan lereng 18° harus digunakan untuk hutan.

Dalam cara pengerjaan pembukaan hutanpun diadakan pembatasan-pembatasan tertentu: pada lereng 5 - 12° hutan dapat dibuka dengan menambang pohon dan membakar; pada lereng 12 - 25° hutan boleh dibuka tetapi tidak boleh ada pembakaran; pada lereng 25° hutan tidak boleh dibuka (Tabel no. 3).

Berbagai tubuhtanah mempunyai kemungkinan-kemungkinan tertentu bagi tanam-tanaman. Beberapa tanaman memerlukan tubuhtanah yang

e. Mineral

Karena mineral itu penting dalam kehidupan sehari-hari, negeri-negeri di dunia berusaha mencari dan mengembangkan sumber-sumber mineral itu.

Mineral itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok :

- Kelompok bukan logam. Yang tersebar luas, tetapi tidak mempunyai peranan yang penting dalam hubungan internasional. Kelompok ini terdiri atas : batuan untuk semen, mineral untuk pupuk, gipsum, mika, dan sebagainya.
- Kelompok logam, yang hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu di dunia, misalnya: 90% dari mas, perak, tembaga, timah, dan seng yang terdapat di Amerika Serikat, berasal dari wilayah yang luasnya hanya 3/1000 nya dari luas Amerika Serikat. Dalam kelompok logam, besi merupakan logam terpenting.
- Kelompok bahan bakar, yang juga hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu di dunia. Bahan bakar yang terpenting adalah : batu bara, minyak bumi dan gas alam.

Di Indonesia, terdapat beberapa macam dari kelompok bukan-logam seperti : batuan semen, kapur, belerang, mineral untuk pupuk, mika, dan sebagainya. Dari kelompok logam terdapat timah, timbal, mas, perak, tembaga, aluminium, dan sebagainya, dan dari kelompok bahan bakar terdapat minyak bumi, batu bara muda, dan gas alam. Pada dewasa ini untuk menghemat mineral itu, beberapa negeri melakukan konservasi mineral (pengusahaan yang cermat dan penggunaan yang hemat).

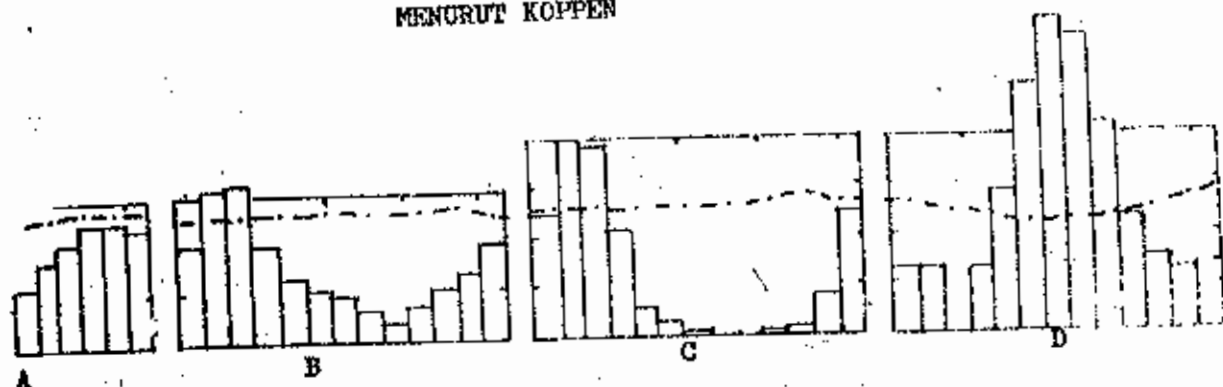
f. Vegetasi

Unsur-unsur iklim seperti temperatur, penyinaran dan hujan sangat mempengaruhi tumbuh-tumbuhan.

Adanya perbedaan iklim dan tubuh-tanah, menyebabkan terdapatnya macam-macam vegetasi. Di Indonesia terdapat 3 kelompok vegetasi:

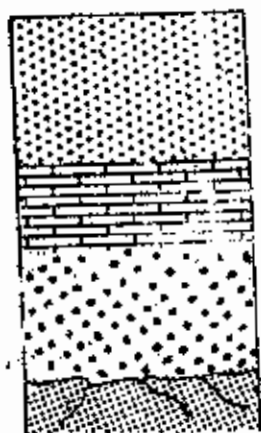
- Vegetasi hutan hujan tropik, yang terdapat di wilayah iklim hutan hujan tropik yang mempunyai temperatur yang tinggi dan hujan sepanjang tahun (menurut Koppen: iklim Af), yang terdiri atas hutan yang rapat terdiri dari pohon-pohon besar, (tinggi kira-kira 60 meter, dan penampang lebih dari 1 meter), pohon-

GAMBAR : 3
 BEBERAPA KOTA MENURUT TIPE IKLIM
 MENURUT KOPPEN



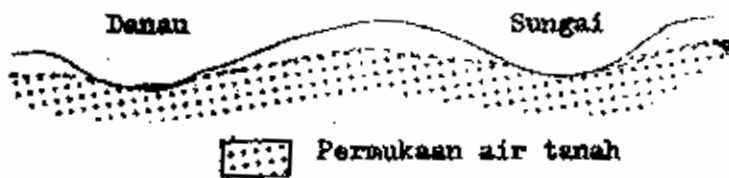
A = Medan
 B = Jakarta
 C = Kupang
 D = Amboina

GAMBAR 4
 HORIZON-HORIZON TUBUH TANAH

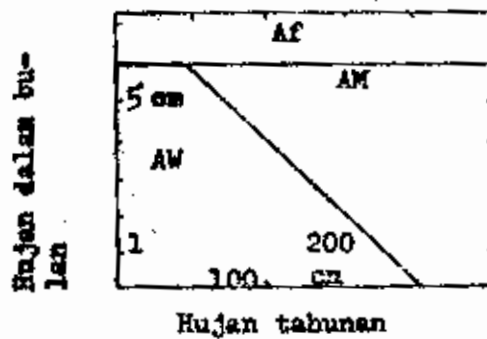


Vegetasi
 Horizon A
 atau
 Jalur pelindian
 Horizon B atau
 Jalur akumulasi
 Horizon C atau
 bahan induk
 Batu keras

GAMBAR NO. 1
PERMUKAAN AIR TANAH



GAMBAR NO. 2
PEMBAGIAN IKLIM A DARI TYPE IKLIM KOPPEN



Sumber : Dit Jen Pembangunan Desa, 1976.

1. Sumber daya alam yang abstrak.

Tempat dimana wilayah itu terletak, disebut posisi. Situasi adalah hubungan wilayah tertentu dengan wilayah yang lebih luas. Unsur-unsur alam tersebut dalam penggunaan yang baik, dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu. Luas suatu wilayah dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk. Bentuk suatu wilayah dapat memanjang, persegi, bulat, dan sebagainya; hal ini berkaitan dengan unsur jarak, sehingga dapat mempengaruhi hubungan bagian-bagian wilayah dengan pusat wilayah itu.

2. Sumber daya alam yang nyata

a. Bentuk daratan

Permukaan bumi yang tidak teratur disebut bentuk daratan ("land form"), yang terbagi menjadi 4 macam bentuk daratan :

- Pegunungan: bentuk daratan yang permukaannya mempunyai perbedaan tinggi-rendah yang besar, dan menjulang tinggi sekali dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
- Perbukitan: permukaan bumi yang perbedaan tingginya kecil dan menjulang agak tinggi dibandingkan dengan wilayah sekelilingnya.
- Dataran tinggi ("plateau"): bentuk daratan yang permukaannya terdiri atas lapisan-lapisan mendatar, yang letaknya tinggi (lebih-lebih di satu pihak) jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
- Dataran: suatu wilayah yang relatif datar, yang letaknya lebih rendah atau lebih tinggi dari wilayah sekelilingnya.

Bentuk daratan itu pengaruhnya tampak pada penyebaran penduduk dan kegiatannya. Umumnya pegunungan jarang penduduknya, karena sumber-sumber penghidupan sedikit, biaya pengusahaan lebih tinggi sehingga pendapatan kecil. Pegunungan mempunyai potensi-potensi tertentu, seperti kehutanan, pertambangan, pembangkitan listrik, tempat rekreasi dan peristirahatan.

Dataran umumnya lebih rapat penduduknya, sehingga dapat diadakan spesialisasi dalam mata pencaharian. Perkembangan kemajuan di dataran umumnya dapat berjalan lebih cepat daripada di pegunungan.

LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN BUNYAN DI WILAYAH PEDESAAN

1. Tinjauan Umum

Penduduk bekerja dalam produksi pertanian, sehingga produksi pertanian hanya terjadi di wilayah yang berpenduduk. Adalah suatu fakta yang nyata bahwa di beberapa wilayah tertentu di Indonesia penggunaan tanah untuk produksi pertanian dilakukan secara sangat intensif akibat penduduk yang rapat, sedangkan di beberapa wilayah lain tanahnya hampir tidak terjamah manusia karena penduduknya jarang atau karena wilayahnya hampir tak berpenduduk.

Untuk mengusahakan pertanian, baik pertanian bahan makanan (yang "subsistence"), maupun pertanian untuk bahan dagangan (yang komersial, mis. perkebunan), diperlukan kondisi-kondisi fisik yang sesuai bagi tanaman yang diusahakan seperti : bentuk daratan, iklim, air, tubuh tanah, dan vegetasi.¹

Di samping itu unsur-unsur alam yang abstrak seperti : posisi : ("situs") lokasi, situasi dan jarak mempunyai pengaruh yang penting pula.

Walaupun dalam pertanian, lingkungan alam itu besar sekali pengaruhnya, tetapi unsur-unsur sosialpun seperti penyebaran penduduk, tingkat kesehatan penduduk, tingkat kemajuan penduduk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur sosial, pemilikan dan persewaan tanah, keterampilan penduduk, modal penduduk, agama, tradisi dan kebiasaan, dan sebagainya, mempunyai peranan penting dalam produksi pertanian itu. Dengan demikian adalah jelas bahwa faktor manusia itu penting sekali.

Modal, tingkatan teknologi, jumlah penduduk, dan sebagainya dapat mempengaruhi besarnya hasil pertanian. Karena kurangnya modal, alat-alat dan sumber tenaga, pekerjaan dalam pertanian di Indonesia umumnya dilakukan dengan tangan. Pekerjaan-pekerjaan baik dalam bercocok tanam maupun dalam mengolah hasil pertanian dilakukan dengan menyertakan buruh yang banyak, sehingga produktivitas per orang dan produktivitas per hektar adalah rendah.

Di Pulau Jawa misalnya karena pemilikan tanah ± 0,2 ha/orang, dapat dianggap bahwa yang mengerjakan tanah tiap ha kira-kira 5-6 orang.

Jika diketahui rata-rata waktu yang digunakan untuk bekerja dalam pertanian per hari bagi tiap orang, dapat dihitung banyaknya jam kerja/orang per-

c. Teori Saling Ketergantungan ("Interdependency theory")

Pada tahun tujuh puluhan, karena kesadaran akan saling berhubungan di dunia dan akibat pembahasan "Tata Ekonomi Baru Dunia" ("New International Economic Order"), maka timbul "teori Saling Ketergantungan", yang mengusahakan menyatukan pendekatan ketergantungan sepihak dengan saling ketergantungan dari ekonomi dunia dan hubungan internasional.

Menurut Soemitro Djojohadikoesoemo¹⁶, Tata Ekonomi Baru Dunia itu antara lain bertujuan memperbaiki perbedaan kemakmuran di dunia, karena pada 1975 perbandingan kemakmuran antara penduduk termiskin di dunia (diambil dari 10 % lapisan termiskin) dengan lapisan-lapisan terkaya di dunia itu (diambil dari 10 % lapisan terkaya di dunia), berbanding 1:13, dan hal itu diusahakan untuk menjadi 1:3 pada jangka waktu limapuluh tahun.

Setelah ketiga teori di atas, pada dewasa ini timbul suatu perkembangan yang berlain-lainan (mungkin akibat perkembangan berlebihan atau perkembangan yang tidak sesuai di negara industri), yang memusatkan perhatian kepada : Kebutuhan pokok bagi manusia, Kepentingan lokal (bagi tiap masyarakat), Berdikari (berdasarkan kekuatan dan sumberdaya sendiri), Pengembangan lingkungan ("Ecodevelopment") dan Teknologi kecil ("Small technology"), dan berdasarkan Transformasi struktural (yang meliputi hal-hal di atas).

Di Indonesia, berbagai teori di atas itu dicoba digunakan.

Salah satu hal yang penting bagi negara-negara berkembang adalah bagaimana caranya untuk menimbulkan kesempatan kerja, dalam menghilangkan pengangguran dan pengangguran tak kentara.

Hal ini sangat penting bagi pedesaan sebab di sana umumnya terdapat pengangguran dan pengangguran tak kentara, lebih-lebih di negara yang mempunyai permilikan tanah pertanian yang kecil.

Elizaga mengemukakan bahwa suatu usaha tani yang luasnya kurang dari dua hektar adalah tidak ekonomis, karena tak dapat menyerap kapasitas kerja keluarga petani.

Menurut Robinson .. yang utama di negara-negara berkembang, adalah menaikkan GNP, tetapi kadang-kadang sasaran ini bertentangan dengan sasaran untuk meningkatkan kesempatan kerja. Karena itu dalam memberikan pilihan sektor kegiatan ekonomi mana yang harus diprioritaskan dalam pembangunan, harus dipertimbangkan pelaksanaannya berhubungan dengan kesempatan kerja. Misalnya Taiwan, mula-mula mengembangkan sektor pertanian, yang dapat memberi banyak pekerjaan kepada penduduk dan kemudian beralih kepada sektor industri yang lebih modern sehingga banyak tenaga-tenaga kerja dari sektor pertanian dapat pindah ke sektor tersebut, sedangkan India dan Filipina mula-mula mengusahakan pengembangan industri modern yang menimbulkan masalah pengangguran yang rawan.

Negara yang sedang berkembang yang rapat penduduknya memerlukan tanah pertanian yang lebih luas bagi produksi bahan makanan, sehingga menghadapi masalah erosi dan penggarapan tanah, sedangkan negara maju yang jarang penduduknya memerlukan bahan mineral dan energi bagi industri, sehingga menghadapi masalah polusi.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang di bagian tertentu (di Jawa) rapat penduduknya, dan tanah pertanian merupakan hal yang penting karena matapencaharian pokok adalah pertanian dan dengan demikian penduduk bertempat tinggal tersebar di pedesaan.

Dengan demikian pembangunan desa yang mengatur kesejahteraan penduduk di pedesaan merupakan hal yang penting di Indonesia.

5. Beberapa Teori Pembangunan

Dalam pembangunan Hettne mengemukakan beberapa teori :15)

- a. Teori Modernisasi, di mana pembangunan merupakan cara yang paling dikenal dan paling berkuasa. Yang merupakan unsur utama dalam teori ini

dari golongan menengah : perekonomian yang tidak mantap, memperoleh kebutuhan akan makanan dan pakaian dan perumahan dengan susah payah, harta bendanya sedikit, mulai bekerja untuk nafkah pada umur yang masih muda, kurang keterampilan, kurang berniat untuk kemajuan, sering berpindah pekerjaan. Umumnya istri ikut mencari nafkah. Golongan rendah itu belum biasa ikut serta dalam kegiatan kelembagaan. Orang-orang dalam lapisan teratas memperoleh lebih banyak prestasi, penghargaan, kemakmuran dan wewenang dibandingkan dengan orang-orang dalam lapisan lebih rendah.

Lambang golongan bermacam-macam, tetapi yang lebih dipentingkan bukan kemakmuran dan kekuasaan melainkan latar belakang keluarga.

Tingkat sosial ("social rank") sama dengan lapisan sosial ("social strata") atau kelas sosial atau golongan ("social class").

Kriteria yang menentukan tingkatan sosial adalah penilaian unsur kebudayaan yang antara lain terdiri atas : perbedaan dalam kegiatan sosial-ekonomi, titel, kepangkatan, pemilikan benda tertentu, pemilikan tanah (pemilik, penyewa, buruh) ; pendapatan, pendidikan, keanggotaan lembaga, kualitas pribadi, moral, ras, keluarga, agama, pendidikan politik, lamanya menghuni wilayah, macam rumah yang dihuni, benda-benda yang dimiliki seperti macam pakaian, macam kendaraan, dan sebagainya. Perbedaan sosial dan ekonomi di kota lebih besar daripada di pedesaan.

- d. Perubahan sosial dan disorganisasi sosial ("social change and social disorganization").

Masyarakat terus berubah, walaupun kecepatannya tidak sama, sehingga tak ada masyarakat yang statis. Perubahan sosial menunjukkan perubahan dalam organisasi sosial, dan yang menjadi penyebab dari perubahan sosial itu, banyak faktornya.

Jika perubahan itu terjadi sangat cepat¹⁴⁾ dan tidak teratur (misalnya karena orang-orang atau kelompok-kelompok mengadakan tirikayan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku), akan menghasilkan disorganisasi sosial. Akibat dari disorganisasi sosial adalah : masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial itu harus ditanggulangi supaya terdapat keseimbangan ("equilibrium"), walaupun sebetulnya suatu keseimbangan

c. Keanekaragaman pengetahuan dan keterampilan.

Petani memerlukan aneka ragam pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaannya, orang kota tidak, jadi petani lebih banyak berhubungan dengan kebudayaan kebendaan.

d. Tingkat hidup ("levels and standard of living").

Orang-orang di pedesaan tingkat hidupnya lebih rendah (misalnya: tak ada mesin cuci, dan sebagainya). Hal itu terjadi karena kota dan desa berlainan kebutuhan dan berlainan perhatiannya.

c. Pengelompokan

Kelompok-kelompok sosial ("social group") mempunyai pola interaksi dari berbagai status dan peran, dalam suatu masyarakat.

Karakteristik dari kelompok sosial adalah :

1. Kejamakan (harus ada 2 orang atau lebih)
2. Interaksi dalam menuju tujuan bersama
3. Perasaan solidaritas

Dalam masyarakat terdapat macam-macam kelompok :

1. Menurut ikatan :

- Kelompok elementer, yang diikat oleh satu ikatan
- Kelompok kumulatif, yang diikat oleh beberapa ikatan.

2. Menurut hubungan : ¹³⁾

a. Menurut Charles H. Cooley

- Kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab sehingga saling mengenal, disebut kelompok primer
- Kelompok yang anggota-anggotanya tidak berhubungan akrab, melainkan dihubungkan oleh minat yang khusus disebut kelompok sekunder.

b. Menurut Emile Durkheim :

- Kelompok yang anggota-anggotanya dihubungkan oleh kegiatan (mata pencaharian) yang sama, disebut kelompok yang bernifat organik.
- Kelompok yang anggota-anggotanya dihubungkan oleh kesamaan ("homogeneity") dari orang-orang yang menjadi anggota, disebut kelompok yang mempunyai dasar mekanis.

- Kontrol sosial formal yang terdapat atas hukum, peraturan, dan sebagainya.

Kontrol sosial itu menjamin kelangsungan hidupnya organisasi sosial.

b. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan.

Tiap manusia mempunyai sederetan cita-cita ("ideas") : sebagian cita-cita berkembang waktu masih kanak-kanak dalam hubungan dengan orang tua dan keluarga, sebagian lagi diperoleh dari pengalaman sehari-hari, dalam hubungan dengan teman-teman dan lain-lain, setelah dewasa. Sebagian dari cita-cita tertanam di dalam jiwa, sebagian lagi agak longgar, sehingga dapat hilang dan diganti oleh cita-cita lain. Cita-cita yang dimiliki oleh sekelompok orang-orang atau kelompok-kelompok orang merupakan suatu dasar bagi berfungsinya masyarakat secara teratur, karena dengan hal itu mudah didapatkan persetujuan atau ketidaksetujuan, sehingga kecacauan dapat dihindari, dan orang-orang yang memaksakan keinginan dan tujuannya akan mendapat tantangan dari kelompoknya.

Cita-cita yang menyebabkan suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk, disebut nilai ("value"), dan pengaturan untuk memperoleh nilai-nilai disebut norma.

Seorang manusia bertindak dan berlaku seperti anggota-anggota lain dari masyarakat : Pakaian, cara makan, kebiasaan, dan sebagainya, hampir sama.

Pengaruh-pengaruh dalam kebudayaan sehingga terdapat perbedaan antara masyarakat desa yang berlainan wilayah atau antara orang desa dan kota dari wilayah yang sama, adalah :

1. Pengaruh geografi alam. ¹⁰⁾

- a. Lingkungan alam atau "physical setting": perbedaan antara lokasi, iklim, topografi dan sumber alam (banyaknya sinar matahari, air, dan sebagainya).
Petani bekerja di alam terbuka, orang kota dalam bangunan.
- b. Ketidak-pastian mengenai alam: misalnya petani menginginkan hujan, tetapi matahari bersinar terik, dan sebagainya.
- c. Hubungan yang dekat dengan alam : petani bekerja dalam alam terbuka, senang berjalan-jalan antara tumbuh-tumbuhan dan ternak, dan sebagainya.

Di samping itu Bertrand menambahkan bahwa terdapat komponen kebudayaan material atau kebudayaan kebendaan seperti : rumah, pakaian, makanan, alat-alat dan sebagainya, dan terdapat pula komponen kebudayaan spiritual atau kebudayaan rokhani seperti : agama, aliran politik, kebiasaan dalam perkawinan, perkerabatan, pantangan, pendidikan, dan sebagainya.

Kebudayaan itu mengandung berbagai unsur kebudayaan yang universal dalam semua kebudayaan. Beberapa unsur kebudayaan penting dicantumkan di bawah ini :

1. Kebiasaan ("folkways") dan pengaturan ("mores").

"Folkways" adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial ("for orderliness in man's social life") yang diikuti dan diterima tetapi tidak diwajibkan, sedangkan "mores" adalah pengaturan tingkah laku yang diharuskan dan diwajibkan dengan berbagai cara.

Orang yang tidak mentaati "folkways" (misalnya laki-laki yang membiarkan rambut panjang sekali, dan sebagainya) akan dianggap eksentrik, radikal, dan dipergunjingkan, tetapi yang tidak mentaati "mores" akan mendapat sanksi/hukuman yang lebih berat, yaitu ia akan disisihkan, karena "mores" itu berhubungan dengan moral dan penting artinya bagi kelangsungan hidup kelompok. Peraturan hukuman bagi pembunuhan, pencurian, penipuan dicantumkan di dalam peraturan resmi.

2. Pranata Sosial ("social institution"), yaitu sistem dari segala hubungan sosial untuk mengatur berbagai keperluan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sistem sosial ("social system") adalah interaksi sosial dalam berbagai tingkatan. (Juga berarti "social institution").

4. Organisasi sosial ("social organization") menunjukkan macam-macam pola tingkah laku manusia dalam masyarakat.

5. Proses sosial ("social process") merupakan konsep yang meliputi unsur dasar yang selalu berubah (dinamis) dalam organisasi sosial, karena bentuk-bentuk interaksi tertentu terjadi berulang-ulang dalam keadaan teratur dan samar.

Proses sosial ada dua macam :

1. Proses sodilarita meliputi: proses kerja sama, asimilasi, dsb.
2. Proses antagenis meliputi: persaingan, perselisihan dsb.

c. Beberapa aliran dalam Anthropologi Budaya

Dalam anthropologi budaya dikenal beberapa aliran yang mempunyai dasar teori yang berbeda untuk mempelajari kebudayaan suatu bangsa (atau suatu masyarakat) tertentu.

1. Aliran Evolusi sudah dimulai pada pertengahan abad ke-19 mengenai evolusi jasad hidup. Penggolongan secara evolusi selain dalam biologi dilakukan dalam ilmu sosial juga, misalnya terdapat penggolongan secara evolusi dalam peradaban dan perkawinan dan terdapat pula penggolongan secara evolusi dalam agama.
2. Aliran Kulturhistoris dan aliran Diffusi.
 - a. Aliran Kulturhistoris (aliran Wina)
Walaupun prinsip evolusi masih digunakan, aliran ini menitikberatkan faktor ambil mengambil di antara berbagai kebudayaan.
 - b. aliran Diffusi
Aliran Diffusi⁷⁾ beranggapan bahwa semua peradaban dapat dikembalikan kepada jaman Mesir pada pemerintahan dinasti-dinasti. Berbagai unsur dari jaman Mesir secara diffusi tersebar ke seluruh dunia.
3. Aliran Determinis Geografi
Aliran ini beranggapan bahwa bukan kebudayaan material saja, melainkan kebudayaan rohani ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal penduduk.
4. Aliran Fungsional
Aliran ini dapat dianggap sebagai reaksi terhadap aliran Diffusi. Dalam kebudayaan materi aliran Fungsional itu menitik-beratkan kepada fungsinya, dan menerangkan bukan diffusi saja yang penting tetapi keadaan geografi berpengaruh besar dalam menentukan bentuk benda. Dalam kebudayaan rohani diterangkan bahwa berbagai motif dapat menentukan tingkah laku manusia.
5. Aliran Perancis
Aliran ini mempunyai corak sosiologi: masyarakat dianggap sebagai dasar dalam penyelidikan; segala cita (buah pikiran) datang dari masyarakat; agama dijiwai oleh cita-cita kelompok, dan sebagainya. Pendapat ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran Evolusi yang berpangkal pada individu (perseorangan).

Dalam menganalisa kebudayaan itu Kuncaraningrat⁵⁾ memberikan keterangan mengenai unsur-unsur (aspek) universal dari kebudayaan dan pranata dalam kebudayaan :

1. Kebudayaan itu terdiri dari berbagai aspek :

- a. Sistem religi dan upacara keagamaan.
- b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Sistem pengetahuan.
- d. Bahasa
- e. Kesenian
- f. Sistem matapencaharian
- g. Sistem teknologi dan peralatan.

2. Dalam berbagai aspek kebudayaan terdapat beberapa kelompok pranata :

- a. Pranata perkerabatan = "Kinship" atau "domestic institution", yaitu penglamaran, perkawinan, perceraian, poligami, dan sebagainya.
- b. Pranata pendidikan atau "Educational institution" seperti : pengasuhan anak-anak, pendidikan menengah, pemberantasan buta huruf, dan sebagainya.
- c. Pranata rasa keindahan dan rekreasi atau "Aesthetic and recreational institution", yaitu : seni rupa, seni suara, seni drama, seni gerak, kesusastraan, olah raga, dan sebagainya.
- d. Pranata ilmiah atau "Scientific institution", seperti : penelitian, pendidikan ilmiah, metoda ilmiah, dan sebagainya.
- e. Pranata ekonomi atau "Economic institution", yakni : pertanian, peternakan, pemburuan, industri, perdagangan koperasi, dan sebagainya.
- f. Pranata keagamaan atau "Religions institution", yaitu : doa, kenduri, upacara, ibadah, pantangan, dan sebagainya.
- g. Pranata kepartaian atau "Political institution", yakni : demokrasi, kehakiman, kepartaian, ketentaraan, pemerintahan, dan sebagainya.
- h. Pranata kebutuhan jasmaniah atau "Somatic institution", yakni : pemeliharaan kecantikan, kesehatan, kedokteran.

b. Sistem nilai - budaya

Kuncaraningrat⁶⁾ mengemukakan, bahwa suatu sistem - nilai terdiri atas konsepsi - konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari

TABEL NO 1
 PENDUDUK YANG TINGGAL DI PEDESAAN, PERALIHAN DESA - KOTA DAN
 PERKOTAAN, MENURUT WILAYAH : 1960 - 1975

Wilayah	1-9-6-0			1-9-7-5		
	Pedesaan	Peralihan Desa-kota	Perkotaan	Pedesaan	Peralihan Desa-kota	Perkotaan
Afrika	82.4	8.09	9.51	75.6	8.66	15.74
Amerika Latin	51.5	23.43	25.07	39.6	23.85	36.55
Amerika Utara	30.2	19.89	49.91	23.5	19.27	57.23
Asia Timur	75.4	10.13	14.47	69.3	11.02	19.68
Asia Selatan	82.0	8.67	9.33	77.0	9.47	13.53
Eropa	40.8	23.08	36.12	32.9	25.50	41.60
Oceania	34.1	22.73	43.17	28.4	21.69	49.90
USSR	51.0	24.20	24.80	39.5	25.23	35.27
Seluruh Dunia	66.3	19.07	14.63	60.7	14.54	24.76
Wilayah Maju	59.9	23.61	36.49	30.8	24.77	44.43
Wilayah sedang berkembang	79.1	9.34	11.56	72.7	10.37	16.93

Sumber : Misra, R.P., 1981

NO INVENTARIS

533/KI/PT/99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel no. 1	
1	Penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan 2
2	Kerangka Kluckohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup 5
3	Hubungan lereng dan penggunaan tanah 30
4.	Kelas Kapibilitas tanah 31
5.	Pokok-Pokok Kebijakan pembangunan desa 54
6.	Tingkat pembangunan desa 58
7.	Distribusi matapencarian di Indonesia, 1971 dan 1976. 69
8.	Terdapatnya kemiskinan dan penyebarannya 66
9.	Kawasan pertanian di Indonesia 82
10.	Perubahan luas sawah di Indonesia 82
11.	Harga sembilan bahan kebutuhan pokok 103
12.	Perbedaan di desa dan kota di Asia 102
13.	Tingkat dan perkembangan kemiskinan di Indonesia 104
14.	Pengaturan tanah pertanian di Makaleo 120
15.	Hirarki pemukiman 123
16.	Pengaruh prasarana sosio-teknik terhadap permintaan air per kapita 127
17.	Konsumsi air dari sumur dan ledeng 128
18.	Persentase penduduk yang mendapat penyediaan air dan sanitasi 129
19.	Jumlah penduduk bagi tiap ranjang di rumahsakit 129
20.	Standar jumlah ranjang di rumahsakit 130
21.	Pelayanan kesehatan di Malaysia 131
22.	Standar sekolah di beberapa negara di Asia 132
23.	Pelayanan ekonomi bagi pedesaan 133
24.	Tataguna tanah perkotaan di beberapa negara di Asia 135
25.	Tataguna tanah dan prasarana di pusat pedesaan di Malaysia 136
26.	Pusat desa di Sulawesi Tenggara 137

	Halaman
6. Kecamatan sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan	62
7. Desa sebagai Unit Daerah Administrasi Pembangunan Desa	64
8. Bidang pengembangan di Indonesia	65
a. Bidang Ekonomi	66
b. Bidang sosial	66
c. Bidang fisik dan prasarana	69
d. Bidang pemerintahan	70
9. Cara-cara pembangunan desa	71
10. Standar jumlah dan penyebaran prasarana sosial - ekonomi di Indonesia	73
a. Tempat ibadat	73
b. Pendidikan	73
c. Kesehatan	73
d. Perdagangan	74
11. Kebijakan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa - LKMD	74
a. Landasan, azas dan tujuan	74
b. Fungsi	74
c. Bidang tugas	74
d. Usaha LKMD	75
12. Kelembagaan yang terdapat di desa di Indonesia	75
13. Biaya pelaksanaan	75
14. Perencanaan dan pelaksanaannya	77
15. Perencanaan dan pelaksanaannya dan pelaksanaannya	88
16. "Block level planning" di India	92
Bab IV Perencanaan Pusat Wilayah Pedesaan	95
1. Maksud dan tujuan perencanaan pusat wilayah pedesaan	95
2. Kesejahteraan yang belum merata	96
3. Teori umum mengenai ekonomi maju dan ekonomi yang berkembang	97
a. Aliran evolusi dari Rostow	97
b. Model dualistik dari Broeke	97
c. Pendapat Friedmann	99

